

EKSTENSIA


Edisi I Tahun 2010



**PERAN STRATEGIS
PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM Mendukung
KETAHANAN PANGAN**

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS

Kepala Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian



**Menuju
Penyuluh Pertanian
Profesional**

EKSTENSIA

SUSUNAN DEWAN REDAKSI EDISI I TAHUN 2010

I. PELINDUNG

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

II. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

III. PENGARAH MATERI

1. Kepala Bidang Lingkup Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Koordinator Penyuluh Pertanian Pusat

IV. DEWAN REDAKSI TIM PENYUNTING

KETUA

Dr. Ir. Enisar Sangun, M.Sc.

SEKRETARIS

Ir. Sri Puji Rahayu, MM

ANGGOTA

Ir. Siti Hafsa Husas, MM

Ir. Rr. Priwanti, Ir. Marwati

Ir. Susilo Astuti Handayani, MM

Ir. Siti Nurjanah, MMA

Ir. Sad Hutomo, MSi

SEKRETARIAT

KETUA

Ir. Zahron Helmy, MP

SEKRETARIS

Inang Sariati, Spt.MM

ANGGOTA

Ir. Hotman, MM

Zuroqi Mubaroq, SE

Nunun Utari

DISTRIBUSI

Doni Supriyanto

Iwan Mularto



Salam Redaksi,

"Setelah lama tidak beredar, kali ini Ekstensia terbit kembali untuk menjumpai pembaca setianya. "Ekstensia terbit kembali disaat yang tepat, mengingat dengan telah terbitnya UU No 16 Tahun 2006 penyuluh pertanian mempunyai peran sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan pertanian". Demikian sambutan antusias Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian ketika mengetahui Ekstensia akan diterbitkan kembali.

Pada terbitan perdana tahun 2010 ini Ekstensia mengangkat tema Peran Strategis Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Tema ini layak untuk diangkat mengingat pangan merupakan kebutuhan utama masyarakat yang perlu kita dukung ketahanannya. Disamping itu diversifikasi pangan menjadi salah satu program dari 4 program sukses Kementerian Pertanian 2010-2014, meliputi swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Rubrik Ekstensia tahun 2010 tidak berbeda dengan terbitan Ekstensia yang terdahulu yaitu Gema, Opini, Wahana, Program Pemberdayaan, Swadaya, Wawasan/Iptek, serta Sosok. Rubrik tersebut masih cukup relevan menampung aspirasi pembaca untuk memperoleh informasi terkini sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang selalu terjadi secara dinamis. Terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mewajibkan masyarakat pertanian untuk segera mengadakan perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Terkait dengan tema di atas, fakta menunjukkan bahwa kesuksesan dari pelaksanaan program ketahanan pangan perlu didukung oleh adanya peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian, serta peran pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang mampu berperan dalam memfasilitasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan pihak terkait guna mewujudkan penyuluh pertanian yang profesional serta pelaku utama dan pelaku usaha yang berdaya saing .

Pembaca yang budiman,

Pada rubrik Gema, Opini, dan Wahana dapat anda peroleh informasi tentang pentingnya peran kelembagaan penyuluhan pertanian dan tuntutan bagi penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha untuk bekerja secara profesional. Karena keterbatasan ruang, hanya komoditi pangan prioritas yang diketengahkan, antara lain daging sapi, padi dan padi organik. Pada rubrik lainnya masih kami suguhkan beberapa topik yang penting dan menarik.

Ada perubahan kebijakan yang perlu pembaca ketahui, bahwa Ekstensia ditahun 2010 hanya menerima tulisan dari penyuluh pertanian berupa karya tulis ilmiah populer yang topiknya sesuai dengan 7 rubrik yang ada. Info tentang rubrik dan ketentuan tulisan dapat dibaca pada bagian akhir majalah ini. Bak pepatah, "tak ada gading yang tak retak", karena itu redaksi menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Selamat membaca.

hal.5 | GAPURA:

Salam dari Redaksi
Daftar Isi

hal.6 | Gema:

Menuju Penyuluh Pertanian Profesional

Agar produk pertanian Indonesia mempunyai nilai tambah, berdaya saing dan diekspor, maka para pelaku utama/petani harus ditingkatkan kemampuannya melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Untuk itu penyuluh harus profesional, tidak manja, bekerja keras dan selalu mendampingi petani...hal 6

Penyuluh Pertanian Dituntut Profesional

Pengertian kompetensi penyuluh pertanian yaitu kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian...hal 14

hal.22 | OPINI:

Pembentukan Kelembagaan Penyuluh Pertanian Pemerintah merupakan suatu kebutuhan

Diperlukan payung hukum berupa Perpres / Kepres untuk membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang mampu mendukung dan mewujudkan penyuluh pertanian profesional...hal 22

Langkah Penting Mendukung Keberhasilan Program PSDS 2014

penyuluh pertanian harus menguasai pengetahuan tentang kondisi riil peternakan di Indonesia dan kemampuan menerjemahkan program yang ingin dicapai pemerintah kepada peternak sehingga peternak tahu – memahami - dan melaksanakan program tersebut.

hal 31

hal.39 | Wahana:

Kiprah BPP dalam memperkuat Ketahanan Pangan di Kabupaten Blitar

Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Blitar provinsi Jawa Timur telah berhasil menghantarkan petani mau dan mampu meningkatkan produksi padi dari 8 % menjadi 17 %. Keberhasilan ini tentunya tidak bisa dipungkiri salah satunya berkat kerja keras Penyuluh Pertanian yang bernaung di 6 wilayah koordinasi wilayah kerja BPP di kabupaten Blitar..hal 39

Kegiatan Gapoktan Mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan dengan kondisi kecukupan pangan bagi rumah tangga yang terindikasi dari ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu...hal 46

hal.51 | Program Pemberdayaan:

Peran Penyuluh Dalam Mendukung

Program PUAP..51

Peran Penyuluh Pertanian Dalam Program Aksi

Desa Mapan.....58

hal.66 | Swadaya:

Mandiri dengan Padi Organik...66
Peluang berswadaya Melalui Kakao...73

hal.78 | Wawasan/Iptek:

Sentuhan Teknologi Tanaman
Garut Dapat Menambah Pundi-
Pundi Petani...78

Integrasi Tebu dan Ternak...86

Sebatang menjadi Beras.....90

hal.95 | SOSOK:

SRI Berhasil Mengantar H. Akom ke Istana

Nama lengkapnya H. Akom Kartim, petani yang satu ini termasuk petani yang sangat kreatif. Betapa tidak petani ini telah menciptakan alat emposan tikus hasil temuannya sendiri yang diberi nama "POSRI" yang merupakan singkatan dari Alat Emposan Tikus Elektrik yang dijual seharga Rp. 300.000.- perbuahnya. Dilahirkan di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang merupakan lumbung padi nasional, tepatnya pada tanggal 10 mei 1964. Namun, warga di daerah tempat tinggalnya di Kampung Kedunggalih, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Jawa Barat memanggilnya dengan nama H.Akom.



Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja M.Ed.

Kepala Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian

Kata Sambutan

Ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama sepakat untuk mewujudkannya.

Sejalan dengan sistim otonomi pemerintah yang diterapkan di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa maka sesuai kewenangannya menjadi pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator, dan regulator penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Agar ketahanan pangan berhasil, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye berkelanjutan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.

Tahun 2010, majalah Ekstensia terbit kembali dengan tema "Peran Strategis Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan". Berbeda dengan terbitan sebelumnya, Ekstensia yang terbit tahun 2010 ini, menerima tulisan ilmiah populer yang berasal dari penyuluh pertanian di Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan sesuai dengan peran penyuluhan pertanian yang strategis dalam pembangunan pertanian khususnya dalam menyampaikan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya kepada para pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian.

Saya menyambut gembira, dengan terbitnya Ekstensia sebagai majalah penyuluhan yang berguna sebagai media komunikasi dan ajang meningkatkan profesionalisme para penyuluh pertanian dalam penulisan ilmiah populer. Terakhir saya ucapkan selamat, semoga majalah yang kita banggakan ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi para pembacanya, khususnya penyuluh pertanian yang tersebar di pelosok tanah air.



Dr. Ir. Ato Suprpto, MS
Kepala BPSDMP

Menuju Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Agar produk pertanian Indonesia mempunyai nilai tambah, berdaya saing dan diekspor, maka para pelaku utama/ usaha harus ditingkatkan kemampuannya melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Untuk itu penyuluh harus profesional, tidak manja, bekerja keras dan selalu mendampingi petani.

Ekstensia terbitan perdana tahun 2010 ini, berkesempatan berbincang dengan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Dr. Ato Suprpto, MS mengenai profesionalisme penyuluh pertanian terkait dengan UU No. 16 tahun 2006, kesiapan sumberdaya manusia pertanian dalam

memasuki era global/ ACFTA, serta peran strategis penyuluh pertanian dalam pencapaian empat sukses pembangunan pertanian. Berikut hasil wawancaranya.

Peran Penyuluh Pertanian dalam Empat Sukses Pembangunan Pertanian dan Persaingan Global/ACFTA

Penyuluh pertanian dalam UU No. 16 tahun 2006 terbagi menjadi tiga, yaitu penyuluh PNS (pegawai negeri sipil), penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Selain menjadi pejabat fungsional, penyuluh pertanian dapat juga menjadi pejabat profesi. Ada tiga jenjang penyuluh pertanian fungsional yaitu penyuluh terampil, penyuluh penyelia dan penyuluh ahli.

Penyuluh pertanian mempunyai peranan strategis dalam empat sukses pembangunan pertanian yaitu berperan dalam upaya peningkatan: 1) swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) diversifikasi pangan; 3) meningkatkan daya saing, nilai tambah dan ekspor; dan 4) peningkatan kesejahteraan petani. Misalnya untuk sukses pertama, penyuluh berperan bagaimana petani mampu memproduksi padi, jagung, kedele, tebu dan beternak sapi, sehingga pada akhir periode 2010 – 2014 kita bisa mencapai swasembada daging dan swasembada berkelanjutan ke lima komoditi tadi.

Berikutnya, penyuluh juga diminta oleh Kementerian Pertanian untuk mengkampanyekan program diversifikasi pangan yang bertujuan agar konsumsi beras perkapita menjadi turun, yaitu dari 135 kg/kapita/tahun menjadi 100 kg/

kapita/tahun. Kalau swasembada bisa tercapai dan disisi lain konsumsi beras bisa dikurangi, maka akan menjadi surplus, dan dari surplus ini diharapkan kita bisa ekspor beras ke pasar dunia yang diistilahkan dengan *feed the world* atau memberi makan dunia, tentunya juga sebagai sumber devisa negara. Tugas penyuluh pertanian menjadi berat luar biasa. Untuk yang terakhir ini penyuluh belum punya pengalaman, makanya nanti akan dilatih lagi supaya penyuluh bisa memahami pentingnya kampanye dalam rangka menggalakkan diversifikasi pangan.

Menghadapi globalisasi, khususnya dengan berlakunya *Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*, memaksa petani kita untuk mampu bersaing dengan sesama petani negara ASEAN dan China. Dr. Ato menambahkan bagaimana kiat kita memenangkan pasar regional ini adalah dengan cara: *Pertama*, menyiapkan petani supaya mampu bersaing dengan petani dari negara lain, umpamanya petani jagung kita mampu bersaing dengan petani jagung dari Thailand, petani sawit kita mampu bersaing dengan petani sawit Malaysia dan petani hortikultura kita mampu bersaing dengan petani hortikultura Thailand. *Kedua*, mempersiapkan petani agar bisa memproduksi dengan biaya murah sehingga hasilnya dapat bersaing dengan pasar internasional. Dalam hal ini perlu inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian yang selanjutnya disampaikan ke petani melalui penyuluhan, disini fungsi para penyuluh kita.

Profesionalisme Penyuluh Pertanian dan Standar Kompetensi

Menurut Dr. Ato, profesionalisme penyuluh terkait juga dengan sukses yang ke tiga yaitu meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Untuk memahami hal ini, penyuluh pertanian harus memahami spektrum agribisnis, yang berarti juga harus memahami sub sistem agribisnis yaitu : 1) sub sistem sarana produksi; 2) sub sistem produksi (budidaya); 3) sub sistem pasca panen dan pengolahan; 4) sub sistem pemasaran; dan 5) sub sistem jasa penunjang. Bila dikaitkan dengan profesi penyuluh, nantinya penyuluh akan diarahkan pada ke lima keahlian sub sistem tersebut.

Untuk mendorong karir penyuluh ke depan, Kementerian Pertanian c.q. Badan Pengembangan SDM Pertanian telah berhasil menyelesaikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian, Bidang Penyuluhan Pertanian. SKKNI ini telah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui penerbitan SK No.29/Men/III/2010. Langkah berikutnya akan dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yaitu lembaga independen yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebagai lembaga independen, nantinya LSP bisa dimiliki pemerintah, perguruan tinggi, atau swasta, dan ini sedang dibicarakan. Diharapkan tahun ini LSP sudah terbentuk.

Kalau sudah terbentuk, selanjutnya akan di-perlukan asesor kompetensi yang bekerja di LSP dengan keahlian di bidang tertentu dalam sub sistem agribisnis.

Jadi, nantinya ada asesor yang ahli/kompeten dibidang sub sistem sarana produksi, asesor ahli dibidang sub sistem produksi (budidaya), ahli dibidang sub sistem pasca panen dan pengolahan; dan asesor yang ahli dibidang sub sistem pemasaran. Asesor bisa seorang profesor penyuluh atau penyuluh ahli. Setelah asesor terpilih dan LSP sudah terbangun, langkah selanjutnya akan dilakukan akreditasi pada lembaga pendidikan yang akan melaksanakan pelatihan profesi ini. Ketika ditanyakan lembaga mana yang akan melaksanakan pelatihan profesi ini, Dr. Ato menyebutkan bahwa karena pelatihannya lebih banyak aspek teknis, kemungkinan pelatihan akan dilaksanakan di Balai-Balai Besar Pelatihan Pertanian atau Sekolah Tinggi Penyuluhan kita, hal ini belum bisa ditentukan. Namun untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP), Balai-Balai Besar tersebut harus lulus dan mendapat akreditasi dari LSP. Apabila lulus LDP akan menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Tahun 2010 ini sudah disiapkan anggaran untuk 600 orang penyuluh pertanian yang akan mengikuti Diklat Profesi. Diharapkan mereka akan memilih bidang keahlian dalam sub sistem agribisnis. Misalnya sub sistem budidaya, spesifik padi/jagung organik. Setelah mengikuti diklat sesuai keahliannya, ke 600 orang ini akan diuji oleh asesor kompetensi, dan jika lulus maka penyuluh tersebut akan mendapat sertifikat keahlian dibidang padi/ jagung organik.

Menurut Dr. Ato, sertifikat yang diperoleh penyuluh ini beda dengan sertifikat biasanya, karena sertifikat ini harus

dilaksanakan dan harus dipraktekkan oleh penyuluh bersangkutan, bila dalam satu tahun tidak dipraktekkan, maka sertifikat tersebut dapat dicabut. Mengingat hal-hal tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan bahwa tidak semua penyuluh pertanian fungsional ikut menjadi penyuluh profesi. Tahun 2010 Insya Allah akan ada 600 orang penyuluh yang mendapat kesempatan menjadi penyuluh profesi dan tahun 2011 akan dianggarkan kembali.

Mengenai penempatannya, penyuluh profesi akan ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di tingkat kecamatan, karena penyuluh ini yang akan membimbing penyuluh polivalen yang ada di desa. Selain itu juga akan ditempatkan di Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) di tingkat kabupaten, dan di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) di tingkat Provinsi. Penyuluh pertanian di pusat yang saat ini ada 32 orang penyuluh ahli, nantinya juga akan didorong menjadi penyuluh profesi.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah yang diperlukan untuk mewujudkan penyuluh yang profesional

Kelembagaan yang diperlukan adalah lembaga seperti yang diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2006 Bab V pasal 8 sampai dengan 19, antara lain disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan terdiri dari kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya. Kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, di tingkat provinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan dan di tingkat

kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Namun sampai saat ini belum semua provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan UU 16 tahun 2006.

Menyikapi hal tersebut Dr. Ato Suprato mengatakan bahwa sebetulnya begitu UU No. 16 tahun 2006 diundangkan pemerintah, Badan Pengembangan SDM Pertanian telah gencar melakukan sosialisasi. Dengan bantuan Komisi IV DPR RI yang bersama-sama melakukan sosialisasi diharapkan Pemda segera membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanat undang-undang. Di pusat nanti akan berubah namanya menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang perpresnya sudah keluar tertanggal 14 April 2010.

Kepala Badan menyebutkan bahwa lambannya pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah ini karena adanya keragu-raguan di daerah dengan alasan: 1) masih belum keluarnya Perpres yang mengatur kelembagaan penyuluhan; 2) masih banyak daerah yang salah intepretasi pelaksanaan PP No 41; dan 3) tidak semua daerah PAD nya cukup dan tidak semua daerah mempunyai potensi pertanian. Bapak Menteri Pertanian tak henti-hentinya terus meyakinkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera membentuk kelembagaan penyuluhan karena kelembagaan ini sangat strategis terutama dalam mendukung empat sukses program pembangunan pertanian.



Kunjungan Lapangan Kepala Badan PSDM Pertanian ke Agro Techno Park (ATP) dalam rangka persiapan kerjasama peringkatan profesionalisme penyuluh.

Penyuluh Profesional dipersiapkan mendampingi petani menghadapi pasar global/ACFTA

Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat kita tidak dapat menghindari dari perdagangan bebas antar negara. Kondisi ini akan berpengaruh negatif atau positif terhadap pelaku utama dan pelaku usaha. Bagaimana menyikapi hal ini bila dikaitkan dengan tuntutan bagi penyuluh pertanian yang profesional? Untuk hal ini Dr. Ato memberikan penjelasan secara sistematis sebagai berikut.

Dalam menyikapi persaingan global dan ACFTA, kita hendaknya harus memandangnya bukan sebagai masalah tetapi sebagai tantangan. Ada 4 cara yang harus kita lakukan: 1) penyuluh

harus ditingkatkan kompetensinya melalui latihan profesi dan latihan teknis dibidang agribisnis dan kewirausahaan; 2) penyuluh perlu ditingkatkan pengetahuannya melalui *cyber extension*; 3) kemampuan widyaiswara yang akan melatih penyuluh juga harus ditingkatkan; dan 4) selanjutnya kemampuan para petani ditingkatkan melalui pendampingan para penyuluh pertanian.

Melalui *cyber extension* yang dipersiapkan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian semua informasi teknologi dapat diperoleh para penyuluh dengan mudah melalui web site Pusat Pengembangan Penyuluhan yang "*conecting*" dengan komputer yang ada di BPP di tingkat kecamatan. Dengan

demikian, bila penyuluh perlu informasi teknologi sewaktu waktu bisa terlayani dengan cara *down load*. Dengan adanya *cyber extension* tahun 2010 ini, ke depan penyuluh - akan dipermudah dalam penyediaan informasi teknologi pada petani, sehingga dalam membimbing petani lebih mudah dan petani kita siap. Sekarang masih ada kesan bahwa petani belum siap menghadapi globalisasi terlihat dengan adanya demo yang dilakukan oleh petani/kelompok tani dan serikat buruh.

Greget peningkatan kapasitas penyuluh sudah dirasakan oleh Penyuluh Pusat

Dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, di kantor Badan Pengembangan SDM Pertanian yang berada di gedung D Kampus Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan akan dibangun ruang diorama yang dilengkapi studio untuk siaran radio yang terhubung (*link*) dengan Radio Pertanian Ciawi (RPC). Dengan demikian para penyuluh yang selama ini melakukan siaran di RPC, nantinya tidak perlu jauh-jauh ke Ciawi, cukup *on air* di ruangan diorama tersebut. Tentunya perlu juga disiapkan tenaga pemandu, sehingga akan memudahkan para penyuluh yang akan siaran. Manfaat lain adalah mempermudah eselon I dalam menyampaikan kebijakannya kepada petani karena cukup disiarkan melalui siaran radio ini.

Saat ini banyak kesibukan para penyuluh pertanian di pusat terutama dalam menyediakan berbagai materi

penyuluhan yang sangat bervariasi, mulai dari penyiapan materi *cyber extension*, materi untuk siaran radio, materi untuk dialog interaktif, dan materi untuk media cetak berupa folder, brosur, leaflet maupun tulisan untuk tabloid Sinartani. Selain itu para penyuluh juga aktif menjadi pendamping dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian seperti program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Program READ, Program FEATI dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan profesi penyuluh pertanian (seminar/workshop), penilaian angka kredit, penyusunan program penyuluhan pertanian dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan lainnya.

Peran Strategis Penyuluh Pertanian menyukseskan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, selain memahami aspek produksi/ketersediaan, penyuluh pertanian juga dituntut faham akan aspek distribusi dan konsumsinya. Bagi penyuluh aspek konsumsi ini merupakan hal yang baru, karena selama ini hanya berorientasi pada aspek produksi saja yang dibuktikan dengan berhasilnya Indonesia menjadi negara yang berswasembada beras pada tahun 2004 dan 2008, sehingga seolah-olah para penyuluh adalah petugas yang serba bisa.

Untuk mendukung aspek konsumsi ini, penyuluh akan dilatih bagaimana pemahaman tentang aspek konsumsi

ini melalui kegiatan kampanye. Materi yang akan dikampanyekan antara lain: 1) bagaimana agar penyuluh dapat memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat bahwa beras bukan superior sebagai sumber karbohidrat dan sumber karbohidrat dari bahan non beras itu bukan komoditas inferior, sehingga bila kita makan tidak perlu minder/rendah diri. Selama ini orang yang makan tiwul atau ubi jalar/ ubi kayu akan dicap miskin; 2) penyuluh harus paham tentang pola makan dengan gizi berimbang, artinya makan tidak hanya karbohidrat saja tetapi juga harus dipenuhi dengan protein, sayur dan buah; 3) adanya pola makan yang benar. Pola makan harus diintroduksi pada masyarakat sedini mungkin mulai dari anak-anak TK, SD, SMP dan SMA, sehingga pola makan yang terbentuk bukan berdasarkan kebiasaan tapi dari kebutuhan gizi yang baik dan berimbang. Apa yang terjadi selama ini orang belum merasa sarapan/makan kalau belum makan nasi, padahal sudah makan roti, inilah yang disebut lapar psikologis. Dr. Ato menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi kepala Pusat Data dan Statistik, yang menemukan data bahwa wilayah di Indonesia yang paling banyak mengkonsumsi beras adalah: 1) Sumatera Utara (144-145 kg/kapita/tahun); 2) Sumatera Barat; 3) Sulawesi Selatan; dan 4) Jawa Barat. Hal ini harus dipahami betul oleh para penyuluh dan selanjutnya dapat melakukan penyuluhan pada anak-anak (TK, SD, SMP dan SMA), pada ibu-ibu PKK dan pada ibu-ibu rumah tangga. Penyuluhan tentang aspek konsumsi ini penting karena bila ketahanan pangan terganggu

maka akan berdampak pada ketahanan bidang politik, sosial dan ekonomi. Jadi sekali lagi tugas penyuluh sangat strategis sekaligus mempunyai beban yang tidak ringan.

Untuk keberhasilan kampanye ketahanan pangan, perlu adanya gerakan bersama antara Badan Ketahanan Pangan (sebagai imam), Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai pendamping utama untuk kampanye, dan Badan Litbang Pertanian sebagai lembaga yang diharapkan dapat menciptakan pangan non beras sebagai sumber karbohidrat seperti jagung menjadi beras jagung, singkong menjadi beras singkong, tepung sagu, ubi menjadi aneka olahan makanan yang menarik misalnya diolah menjadi mi dengan aneka rasa. Pengalaman Dr. Ato yang pernah menikmati aneka rasa masakan mi berasal dari bahan lokal bersama Bapak Presiden di Cikeas, ternyata enak sekali. Beliau juga pernah bertemu Pak Tunggal Abinowo di Malang Jawa Timur, salah satu pengusaha yang mengembangkan aneka olahan makanan yang berasal dari ubi jalar.

Program ketahanan pangan dikatakan berhasil bila kita bisa melakukan perubahan pola pikir dan mampu melakukan pergeseran pola makan dari bahan beras menjadi pangan non beras dengan bahan lokal sehingga kita tidak lagi tergantung pada komoditi beras. Ini adalah tugas para penyuluh pertanian.

Terakhir Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian berpesan bahwa tugas penyuluh pertanian cukup berat, maka para penyuluh hendaknya berpegang

pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya UU No. 16 tahun 2006, masa depan penyuluh pertanian sangat cerah, yang dapat dipergunakan sebagai pijakan dalam meniti karir kedepan. Momentum ini agar bisa dimanfaatkan para penyuluh dengan sebaik-baiknya;
2. Penyuluh PNS harus senantiasa meningkatkan kompetensinya antara lain melalui (a) jenjang pendidikan formal (D3, D4 dan S1); (b) melalui latihan teknis; dan (c) melalui diklat profesi. Saat ini Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian secara terintegrasi dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pusat Pendidikan Pertanian sedang mempersiapkan upaya peningkatan kompetensi para penyuluh pertanian;
3. Untuk memenuhi kebijakan satu desa satu penyuluh, prediksi kebutuhan tenaga penyuluh pada tahun 2010 – 2014 sebanyak 97.673 orang penyuluh. Saat ini telah tersedia 27.922 penyuluh PNS, Penyuluh THL 24.608 orang dan penyuluh honorer 1,265 orang. Jadi masih kekurangan sekitar 43.892 orang yang akan dipenuhi dari penyuluh swadaya. Untuk itu, penyuluh swadaya akan dibina terus melalui berbagai latihan sehingga mampu menjadi mitra para penyuluh PNS, THL dan Honorer.
4. Di era reformasi ini penyuluh pertanian telah memperlihatkan gregetnya seperti pada waktu jaman Bimas. Dengan adanya UU no. 16 tahun 2006 dan beratnya beban yang dipikul, penyuluh pertanian harus

terus bekerja keras, jangan manja, dan berkelanjutan mendampingi petani, sehingga petani meningkat pendapatan dan kesejahteraannya.

5. Sebagai konsekuensi UU No. 16 tahun 2006, penyuluh akan terus diperhatikan baik karir maupun kesejahteraannya. Tahun depan diharapkan dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan tunjangan BOP dan kegiatan penyuluhan.

Untuk tercapainya empat sukses pembangunan pertanian dan memenangkan pasar global / dan ACFTA, kita harus mempersiapkan wujudnya kelembagaan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi, dan sumberdaya manusia pelaku utama pembangunan pertanian menjadi petani yang maju dan modern. Sehubungan dengan telah banyak kegiatan yang dipersiapkan dan dilakukan Kepala Badan SDM Pertanian beserta jajarannya untuk kemajuan penyuluhan pertanian di Indonesia, kita ucapkan selamat bekerja semoga apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan selama ini segera membuahkan hasil yang cemerlang.

(Enisar Sangun dan Sri Puji Rahayu)





PENYULUH PERTANIAN DITUNTUT PROFESIONAL

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), mengamanatkan penyuluhan pertanian perlu dibenahi dari aspek kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan. Dari aspek ketenagaan disebutkan pada pasal 21 ayat 1, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan

kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan.

Dari beberapa teori disimpulkan, bahwa kompetensi meliputi unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian (BPSDMP, 2009). Pengertian kompetensi penyuluh

pertanian yaitu kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian.

Dalam situs BKN (Badan Kepegawaian Nasional), dijelaskan unsur-unsur kompetensi sangat berpengaruh pada peningkatan profesionalisme seseorang. Sedangkan profesionalisme adalah sebutan yang mengacu sikap mental dalam bentuk komitmen dari anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya, dengan mengembangkan potensi diri sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

Berkaitan dengan itu bagi penyuluh pertanian yang ingin mempunyai kompetensi dan profesionalisme harus selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional sebagai penyuluh pertanian. Lebih lanjut pada situs BKN, menyebutkan profesionalisme PNS harus memiliki ciri-ciri berikut: menguasai pengetahuan di bidangnya, selalu meningkatkan pengetahuan, menguasai bidang tugasnya, tepat dalam melaksanakan tugasnya, komitmen pada kualitas, memiliki kecakapan, kesanggupan dalam bekerja, dan selalu meningkatkan mutu kerja.

Untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembangkan kompetensi penyuluh

pertanian telah disusun SKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian. Jenjang Sertifikasi KKNi penyuluh pertanian dibedakan 3 (tiga) jenjang, yaitu (1) **Penyuluh Pertanian Fasilitator**, bagi semua Penyuluh Pertanian Terampil (Pemula, Pelaksana, Lanjutan, dan Penyelia); (2) **Penyuluh Pertanian Supervisor**, bagi Penyuluh Pertanian Pratama dan Penyuluh Pertanian Muda; dan (3) **Penyuluh Pertanian Advisor**, bagi Penyuluh Pertanian Madya dan Penyuluh pertanian Utama.

Dalam mengukur kompetensi penyuluh pertanian digunakan 3 (tiga) kelompok kompetensi penyuluh pertanian, yaitu umum/dasar, inti/fungsional, dan khusus/spesialis. Uraian berikut memberikan gambaran tentang unit-unit kompetensi dari masing-masing kelompok kompetensi penyuluh pertanian.

1. Kelompok Kompetensi umum/dasar penyuluh pertanian

Kelompok kompetensi umum/dasar penyuluh pertanian ini terdiri dari 5 unit kompetensi, yaitu: (1) Mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan; (2) Mengorganisasikan pekerjaan; (3) Melakukan komunikasi dialogis; (4) Membangun jejaring kerja, dan (5) Mengorganisasikan masyarakat. Kelima unit kompetensi ini harus dimiliki oleh semua jenjang sertifikasi KKNi penyuluh pertanian (Fasilitator, Supervisor, dan Advisor).

2. Kelompok Kompetensi inti/fungsional

Kelompok kompetensi inti/fungsional penyuluh pertanian meliputi 10 unit kompetensi dan setiap unit kompetensi berbeda jenjang sertifikasi KKNI, seperti berikut.

- (1) Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah, hanya untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator dan Supervisor.
- (2) Menyusun Program Penyuluhan Pertanian, untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
- (3) Menyusun materi penyuluhan pertanian, hanya untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator dan Supervisor.
- (4) Membuat dan menggunakan media penyuluhan pertanian (media cetak untuk Penyuluh Pertanian Terampil, elektronik untuk Penyuluh Pertanian Pertama dan Penyuluh Pertanian Muda), hanya untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator dan Supervisor.
- (5) Menerapkan metode penyuluhan pertanian, hanya untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator dan Supervisor.
- (6) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
- (7) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.
- (8) Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, untuk Penyuluh Pertanian Supervisor, dan

Advisor.

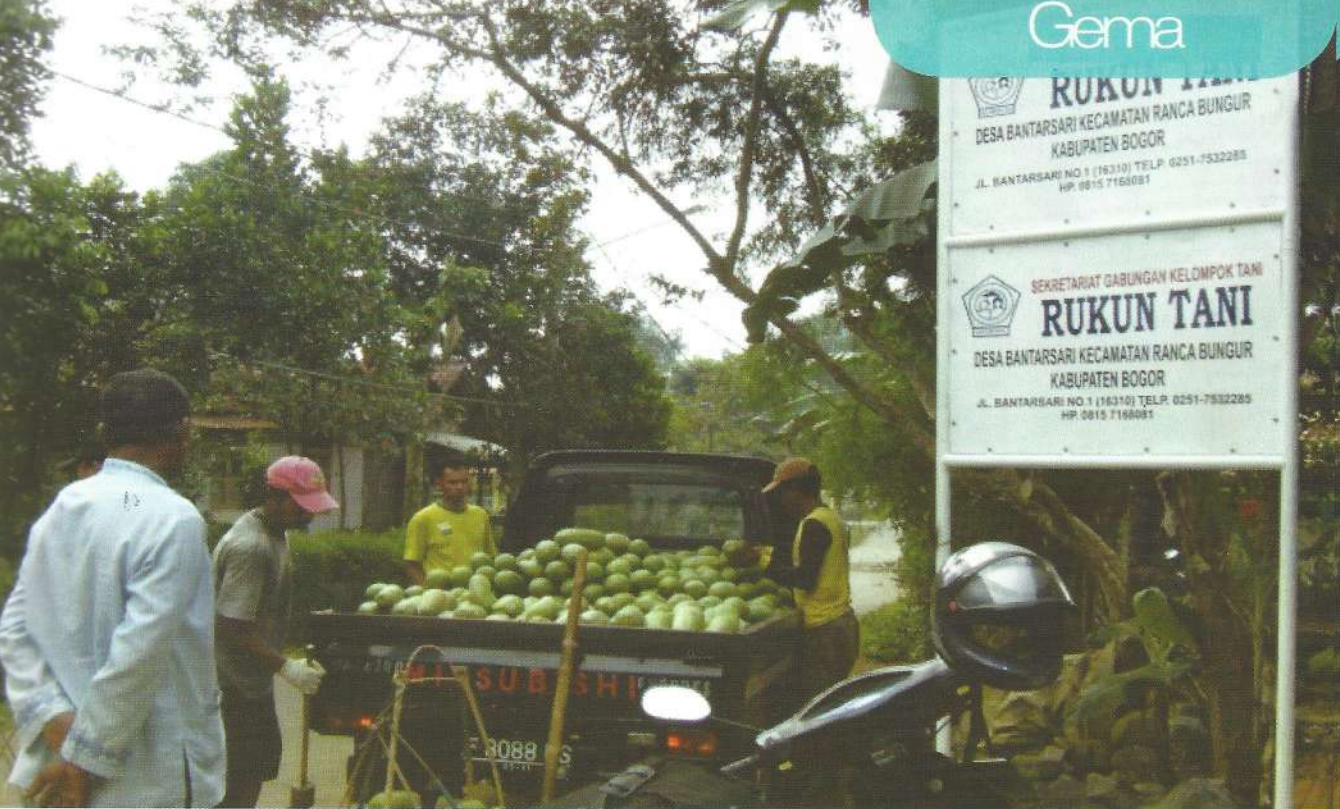
- (9) Mengembangkan metode dan sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian, hanya untuk Penyuluh Pertanian Advisor.
- (10) Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluh pertanian, untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.

3. Kelompok Kompetensi khusus/spesialis

Kelompok kompetensi khusus/spesialis penyuluh pertanian meliputi 5 sub sistem, yaitu: (1) Sub sistem agroinput; (2) Subsistem agroproduksi; (3) Sub sistem agroprocessing; (4) Sub sistem agroniaga, dan (5) Sub sistem jasa penunjang. Masing-masing sub sistem terdiri dari unit-unit kompetensi yang harus dipilih penyuluh pertanian menurut jenjang sertifikasi KKNI seperti berikut:

- (1) Bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator hanya memilih "satu unit kompetensi" yang disukai dari "salah satu sub sistem".
- (2) Bagi Penyuluh Pertanian Supervisor hanya memilih "satu unit kompetensi" yang disukai dari "dua sub sistem".
- (3) Bagi Penyuluh Pertanian Advisor memilih "satu unit kompetensi" yang disukai dari "empat sub sistem".

Adapun sub sistem dan unit kompetensi



Memasarkan Pepaya Californian Produk Anggota Gapoktan

yang dipilih sebagai berikut:

(1) Sub sistem agroinput, meliputi 5 kegiatan, yaitu:

- Mengelola kegiatan produksi benih tanaman.
- Mengelola kegiatan produksi pupuk, pestisida tanaman.
- Mengelola kegiatan produksi bibit ternak.
- Mengelola kegiatan produksi pakan dan obat ternak.
- Mengelola kegiatan produksi alat dan mesin pertanian.

(2) Sub sistem agroproduksi, meliputi 6 kegiatan, yaitu:

- Mengelola kegiatan produksi tanaman pangan.

- Mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura.
- Mengelola kegiatan produksi tanaman perkebunan.
- Mengelola kegiatan produksi ternak besar.
- Mengelola kegiatan produksi ternak kecil.
- Mengelola kegiatan produksi ternak unggas.

(3) Sub sistem agroprocessing, meliputi 4 kegiatan, yaitu:

- Mengelola kegiatan pe-ngolahan hasil tanaman pangan.
- Mengelola kegiatan pe-ngolahan hasil tanaman hortikultura.
- Mengelola kegiatan pe-ngolahan hasil tanaman perkebunan.



Koperasi Rukun Tani hasil pendampingan partisipatif

- Mengelola kegiatan pe-ngolahan hasil ternak.
- (4) Sub sistem agroniaga, meliputi 2 kegiatan, yaitu:
- Mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar domestik.
 - Mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar Luar Negeri.
- (5) Sub sistem jasa penunjang, meliputi 3 kegiatan, yaitu:
- Mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan.
 - Mengelola kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi.
 - Melakukan perencanaan usaha agribisnis

Menurut beberapa penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor, unit-unit kompetensi yang telah diuraikan di atas

semuanya telah dilakukan, meskipun ada beberapa penyuluh pertanian hanya melakukan sebagian saja. Penyuluh pertanian dalam melakukan unit-unit kompetensi tersebut masih menemukan adanya masalah, antara lain: kurang informasi teknologi, kurangnya sarana penyuluhan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi baru, belum optimalnya kerjasama antara penyuluh dan peneliti, dan sulitnya petani merubah perilakunya dalam mengelola usaha tani.

Meskipun demikian, apabila dituntut menjadi penyuluh pertanian profesional yang memiliki kompetensi sesuai standar tersebut, mereka akan melakukan upaya-upaya, antara lain: mencari teknologi, melakukan demplot swadaya, banyak belajar (dari: swasta/magang, majalah, balai penelitian sekitar Bogor), menggali pengetahuan serta informasi dari media (Majalah Pertanian, Trubus, Sinar Tani) maupun perpustakaan, belajar sesuai kemampuan untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman, mempersiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian dengan cara mencari informasi serta melakukan uji coba/pengujian, menyesuaikan kemampuan bidangnya, meningkatkan kinerja dalam membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani (mengisi siaran perdesaan RRI Bogor dan Radio Pertanian Ciawi (RPC), dan mengikuti seminar serta pelatihan sebagai bekal untuk

membantu mengatasi masalah petani. Disamping itu, para penyuluh pertanian mengharapkan agar pemerintah dapat juga memfasilitasi penyuluh pertanian dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian sesuai kebutuhan petani saat ini. Misalnya memberikan kesempatan kepada para penyuluh pertanian untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal.

Harapan tersebut memang sudah tercantum dalam UU No. 16 – 2006 pada pasal 21 ayat 1, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor-Jawa Barat sejak tahun 2009. Menurut informasi dari ibu Ir. Farida Khuriyati, MM - Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor, bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan Profesi Penyuluh Pertanian telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memotivasi para Penyuluh Pertanian di kabupaten, kecamatan, dan desa untuk lebih aktif menyesuaikan perkembangan teknologi pertanian saat ini, sehingga lebih maju dari petaninya.
2. Pada tahun 2009 BP4K Kabupaten Bogor dengan dana APBD telah berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

penyuluh pertanian sebagai berikut: (1) Mengikuti sertakan 30 orang Penyuluh kursus internet di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor; (2) Mengirim Penyuluh Pertanian untuk ikut pelatihan-pelatihan agribisnis di Balai Besar Pelatihan Pertanian; (3) Setiap 2 (dua) minggu sekali mengirim Penyuluh Pertanian ikut seminar di Puslitbangtan Bogor.

3. Pada tahun 2010 ini, telah disediakan dana APBD untuk Pelatihan Alih Jenjang Terampil ke Jenjang Ahli sejumlah 50 orang Penyuluh Pertanian. Penyelenggaraannya akan bekerjasama dengan STTP Cibalagung-Bogor.

Selain itu Sekretaris BP4K menginformasikan, bahwa profesi Penyuluh Pertanian bisa dilaksanakan, terutama pada Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi, yaitu pilihan dari unsur kompetensi Sistem Agribisnis. Hal ini dibuktikan oleh Penyuluh Pertanian Niti Kartini, SP yang wilayah kerjanya di Desa Bantar Sari Kecamatan Ranca Bungur Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan berikut:

1. **Sub sistem agroproduksi, untuk unit kompetensi “Mengelola kegiatan produksi tanaman pangan” dan “Mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura”**

Kelompoktani-kelompoktani dibimbing dalam mengembangkan tanaman yang cocok di desa mereka, antara lain: jambu biji, padi sawah, sayuran dataran rendah (terong, kangkung, dan bayam), dan pepaya Califoran (dengan membeli bibit dari IPB). Ternyata pepaya Califoran sangat laku dijual dan selalu mendapatkan keuntungan yang lumayan. Dari hasil tanaman pepaya ini setiap anggota dapat menyisihkan uang untuk Kas kelompok. Kelompoktani Rukun Tani paling maju, hingga kini memiliki aset-aset kelompok seperti: tanah seluas 260 m² dan luas bangunan 80 m², mesin pompa air, komputer, dan pelalatan kantor, dan saat ini dipakai Koperasi Rukun Tani.

2. Sub sistem agroniaga, untuk unit kompetensi “Mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar domestik”

Ibu Niti membimbing kelompoktani tidak hanya sampai memproduksi, tetapi juga mencari pasarnya. Ada peluang pemasaran pepaya Califoran di supermarket dalam jumlah yang banyak, kemudian ibu Niti memfasilitasi kelima kelompok bergabung dalam Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) dengan tujuan untuk memenuhi permintaan

pepaya dalam jumlah yang banyak di supermarket. Pemasaran secara bersama ini dapat memenuhi permintaan supermarket bertahun-tahun dan selalu mendapat keuntungan yang lumayan.

Gapoktan tersebut tumbuh pada tanggal 30 Desember 2006 dengan nama Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) Rukun Tani. Akhirnya Gapoktan memiliki kegiatan-kegiatan: simpan-pinjam, pengadaan saprodi, penampungan dan pemasaran hasil produksi pertanian dari anggota, dan jual beli gabah. Saat ini jumlah kelompoktani sebagai anggota bertambah dari lima menjadi delapan kelompoktani.

3. Subsistem jasa penunjang, untuk unit kompetensi “Mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan”

Ibu Niti membimbing setiap kelompoktani dan Gapoktan memiliki kegiatan simpan-pinjam dengan tujuan mampu melayani modal untuk pengembangan agribisnis bagi anggotanya. Bahkan pada tanggal 11 Maret 2008 Gapoktan Rukun Tani berbadan hukum dengan nama “Koperasi Rukun Tani”. Manfaat yang diperoleh setelah berbadan hukum ini antara lain: (1) Sebagai distributor saprotan sehingga dapat memperoleh saprotan dalam jumlah yang banyak dan harga lebih murah. (2) Dipercaya

lembaga keuangan formal seperti Bukopin dan BRI untuk meminjam modal berupa uang sampai 90 juta rupiah. Koperasi Rukun Tani ini selain ada kegiatan simpan-pinjam juga memiliki kios saprodi, seperti: benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain.

Terlihat dari tumbuh dan berkembangnya kelompok tani, Gapoktan dan Koperasi Rukun Tani tersebut, ibu Niti mampu berperan sebagai penyuluh pertanian yang profesional sebagaimana tuntutan situs BKN, antara lain: menguasai pengetahuan di bidang penyuluhan pertanian, selalu meningkatkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh petani, menguasai bidang tugas sebagai penyuluh pertanian, tepat melaksanakan tugas membantu petani mengembangkan komoditi, dan memiliki kesanggupan dalam bekerja sebagai penyuluh pertanian. Mudah-mudahan penyuluh pertanian lainnya juga mau dan mampu melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana ibu Niti lakukan, sehingga petani dapat merubah perilakunya dan mampu menghasilkan produksi pangan yang dapat mendukung keberhasilan program ketahanan kelompok tani, Gapoktan dan Koperasi Rukun Tani tersebut, ibu Niti mampu berperan sebagai penyuluh pertanian yang profesional sebagaimana tuntutan situs BKN, antara lain: menguasai pengetahuan di bidang penyuluhan pertanian, selalu

meningkatkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh petani, menguasai bidang tugas sebagai penyuluh pertanian, tepat melaksanakan tugas membantu petani mengembangkan komoditi, dan memiliki kesanggupan dalam bekerja sebagai penyuluh pertanian. Mudah-mudahan penyuluh pertanian lainnya juga mau dan mampu melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana ibu Niti lakukan, sehingga petani dapat merubah perilakunya dan mampu menghasilkan produksi pangan yang dapat mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Namun demikian, sesuai ketentuan resmi SKKNI Bidang Penyuluhan yang akan diberlakukan, ibu Niti belum berhak menyandang predikat sebagai penyuluh fasilitator, supervisor, atau advisor, karena belum mengikuti Uji Kompetensi yang hanya dapat dilaksanakan oleh Asesor Kompetensi dari suatu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kita berharap LSP Penyuluh Pertanian dapat segera dibentuk dan berperan. Bagi penyuluh pertanian yang lulus dalam uji kompetensi akan diberi hak menyandang nama penyuluh pertanian profesional dan berhak pula menerima tunjangan profesi. Semoga.

(Susilo Astuti Handayani)



Kantor BAKORLUH Propinsi Jawa Tengah



Prof. Dr. Soemardjo

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN PEMERINTAH MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN

Diperlukan payung hukum berupa Perpres/ Kepres untuk membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang mampu mendukung dan mewujudkan penyuluh pertanian profesional

Berlakunya UU no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K), salah satu konsekwensinya diperlukan pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah ditingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam UU no 16 tahun

2006 dijelaskan paling lama 2 tahun setelah berlakunya UU tersebut kelembagaan penyuluhan pertanian sudah harus terbentuk. Namun hingga kini belum semua pemerintah daerah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian. Bahkan di pusat pun lembaga penyuluhan pertanian pemerintah yang setingkat eselon satu baru terbentuk.

Data yang dihimpun Bidang Kelembagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian sampai bulan April 2010, baru 26 dari 33 Pemprov yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian, dan baru ada 286 dari 512 Pemkab/Pemkot yang membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang namanya sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.16 di tingkat provinsi ada 14 kelembagaan dan 12 lembaga lainnya belum sesuai karena kelembagaannya masih campuran dengan ketahanan pangan. Sedangkan di Kabupaten/Kota baru 130 yang namanya sesuai UU No 16 Th 2006, selebihnya bergabung dengan ketahanan pangan. Kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut seharusnya bernama Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, ditingkat provinsi, sedangkan di kabupaten/kota bernama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Dasar hukum pembentukan kelembagaan juga bervariasi. Ada yang menggunakan Peraturan Daerah (disahkan oleh DPRD), dengan

Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota, dan ada pula yang masih dalam tahap proses pengajuan draf usulan pembentukan kelembagaan. Sepintas, adanya keberagaman tersebut sebagai hal yang positif. Namun berdasarkan pengalaman masa lalu dan ditinjau dari ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, koordinasi dan pelaksanaan tugas, serta alokasi anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka keberagaman bentuk kelembagaan penyuluhan pemerintah di daerah berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan kendala. Belum lagi apabila terdapat keberagaman sumberdaya manusianya, sudah tentu akan menambah beban yang tidak kecil terhadap kinerja penyuluhan pertanian.

Payung Hukum, Konsistensi, dan Implikasi

Menanggapi fakta di atas, Prof. Dr. Sumardjo yang berpengalaman dalam bidang penyuluhan pertanian berpendapat bahwa fenomena ini terjadi karena belum adanya payung hukum (misalnya berupa Perpres/Kepres atau semacamnya) terkait dengan implementasi atau operasionalisasi penyuluhan pertanian di tingkat Pemerintah. Adanya payung hukum berupa peraturan yang jelas dapat mengikat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Undang-Undang UU No 16 Tahun 2006 tentang SP3K secara konsisten. Payung hukum tersebut perlu terus



Kegiatan pembelajaran di kelompok tani

Sumber: <http://ditjenbun.deptan.go.id/bbp2tpmed/in>

diupayakan pemerintah terhadap UU No 16 yang mengamanatkan 2 tahun setelah diundangkannya, yaitu paling lambat tahun 2008 semestinya sudah ada peraturan turunannya. Sebagai Guru Besar dalam Bidang Penyuluhan Pertanian dari IPB Bogor dan anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN), Sumardjo heran mengapa payung hukum tersebut baru terbit tahun 2010. Pada hal konsep untuk peraturan itu sudah disiapkan oleh pihak terkait yang didukung oleh KPPN sejak tahun 2007 dan disempurnakan tahun 2008.

Bahkan lanjut beliau, Presiden dalam Jambore Penyuluh Pertanian di Cibodas menjanjikan peraturan dimaksud sudah harus terbit sebelum Desember 2008.

Pak Mardjo berpendapat jika hingga kini sudah ada sebagian besar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai UU No 16, itu karena kesadaran pimpinan daerah atas pentingnya penyuluhan pertanian, serta iklim yang dikondisikan oleh kementerian terkait. Sedangkan sebagian yang lain nampaknya kurang menyadari

pentingnya penyuluhan pertanian sehingga kurang memiliki komitmen untuk mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian. Hal ini sejalan dengan orientasi pembangunan daerah yang cenderung lebih memprioritaskan ke upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara instan. Orientasi pembangunan seperti ini sangat berbeda dengan orientasi penyuluhan yaitu agar terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan kesejahteraan yang meningkat, masyarakat mempunyai daya beli yang tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan PAD secara berkelanjutan pula.

Pendapat Pak Sumardjo tak perlu diragukan kebenarannya. Pelaksanaan otonomi daerah diawal tahun 2000 seharusnya memberi pengalaman bagi bangsa Indonesia untuk pandai memilah, memilih, dan menetapkan prioritas kegiatan yang bukan hanya berorientasi PAD dan jangka pendek, tetapi harus pandai pula memprioritaskan kegiatan pendidikan yang berorientasi jangka panjang. Oleh sebab itu kegiatan penyuluhan pertanian sebagai pendidikan memberdayakan masyarakat tidaklah tepat bila disejajarkan dengan kegiatan lain yang berorientasi PAD dan instan. Namun demikian apapun jenis kegiatan dalam membangun bangsa ini memerlukan kelembagaan yang digerakkan oleh sumberdaya manusianya untuk mengatur, memfasilitasi dan mengawal melaksanakan tupoksinya masing-masing.

Ketiadaan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah di daerah yang sesuai dengan UU NO 16/SP3K, tentu akan berimplikasi terhadap kinerja penyelenggaraan penyuluhan, yaitu pembangunan pertanian menjadi stagnan dan sulit mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut. Komitmen penganggaran kegiatan penyuluhan pertanian yang menjadi pilar pembangunan pertanian menjadi lemah dan inovasi di bidang pertanian dalam arti luas cenderung berpotensi sangat melemah. Aktivitas penyuluhan menjadi lesu karena kurang didukung dana dan sarana yang memadai. Pengembangan penyuluhan dan motivasi penyuluh juga melemah dan ter subordinasi oleh aktivitas keproyekan, sehingga upaya pemberdayaan petani tidak terjadi. Akibatnya program pembangunan pertanian berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak berdampak pada kesejahteraan serta kemandirian petani.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan aktivitas para petani yang tergabung dalam Kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok tani. Ketiadaan lembaga penyuluhan pertanian yang bertanggungjawab dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan para penyuluh pertanian di daerah berdampak pada menurunnya kegiatan penyuluhan di lapangan. Kondisi ini berimplikasi pada kelembagaan petani menjadi kurang berkembang dan berpotensi ter subordinasi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain di luar petani.



Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Panguragan - Cirebon

Oleh sebab itu saran Pak Sumardjo ke depan Perpres atau yang setingkat dengan itu terkait dengan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan memang sangat diperlukan. Selanjutnya *law enforcement* dan sosialisasi peraturan tersebut kepada pimpinan daerah (Provinsi dan Kabupaten) perlu dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan jajarannya. Sosialisasi perlu dilakukan juga secara intensif dan lebih melalui media massa maupun secara langsung kepada berbagai pihak di jajaran Kementerian Dalam Negeri. Selain itu perlu diterapkan sistem insentif/disinsentif melalui dana

dekonsentrasi pembangunan pertanian terkait dengan keberadaan kelembagaan di daerah yang sejalan dengan amanat dalam UU SP3K.

Era globalisasi dan tuntutan profesionalisme penyuluh

Arus globalisasi telah melanda hampir semua wilayah di dunia. Era ini identik dengan era perdagangan bebas antar negara yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Berbagai jenis produk, komoditi, dan jasa bebas diperjualbelikan mengikuti aturan main yang ditetapkan. Petani sebagai pelaku utama dan pengusaha bidang pertanian di Indonesia seyogyanya menjadi bagian

dari globalisasi dan perlu berupaya keluar sebagai pemenang persaingan. Pemerintah dan penyuluh pertanian bertanggungjawab memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu menjadi pemain handal di era globalisasi tersebut. Jika tidak maka mereka akan terlindas, semakin terpuruk dan menjadi kelompok yang inferior.

Menanggapi seputar fenomena tersebut Pak Sumardjo berpendapat, untuk menghadapi era globalisasi perdagangan bebas dibutuhkan upaya peningkatan daya saing petani dan produk petani yang semakin tinggi. Dengan demikian selain kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, dibutuhkan pula penyuluh pertanian yang profesional sebagai pendamping dan pemberdaya masyarakat pertanian. Penyuluh profesional antara lain dihasilkan oleh proses yang mengarah pada berbagai upaya pengembangan kompetensi, khususnya melalui pelatihan dan upaya terprogram lainnya yang berpedoman pada suatu standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk profesi penyuluh. Kompetensi profesi penyuluh yang dimaksud adalah yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) penyuluh yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SKKNI ini perlu dikembangkan secara dinamis sejalan dengan tuntutan era globalisasi. Di sini diperlukan peran nyata asosiasi penyuluh pertanian seperti misalnya PERHIPTANI untuk menjadi garda terdepan menjaga profesionalisme penyuluh dengan mengontrol kiprah

penyuluh dan mengembangkan SKKNI sesuai tuntutan perubahan yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan misalnya meninjau kembali, memperbaharui, dan menyempurnakan SKKNI secara periodik setiap tiga tahun.

Apa yang dikemukakan pak Sumardjo telah menjadi kenyataan. Saat ini Kementerian Pertanian telah memiliki SKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian sebagai hasil kerja keras dan komitmen Badan Pengembangan SDM Pertanian bersama stakeholder yang lain. Ada tiga level kompetensi penyuluh dalam SKKNI tersebut yaitu sebagai fasilitator, supervisor, dan advisor. Setelah mengikuti uji unjuk kerja dan dinyatakan lulus oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi oleh BNSP, penyuluh dinyatakan kompeten dan layak menyandang jabatan profesi tersebut. Menyikapi perubahan yang selalu terjadi, pada tahun 2010 Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian PERHIPTANI tengah mempersiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian (LSP2P) yang terakreditasi di BNSP.

Kelembagaan penyuluhan yang kompeten dan penyuluh pertanian profesional

Apakah penyuluh pertanian yang profesional akan terwujud apabila didukung oleh kiprah dari lembaga penyuluhan pertanian pemerintah di tingkat pusat dan daerah? Menanggapi kesangsian akan kemampuan lembaga



penyuluhan tersebut, pak Mardjo berpendapat positif. Menurut beliau kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah (di tingkat pusat dan daerah) harus mampu mendukung dan mewujudkan penyuluh pertanian profesional. Di tingkat pusat Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang berfungsi menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan pertanian nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluh (Bab V pasal 9 UU N0 16 SP3K). BP3K harus mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya, misalnya menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, jaringan informasi, koordinasi (vertikal dan horizontal), evaluasi

serta kerjasama (nasional, regional dan internasional), dan yang utama adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluhan. Adanya kesenjangan kelembagaan ini telah menyebabkan koordinasi dan pengembangan kelembagaan penyuluhan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) masih belum memadai. Akibatnya kelembagaan penyuluhan yang ada di daerah masih sangat bervariasi dan kurang mampu berkiprah untuk mewujudkan penyuluh pertanian profesional. Pendapat ahli dari IPB tersebut pada intinya adalah bahwa penyuluh pertanian profesional dengan kompetensi tertentu dan bersertifikat hanya akan dapat diwujudkan bila ada lembaga penyuluhan pemerintah (di pusat dan daerah) yang memiliki

berbagai kemampuan/kompetensi dan secara konsisten melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar.

ASEAN-China FTA, Agribisnis Petani, dan Program Ketahanan Pangan.

Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Negara ASEAN dan China (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) tahun 2010 dapat menimbulkan masalah dan pengaruh negatif terhadap usaha agribisnis petani Indonesia dan ketahanan pangan kita. Persaingan produk dan usaha tidak hanya antar pelaku di dalam negeri, tetapi dengan petani dan pelaku usaha asal China dan Negara-negara ASEAN.

Menanggapi era perdagangan bebas yang penuh dengan tantangan itu Profesor Sumardjo menjelaskan bahwa pengaruh negatif sangat mungkin terjadi dengan adanya perdagangan bebas tersebut. Sebagaimana diketahui sebagian besar atau bahkan hampir seluruh petani kita masih kurang siap menghadapi kompetisi dengan produk-produk dari luar, khususnya dari China dan Thailand (yang dikenal serba Bangkok). Ketidaksiapan ini misalnya persaingan dari faktor harga komoditi pertanian. Dalam hal mutu khususnya rasa, beberapa produk pertanian kita punya keunggulan, seperti misalnya beras, pepaya, jeruk, duku, durian, salak, manggis, semangka, melon, buah naga dan sebagainya, namun dalam hal harga tampaknya masih kalah bersaing. Berbagai pihak yang berada dibagian hilir terlalu banyak mengambil untung.

Begitu juga permodalan, teknik produksi, pengolahan pasca panen dan pemasaran dalam sistem agribisnis masih lemah.

Perdagangan bebas antara Indonesia dengan Negara ASEAN dan China dapat mempengaruhi ketahanan pangan kita yang merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan membajirnya produk pertanian asal luar negeri yang harganya relatif lebih murah, pada akhirnya produk dalam negeri akan kehilangan pembeli setianya. Jika fenomena ini terjadi dalam waktu lama ditambah kondisi daya beli masyarakat yang semakin lemah, maka ketahanan pangan kita akan terancam.

Kondisi di atas tidak terlepas dari masih lemahnya kelembagaan penyuluhan di Indonesia dan khususnya profesionalitas penyuluh dalam mengembangkan kelembagaan petani. Akibatnya kelembagaan petani kurang efektif mengembangkan posisi tawar, daya saing dan menggalang jaringan kerjasama sinergis dalam sistem kemitraan agribisnis dengan pihak terkait. Kondisi yang demikian pada gilirannya akan mengancam program ketahanan pangan kita. Oleh karena itu Penyuluh Pertanian perlu membekali diri secara lebih baik lagi, bukan hanya dalam inovasi teknologi, tetapi lebih khusus lagi dalam kompetensi memfasilitasi pengembangan permodalan usahatani, pengorganisasian petani dalam

mengembangkan posisi tawar petani, pemasaran hasil dan pengembangan jaringan kemitraan agribisnis.

Pentingnya keterkaitan antar lembaga dalam mendukung pembangunan pertanian

Adanya kelembagaan dalam masyarakat memang sesuatu yang penting. Namun Pak Sumardjo menambahkan untuk mendukung kesuksesan berbagai program/kegiatan pembangunan, perlu ada keterkaitan yang sinergis antar berbagai lembaga. Keterkaitan itu dengan sadar perlu dirancang secara sinergis antara kelembagaan pemerintah yang bergerak di sektor pertanian, kelembagaan pengembangan IPTEK (Litbang dan Perguruan Tinggi), kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan agribisnis swasta. Keterkaitan tersebut perlu menempatkan penyuluh sebagai pengawal terdepan dalam terwujudnya keterpaduan sistem keterkaitan antar kelembagaan tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam pengembangan keterkaitan antar lembaga tersebut, *cyber extension* merupakan salah satu solusi yang seyogyanya dikembangkan kedepan. Dengan *cyber extension* berbasis internet, maka akses terhadap informasi oleh masyarakat akan lebih mudah dan cepat. Namun untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi terkini diperlukan komitmen tinggi dari sumber-sumber informasi untuk selalu melakukan *up dating*. Sebagai

contoh, keberhasilan masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan antara lain ditentukan oleh seberapa besar ketersediaan informasi yang dapat diakses/diterima masyarakat dan kemudian mereka mampu melaksanakan isi pesannya.

Penelitian terkait *cyber extension* yang cukup mendalam telah dilakukan oleh Prof. Sumardjo yang akhirnya dapat merumuskan konsep *cyber extension* tersebut, dan dalam waktu dekat akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Selanjutnya tinggal seberapa jauh komitmen pemerintah untuk mengembangkan konsep *cyber extension* ini. Penyuluh dan tokoh petani perlu dilatih untuk mampu mengakses informasi yang termuat dalam *cyber extension* tersebut. Demikian pula berbagai lembaga terkait perlu menyediakan data dan informasi terkini sesuai tupoksinya. Adanya *cyber extension* tersebut berpotensi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan kesenjangan dan stagnasi inovasi dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian dinamika pembangunan pertanian, khususnya produktivitas petani dan kebijakan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dapat segera diwujudkan dan berlangsung secara berkelanjutan.

(Enisar Sangun)



LANGKAH PENTING Mendukung KEBERHASILAN PROGRAM PSDS 2014

Penyuluh mempunyai peran strategis dalam mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS), maka penyuluh pertanian harus menguasai pengetahuan tentang kondisi riil peternakan di Indonesia dan kemampuan menerjemahkan program yang ingin dicapai pemerintah kepada peternak sehingga peternak tahu – memahami - dan melaksanakan program tersebut.

PSDS 2014 sebagai upaya penyediaan daging bagi masyarakat

Pangan nabati maupun hewani, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus mampu dipenuhi karena merupakan hak azasi manusia sehingga harus senantiasa tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No.27 tahun 1996

tentang pangan. Ketersediaan pangan hewani yang bersumber dari produk peternakan khususnya daging sampai saat ini masih belum tercukupi, kondisi ini ditunjukkan dengan angka asupan protein hewani asal ternak perkapita/hari di Indonesia masih rendah yakni 5,68 gram/kapita/hari. Rendahnya konsumsi pangan asal ternak ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas pangan asal ternak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan, penyediaan daging sapi selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, mengalami peningkatan. Penyediaan ini berasal dari produksi lokal, ex-bakalan, dan impor daging. Sampai saat ini, penyediaan daging sapi berasal dari produksi ternak sapi lokal yang mencapai 65%-70%, sisanya berasal dari ternak bakalan impor dan daging impor.

Tabel 1. Penyediaan Daging Sapi lokal, Ex-Bakalan dan Impor Tahun 2005-2009

| Penyediaan | Tahun (ribu ton) | | | | |
|------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Daging ex sapi bakalan | 55,1 | 57,1 | 60,8 | 80,3 | 72,8 |
| Daging sapi lokal | 217,4 | 260,0 | 210,7 | 233,6 | 250,8 |
| Impor daging | 56,2 | 62,4 | 64,0 | 70,1 | 70,0 |

Sumber : Blue print PSDS 2014, Ditjen Peternakan, 2010



Ir. Bambang Purwohadi, M.Si, MT

Dilihat dari laju pertumbuhan, penyediaan daging dari produksi lokal lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penyediaan daging melalui impor. Penyediaan daging sapi produksi lokal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 penyediaan daging dari dalam negeri menurun kemudian meningkat lagi. Hal ini tidak terjadi pada penyediaan daging melalui impor, yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya, permintaan daging sapi terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan perkapita/tahun. Data yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Peternakan menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat peningkatan impor sapi setiap tahun, karena ketidak mampuan dalam penyediaan produksi daging yang berasal dari ternak lokal dalam memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut:



Tabel 2. Permintaan Daging Sapi Tahun 2005-2009

| Permintaan | Tahun (ribu ton) | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Produksi daging lokal | 217,38 | 259,54 | 210,77 | 233,63 | 250,81 |
| Impor | 111,29 | 119,17 | 124,80 | 150,42 | 142,80 |
| - Bakalan | 55,09 | 57,14 | 60,80 | 80,38 | 72,80 |
| - Daging | 56,20 | 62,04 | 64,00 | 70,04 | 70,00 |
| Total | 328,67 | 378,71 | 335,57 | 384,05 | 393,61 |

Sumber : Blue print PSDS 2014, Ditjen Peternakan, 2010

Program PSDS 2014, merupakan upaya khusus pengembangan peternakan sapi lokal maupun sapi persilangan dengan memperhatikan aspek perbibitan, pakan, budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta aspek penunjang seperti permodalan,

kelembagaan dan pemberdayaan peternak. Program PSDS 2014, tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional tapi juga untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak yang secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Untuk mencapai keberhasilan Program PSDS 2014, banyak permasalahan yang harus dihadapi diantaranya : 1) kematian pedet yang masih tinggi; 2) tingginya pemotongan sapi betina produktif (150 – 200 ribu ekor/tahun); 3) langkanya pejantan didaerah sumber bibit pada pola pemeliharaan ekstensif; 4) belum maksimalnya koordinasi antar instansi di

pusat maupun di daerah; dan 5) belum akuratnya data-data yang tersedia.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, untuk keberhasilan PSDS 2014, Direktorat Jenderal Peternakan menetapkan lima kegiatan prioritas yaitu : 1) penyediaan bakalan/daging sapi lokal; 2) peningkatan produktivitas dan reproduksi ternak sapi lokal; 3) pencegahan pemotongan sapi betina produktif; 4) penyediaan bibit sapi dan 5) pengendalian distribusi dan pemasaran ternak/daging sapi.

FPSI mendukung PSDS 2014

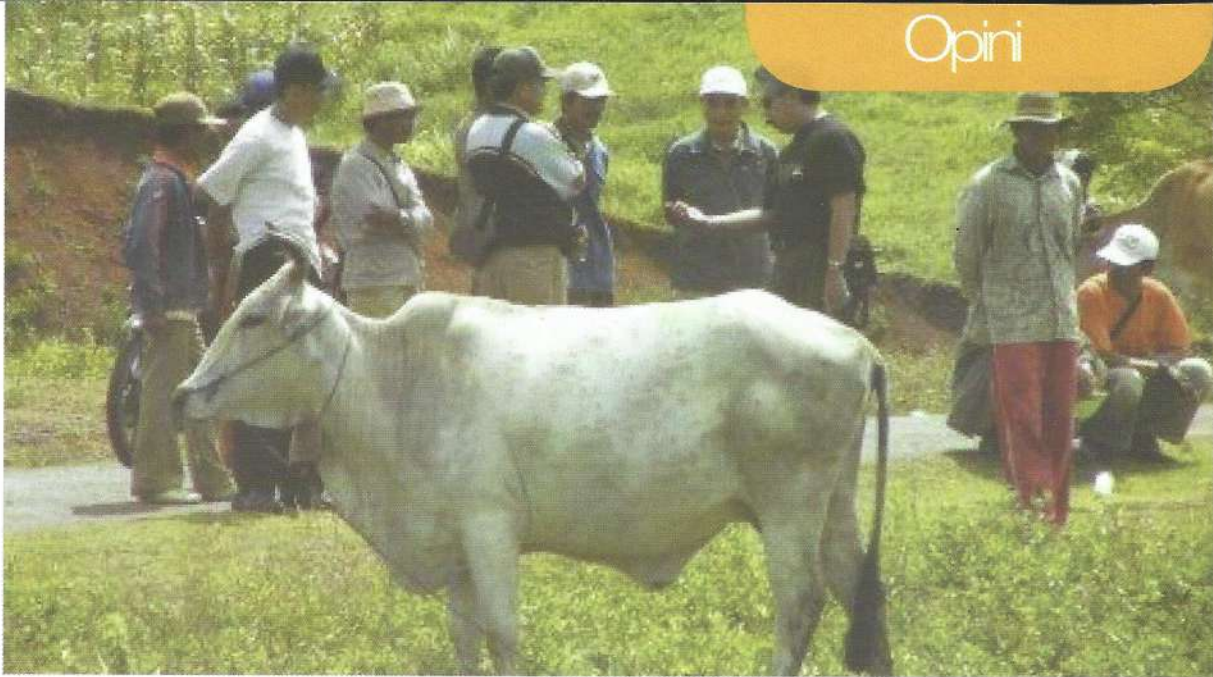
Mayoritas peternak di Indonesia dan Forum Peternak Sapi Indonesia (FPSI) yang diketuai Ir. Bambang Purwohadi, M.Si, MT, sangat mendukung program PSDS 2014. FPSI merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu para peternak sapi potong maupun sapi perah. Pria kelahiran Banjarnegara 59 tahun lalu ini mengatakan bahwa Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2014 yang telah dicanangkan pemerintah tersebut akan tercapai bila "jumlah pedet yang lahir lebih banyak dari jumlah sapi yang dipotong". Sedangkan yang terjadi selama ini populasi sapi makin menurun. Keadaan ini disebabkan secara ekonomis usaha pembibitan (*breeding*) sapi memerlukan modal yang cukup besar namun keuntungannya kecil, sehingga kurang diminati peternak. Oleh sebab

itu banyak peternak dan pengusaha lebih memilih usaha penggemukan sapi potong dibanding usaha pembibitan.

Usaha Pembibitan sapi perlu dikembangkan

Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, seyogyanya pemerintah segera melakukan pendataan tentang kebutuhan daging sapi dan penyediaan daging sapi dalam negeri. Selain pendataan, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan yang kondusif bagi peternak seperti pemberian insentif kepada peternak yang melakukan usaha *breeding* berupa bantuan indukan sapi potong, tidak melakukan impor dalam memenuhi kebutuhan daging dan sapi bakalan, memberikan bantuan modal (kredit tanpa agunan) serta penyediaan pakan murah.

Sebagai Ketua Forum, ia yakin bahwa peternakan berpeluang sebagai sumber devisa negara yang cukup besar, karena peternakan menyimpan 7 (tujuh) "tambang emas" yaitu : 1) emas merah (daging sapi); 2) emas putih (susu); 3) emas batangan (tulang); 4) emas hijau (telepong/kotoran sapi); 5) emas kuning (kencing); 6) emas coklat (kulit); dan 7) emas biru (gas). Bila ketujuh tambang emas tersebut dikelola dengan baik, niscaya kedepan ternak sapi akan menjadi sumber kekuatan kebangkitan peternakan sekaligus mampu menjadi sumber kemakmuran masyarakat Indonesia khususnya para peternak. Dengan demikian, keberhasilan



Diskusi penyuluh dengan kelompok peternak

Sumber : <http://www.disnak.jabar prov.go.id/ima>

peternakan, selain mendukung Program PSDS sekaligus juga mendukung program ketahanan pangan melalui peningkatan pendapatan dari 7 tambang emas hasil peternakan.

Sebagai pelaku utama/peternak, alumni teknik mesin Universitas Indonesia tahun 1984 ini mempunyai pemikiran, untuk keberhasilan PSDS 2014 pemerintah perlu melakukan langkah-langkah berikut. **Langkah pertama** adalah melakukan pendataan ternak di Indonesia, seperti yang sudah *launching* di situs Ditjen Peternakan tanggal 17 Februari 2010 lalu. Langkah ini akan menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan lanjutan pemerintah. Dengan data base ini, bisa memetakan jumlah dan sebaran populasi ternak, serta kemampuan pengadaan daging segar dipadukan

dengan data permintaan daging daerah, maka akan terlihat gambaran kebutuhan dan ketersediaan daging sapi pada suatu daerah. Jika data base ini disertai dengan manajemen yang baik, didukung infrastruktur distribusi yang memadai, diyakini kebutuhan daging di Indonesia akan tercukupi.

Kedua, sebagian besar peternak kita masih tradisional, maka tenaga teknis lapangan seperti dokter hewan, mantri hewan serta penyuluh pertanian mempunyai peran yang sangat strategis. Merekalah ujung tombak yang diharapkan dapat merubah *mind set* peternak agar memiliki manajemen peternakan yang baik.

Ketiga, perlu adanya penyempurnaan pengaturan tata niaga ternak, produk hasil peternakan dan pakan ternak sebagaimana pengaturan tata niaga



padi. Tata niaga ternak sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya pemotongan sapi betina produktif. Kondisi di lapangan hampir setiap tahun ada 200.000 ekor sapi betina produktif disembelih, hal ini selain melanggar aturan juga mengurangi kesempatan kita untuk memperoleh sapi bakalan. Beliau meyakini, dengan kemampuan yang dimiliki tenaga teknis lapangan dalam melakukan monitoring yang ketat terhadap pemotongan sapi betina produktif, pemotongan ilegal dapat dihindari.

Keempat, Pemerintah perlu melakukan perlindungan dan memelihara kearifan lokal melalui pengembangan sapi lokal. Untuk itu perlu dipikirkan adanya investasi jangka panjang dengan

memaksimalkan pemuliaan genetik sapi-sapi lokal sehingga diperoleh sapi dengan karakter Indonesia. Selain itu pemerintah perlu mendorong berkembangnya investasi usaha pembibitan sapi lokal berskala besar.

Kelima, dari aspek pakan, peternak sangat mengharapkan adanya program pakan murah mengingat biaya pakan merupakan 80% biaya produksi. Selain itu perlu peningkatan pengetahuan peternak dalam menangani pakan yang berasal dari limbah pertanian, standarisasi mutu pakan, serta manajemen yang baik melalui sosialisasi pedoman-pedoman agar pertumbuhan ternak dapat maksimal.

Keenam, untuk mempercepat keberhasilan Program PSDS perlu

dibentuk Satuan Tugas (Satgas) PSDS yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (Kementerian Pertanian/Pemda), Lembaga Pendidikan Pertanian/Peternakan, Asosiasi peternak, importir, konsumen dll.

Satgas mempunyai tugas antara lain :

- 1) Menentukan jumlah dan spesifikasi indukan yang akan diimpor dan mengawasi pelaksanaan impor sapi;
- 2) Memberikan rekomendasi ke Bank penyalur Kredit Usaha Peternak Sapi (KUPS) tentang kesiapan calon penerima KUPS;
- 3) Membuat pedoman tatacara beternak;
- 4) Mengembangkan bibit unggul hijauan untuk pakan ternak;
- 5) Melakukan kerjasama dengan Perhutani dan BPN untuk memanfaatkan lahan kehutanan sebagai lahan yang ditanami hijauan untuk pakan ternak;
- 6) Melaksanakan pengawasan pemotongan hewan guna mencegah pemotongan induk produktif.

Ketujuh, perlu peningkatan sosialisasi dan kesiapan SDM untuk melaksanakan program PSDS 2014. Ketua Forum Peternak Sapi Indonesia, yang aktif di berbagai organisasi ini, menyatakan bahwa belum semua peternak mengetahui program PSDS 2014 dengan baik, terutama bagi peternak kecil. Bahkan mungkin ada yang belum tahu sama sekali apa itu program PSDS 2014, meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan baik pada para peternak.

Kedelapan, Adanya sinergi tiga aspek penting dalam usaha peternakan yaitu bibit, pakan dan manajemen. Bila tiga aspek tersebut dapat bersinergi dengan baik, maka program PSDS 2014 berpeluang akan berhasil.

Kegiatan FPSI

FPSI yang beranggotakan 213 peternak dan tersebar di Indonesia ini, telah melakukan kegiatan-kegiatan guna mendukung program PSDS 2014 serta tercapainya kesejahteraan peternak di tahun 2015 antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) menyusun renstra; 2) bermitra dengan perguruan tinggi misalnya dengan Institut Pertanian Bogor (melakukan percontohan : pembibitan sapi; program integrasi sapi dengan kelapa sawit); 3) bermitra dengan perusahaan misalnya dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (melakukan percontohan program integrasi sapi dengan tebu) dan Petro Kimia Gresik (kerjasama dalam pembuatan pupuk organik); 4) menyelenggarakan Diklat bagi para pendamping; 5) Program pupuk organik telekensap (telepong-kencing sapi); 6) Program biogas berkelanjutan; dan 7) kesejahteraan anggota di tahun 2015.

Keberadaan Penyuluh Pertanian

Dengan antusias, Bambang Purwohadi menyampaikan pendapatnya bahwa keberadaan para penyuluh pertanian baik PNS/Kontrak maupun swasta, meskipun tidak semua daerah sama,

sampai saat ini keberadaan penyuluh pertanian sangat dirasakan manfaatnya dan umumnya mereka bertugas dengan baik. Peran penyuluh sebenarnya tidak hanya sebagai mitra/ pendamping/ pembimbing/ penyampai teknologi dan informasi, tetapi lebih dari itu, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang diharapkan dapat memfasilitasi terjadinya perubahan *mind set* peternak agar dalam beternak tidak hanya sekedar beternak tapi mampu menerapkan manajemen beternak dengan baik.

Saran dan Harapan

Untuk keberhasilan PSDS-2014, Bambang dan anggota FPSI menyarankan agar kebijakan pemerintah dalam menangani komoditas peternakan sama seperti pemerintah menangani komoditas pangan lainnya (padi/beras dan tebu/gula), dimana pada saat harga anjlok karena membanjirnya daging impor atau peternak sedang terjepit kebutuhan (misalnya kena musibah, atau untuk biaya pendidikan anak), peternak dibantu oleh Pemerintah/ Bulog dalam membeli ternak/ hasil ternak sesuai harga pasar. Selanjutnya pemerintah hendaknya lebih mendorong usaha perbibitan pada peternak lokal, tidak melakukan impor daging dan bakalan sapi dari luar luar, beri kesempatan anak bangsa untuk berkembang. FPSI sangat mengharap adanya kebijakan pemerintah dalam penyediaan lahan untuk usaha peternakan dengan

memberi kesempatan peternak menggunakan HGU yang sudah habis masa berlakunya. Mengingat penyuluh mempunyai peran strategis, maka hal-hal yang perlu dikuasai oleh para penyuluh antara lain pengetahuan tentang kondisi peternakan di Indonesia yang riil, kemampuan menerjemahkan program yang ingin dicapai pemerintah kepada peternak sehingga peternak tahu – memahami - dan melaksanakan program-program pemerintah tersebut. Untuk itu, diharapkan para penyuluh dengan wawasan serta kompetensi yang mereka miliki senantiasa melakukan pendampingan, berinteraksi dan menyampaikan informasi kepada peternak dengan baik sehingga cara berpikir para peternak dalam menangani usaha peternak dapat berubah, mereka tidak hanya sekedar beternak tetapi beternak dengan orientasi bisnis

(Sri Puji Rahayu)



sampai saat ini keberadaan penyuluh pertanian sangat dirasakan manfaatnya dan umumnya mereka bertugas dengan baik. Peran penyuluh sebenarnya tidak hanya sebagai mitra/ pendamping/ pembimbing/ penyampai teknologi dan informasi, tetapi lebih dari itu, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang diharapkan dapat memfasilitasi terjadinya perubahan *mind set* peternak agar dalam beternak tidak hanya sekedar beternak tapi mampu menerapkan manajemen beternak dengan baik.

Saran dan Harapan

Untuk keberhasilan PSDS-2014, Bambang dan anggota FPSI menyarankan agar kebijakan pemerintah dalam menangani komoditas peternakan sama seperti pemerintah menangani komoditas pangan lainnya (padi/beras dan tebu/gula), dimana pada saat harga anjlok karena membanjirnya daging impor atau peternak sedang terjepit kebutuhan (misalnya kena musibah, atau untuk biaya pendidikan anak), peternak dibantu oleh Pemerintah/ Bulog dalam membeli ternak/ hasil ternak sesuai harga pasar. Selanjutnya pemerintah hendaknya lebih mendorong usaha perbibitan pada peternak lokal, tidak melakukan impor daging dan bakalan sapi dari luar luar, beri kesempatan anak bangsa untuk berkembang. FPSI sangat mengharap adanya kebijakan pemerintah dalam penyediaan lahan untuk usaha peternakan dengan

memberi kesempatan peternak menggunakan HGU yang sudah habis masa berlakunya. Mengingat penyuluh mempunyai peran strategis, maka hal-hal yang perlu dikuasai oleh para penyuluh antara lain pengetahuan tentang kondisi peternakan di Indonesia yang riil, kemampuan menerjemahkan program yang ingin dicapai pemerintah kepada peternak sehingga peternak tahu – memahami - dan melaksanakan program-program pemerintah tersebut. Untuk itu, diharapkan para penyuluh dengan wawasan serta kompetensi yang mereka miliki senantiasa melakukan pendampingan, berinteraksi dan menyampaikan informasi kepada peternak dengan baik sehingga cara berpikir para peternak dalam menangani usaha peternak dapat berubah, mereka tidak hanya sekedar beternak tetapi beternak dengan orientasi bisnis

(Sri Puji Rahayu)





BPP Doko, Kab Blitar

KIPRAH BPP DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BLITAR

Dalam Undang-Undang RI No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) tersurat bahwa Pemerintah dan Pemda perlu menyempurnakan aspek kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat kecamatan yang perlu pembenahan karena selama ini kelembagaan tersebut sebagian besar tidak berfungsi dengan baik.

Penguatan kelembagaan penyuluhan

pertanian di kabupaten Blitar provinsi Jawa Timur telah berhasil menghantarkan petani mau dan mampu meningkatkan produksi padi dari 8 % menjadi 17 %. Keberhasilan ini tentunya tidak bisa dipungkiri salah satunya berkat kerja keras Penyuluh Pertanian yang bernaung di 6 wilayah koordinasi wilayah kerja BPP di kabupaten Blitar, terdiri dari BPP Talun, BPP Srengat, BPP Wlingi, BPP Kademangan, BPP Panggungrejo dan BPP Binangun, yang memberikan fasilitasi kepada petani di 22 wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Blitar. Sistem otonomi daerah telah diberlakukan dengan baik. Kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Blitar dikukuhkan dengan peraturan daerah kabupaten Blitar No. 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Blitar mengacu kepada Peraturan Bupati Blitar No. 9 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar. BPP sebagai unit pelaksana teknis BP4K dituntut mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana diatur undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan

dan Kehutanan.

Kultur dan kondisi geografi Kabupaten Blitar yang berbasis pertanian, telah mengantarkan Blitar berswasembada pangan, dan tidak menutup kemungkinan dapat berkembang sebagai daerah yang mampu memberikan distribusi untuk daerah-daerah lainnya. Keberhasilan kembali Kabupaten Blitar meraih peningkatan produksi padi tidak terlepas dari peran penyuluhan pertanian yang dimotori BPP, melalui sistem Laku dan kegiatan konsultasi serta rekayasa inovasi teknologi. Sebagai penggerak penyuluhan pertanian adalah tim Penyuluh Pertanian yang bergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). Kecukupan pangan nampaknya sudah menjadi tekad penyuluh pertanian di wilayah kabupaten Blitar dalam meraih kembali keberhasilan program pangan Kabupaten Blitar yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Jenis tanaman pangan yang banyak dihasilkan dari Kabupaten Blitar adalah padi, jagung, kedelai kacang tanah, ubi kayu dan ketela rambat. Produksi jagung selain digunakan sebagai bahan baku olahan makanan juga digunakan sebagai pakan ternak. Disamping itu, Kabupaten Blitar juga sebagai daerah produsen hortikultura seperti buah rambutan, nanas, dan belimbing, namun disayangkan belum dikembangkan secara optimal.



Pameran Ketahanan Pangan

BPP Kanigoro

BPP Kanigoro berada di wilayah dataran rendah. Sementara ini BPP Kanigoro menempati bangunan rumah dinas Camat yang tidak ditempati, sambil menunggu adanya dana DAK untuk pembangunan BPP yang konon kabarnya juga sudah disiapkan lahannya oleh pemerintah daerah kabupaten Blitar seluas 5800 meter persegi. Meskipun saat ini lokasi BPP masih menumpang dan tidak tersedianya lahan percontohan BPP, namun dalam berkarya dibidang penyuluhan pertanian BPP Kanigoro masih mampu berperan sebagaimana tuntutan lembaga penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.

Untuk meningkatkan pengetahuan Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan teknologi kepada petani dilakukan pelatihan di BPP Talun setiap dua minggu sekali bersama beberapa BPP di eks kawedanan Talun (BPP Talun, BPP Kanigoro, BPP Nglegok, BPP Garum dan BPP Gandusari). Materi penyuluhan pertanian yang tersedia di BPP Kanigoro menjadi sumber informasi bagi penyuluh pertanian untuk melakukan pendampingan teknologi. Selain itu BPP Kanigoro juga melakukan pengembangan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) dalam mengelola usaha tani pengolahan hasil pertanian sebagai pendukung program



Demplot padi di BPP

pangan dikabupaten Blitar. Dalam mendukung program swasembada daging BPP Kanigoro melakukan pendampingan teknologi pakan ternak melalui budidaya Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan pembuatan pakan silase.

Wilayah binaan BPP Kanigoro terdiri dari 12 desa dan difasilitasi oleh 7 Penyuluh Pertanian (5 Penyuluh Pertanian PNS dan 2 Penyuluh Pertanian THL) dan dibantu 2 Penyuluh Pertanian Swadaya. Masing masing Penyuluh Pertanian PNS dan THL bertanggung jawab terhadap wilayah binaan lebih dari 1 desa wilayah

binaan. Dalam menjalankan tugas fungsi penyuluhan pertanian terkoordinasi dalam tim penyuluh pertanian BPP Kanigoro dibawah koordinasi Penyuluh Pertanian senior yang dijabat oleh bapak Darmanto sebagai koordinator penyuluh pertanian BPP Kanigoro.

BPP Kanigoro sebagai lembaga penyuluhan pertanian pemerintah diwilayah kecamatan Kanigoro mengemban tugas fungsi melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Selain itu BPP Kanigoro juga memiliki pos pelayanan agribisnis yang melayani petani bila membutuhkan pendampingan teknologi. Bentuk operasional pelayanan



Demplot padi di BPP

pangan dikabupaten Blitar. Dalam mendukung program swasembada daging BPP Kanigoro melakukan pendampingan teknologi pakan ternak melalui budidaya Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan pembuatan pakan silase.

Wilayah binaan BPP Kanigoro terdiri dari 12 desa dan difasilitasi oleh 7 Penyuluh Pertanian (5 Penyuluh Pertanian PNS dan 2 Penyuluh Pertanian THL) dan dibantu 2 Penyuluh Pertanian Swadaya. Masing masing Penyuluh Pertanian PNS dan THL bertanggung jawab terhadap wilayah binaan lebih dari 1 desa wilayah

binaan. Dalam menjalankan tugas fungsi penyuluhan pertanian terkoordinasi dalam tim penyuluh pertanian BPP Kanigoro dibawah koordinasi Penyuluh Pertanian senior yang dijabat oleh bapak Darmanto sebagai koordinator penyuluh pertanian BPP Kanigoro.

BPP Kanigoro sebagai lembaga penyuluhan pertanian pemerintah diwilayah kecamatan Kanigoro mengemban tugas fungsi melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Selain itu BPP Kanigoro juga memiliki pos pelayanan agribisnis yang melayani petani bila membutuhkan pendampingan teknologi. Bentuk operasional pelayanan

berupa konsultasi yang dilakukan oleh tim penyuluh pertanian di BPP Kanigoro dengan cara piket penyuluh pertanian secara bergilir.

BPP Doko

BPP Doko merupakan salah satu BPP dibawah koordinasi BPP Wlingi yang bertanggung jawab dengan 5 wilayah kecamatan eks kawedanaan Wlingi (BPP Doko, BPP Kesamben, BPP Selorejo, BPP Selopuro dan BPP Wlingi). Jarak tempuh BPP Doko dengan kota Blitar kurang lebih 25 km.

Tidak berbeda dengan umumnya BPP, dalam melaksanakan kegiatan pelatihan bagi penyuluh pertanian dilakukan setiap 2 minggu. Kantor BPP Doko masih menumpang ruangan milik PKK desa Doko dan juga tidak tersedia lahan percontohan di BPP. Kegiatan di BPP Doko selain berupa pelatihan di BPP juga melaksanakan demonstrasi percontohan dilahan petani yang sekaligus berperan sebagai lahan teknologi percontohan BPP.

BPP Doko memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di 10 desa dibawah koordinasi bapak Supardji SP sebagai koordinator Penyuluh. Jumlah penyuluh di BPP Doko terdiri dari 3 orang Penyuluh Pertanian PNS dan 5 Penyuluh Pertanian THL dengan pembagian tanggung jawab wilayah kerja disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan wilayah desa binaan.

Bagi wilayah binaan yang termasuk kategori sulit maka Penyuluh Pertanian diwilayah tersebut hanya mengemban tanggung jawab satu desa wilayah binaan, sedang untuk katagori wilayah binaan dengan tingkat kesulitan sedang maka Penyuluh Pertanian diwilayah tersebut mengemban tanggung jawab lebih dari satu desa wilayah binaan.

Kegiatan penyuluhan pertanian di BPP dalam mendukung program pangan

Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan modal dasar bagi petani meningkatkan Pengetahuan Keterampilan Sikap (PKS) dalam mendukung program pangan di kabupaten Blitar. Karena itu diperlukan dukungan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh BPP sebagai lembaga penyuluhan pertanian yang berada ditingkat kecamatan. BPP Kanigoro dan BPP Doko dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian diawali dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petani dan kelompok tani melalui kegiatan pertemuan pengurus kelompok tani dan pengurus Gapoktan di BPP.

Secara rinci kondisi kegiatan penyuluhan pertanian di BPP Kanigoro dan BPP Doko tervisualisasikan pada matriks berikut ini



Kegiatan Penyuluhan Pertanian di BPP Kanigoro dan BPP Doko dalam Mendukung Ketahanan Pangan

| No | Kegiatan | Uraian Kegiatan |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Mengidentifikasi wilayah | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan petani dalam pertemuan kelompok tani dan Gapoktan • Melakukan pendampingan pada kelompok tani dan Gapoktan dalam pengembangan potensi wilayah |
| 2. | Penyediaan dan penyebaran informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Materi yang ada di BPP dimanfaatkan untuk keperluan pendampingan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan petani • Materi penyuluhan yang bersumber dari Tabloid Sinar Tani (Mimbar Penyuluhan Liptan), hasil karya Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan terbitan lama yang sudah ada • Bentuk materi penyuluhan yang ada di BPP berupa folder, leaflet, buku, poster, CD dan kaset audio dan sinar tani |
| 3. | Pelatihan bagi Penyuluh di BPP | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dilaksanakan 2 minggu sekali • Fasilitator pelatihan umumnya berasal dari KJF Kab Blitar, Penyuluh Pertanian kecamatan yang memiliki potensi dibidang pertanian, para pakar dan praktisi dibidangnya • Peserta pelatihan terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB PP, para ketua kelompok tani di wilayah binaan BPP • Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan petani yang ada di program penyuluhan pertanian dan kebijakan BP4K kab Blitar atau dinas terkait yang mendesak yang perlu untuk segera disosialisasikan kepada petani. |



Peranan BPP dalam mendukung program pangan di kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan daerah potensial disektor pertanian yang sedang berkembang, dalam mendukung program ketahanan pangan diantaranya melalui perluasan areal penanaman jagung dan kedele. Selain itu masih terbuka peluang bagi investor yang berminat diusaha budidaya ternak sapi potong yang sedang dikembangkan di Kawasan Industri Ternak (KINAK) sapi perah, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada petani peternak sekaligus mampu berperan dalam mendukung program swasembada susu dan daging.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan BPP sangatlah memberikan warna dalam menghantarkan petani merintis kembali keberhasilan program pangan sebagaimana yang pernah dinikmati berswasembada beras tahun 1984 lalu. BPP Kanigoro dan BPP Doko di Kab Blitar ikut berperan dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan melalui kegiatan penyuluhan pertanian dan diwujudkan dengan meningkatnya produksi pangan (ubi kayu, kacang tanah, jagung, kedele dan padi) dari 8 % menjadi 17 %.

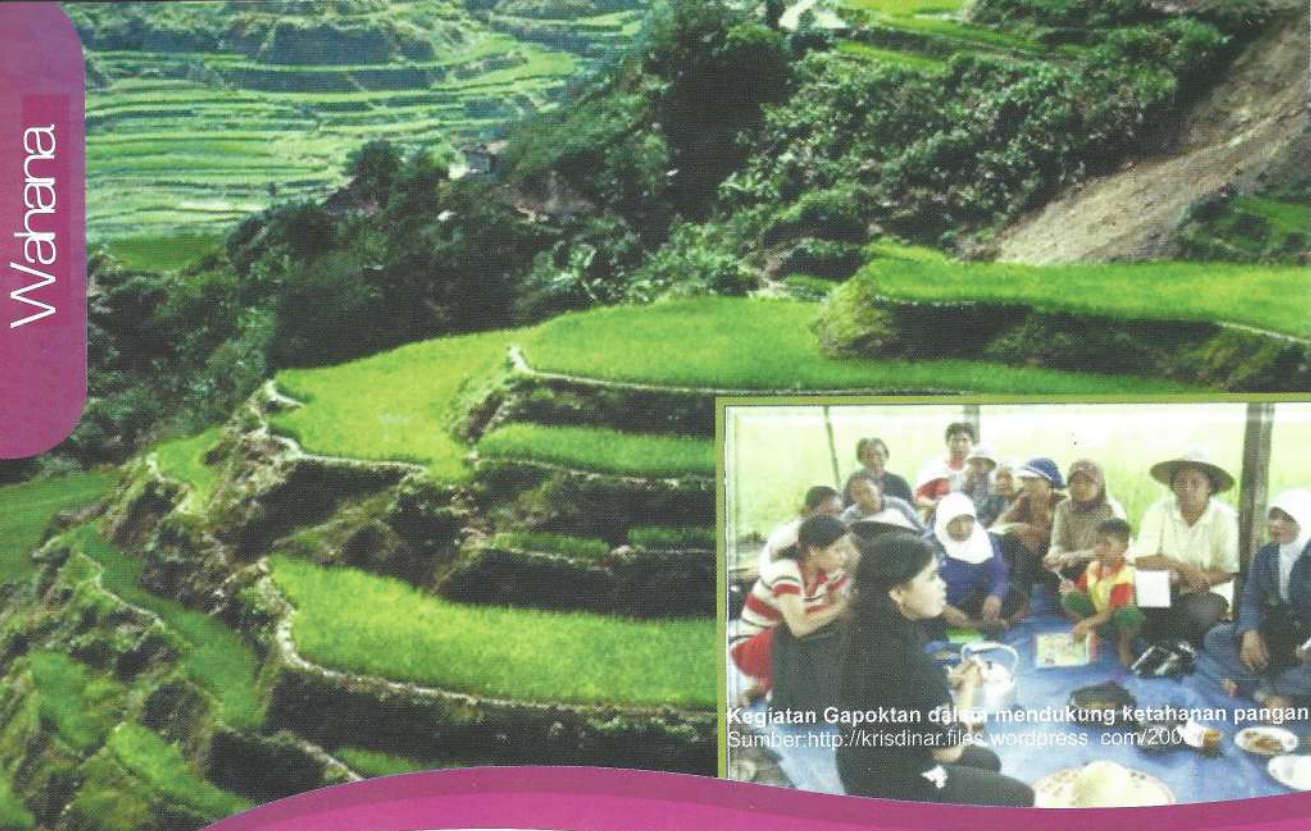
Selain melakukan pendampingan teknologi, fasilitasi lain yang diberikan BPP untuk mendukung program pangan adalah dengan memberikan kesempatan kepada petani dan penyuluh pertanian untuk memanfaatkan media informasi pertanian yang tersedia di BPP. Informasi tersebut digunakan petani sebagai bahan diskusi bagi anggota kelompok tani yang membutuhkan dan juga

bagi Penyuluh Pertanian untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan.

Acungan jempol sepatutnya diberikan bagi Penyuluh Pertanian yang ada di BPP Kanigoro yang merintis pos pelayanan konsultasi agribisnis di BPP. Prestasi lain yang dilakukan BPP Kanigoro adalah memberdayakan kelompok wanita tani untuk berperan dan berkiprah dalam mengolah hasil produksi pertanian yang diharapkan dapat membantu penguatan ekonomi diperdesaan. Beragam jenis olahan krupuk yang dibuat oleh kelompok wanitani dari bahan hasil produksi pertanian sudah dipasarkan meskipun dalam kemasan yang sederhana. Kedepan BPP sebagai lembaga penyuluhan berharap kelompok wanitani mampu menciptakan kemasan yang lebih baik sehingga layak sebagai buah tangan atau oleh oleh khas kabupaten Blitar, seperti sambel pecel Blitar dan miniatur souvenir aneka buah tangan yang dibuat dari limbah kayu, sekaligus sebagai promosi produk unggulan daerah. Selain itu perlu digali potensi lainnya berupa aneka olahan produksi hortikultura buah buahan yang cukup dikenal berkualitas seperti: nanas, rambutan, dan belimbing sebagai buah tangan yang dapat menambah pendapatan petani.

Dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Blitar, BPP ikut memberikan andil dengan adanya peningkatan produksi pangan sebesar 9% dan adanya peningkatan kegiatan kelompokwanita tani dalam pengelolaan hasil pertanian

(Rr.Priwanti)



KEGIATAN GAPOKTAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan diartikan dengan kondisi kecukupan pangan bagi rumah tangga yang terindikasi dari ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan dan terjangkau. Ketahanan pangan akan dapat diwujudkan bila 2 (dua) aspek penting dari indikator keberhasilan kecukupan pangan ditingkat wilayah sampai rumah tangga dapat terpenuhi, yaitu pertama tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk

seluruh penduduk. Kedua setiap penduduk mudah untuk mendapatkan akses pangan yang berkaitan dengan kecukupan gizi pangan. Aspek penting yang ketiga adalah distribusi pasokan pangan harus dapat menjangkau keseluruhan wilayah dengan harga yang stabil dan dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga.

Ketahanan pangan didukung dengan undang undang No. 7 tahun 1996 tentang

pangan yang diantaranya menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu prioritas program ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu menanggulangi permasalahan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Pihak-pihak yang terlibat dalam ketahanan pangan salah satunya adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kekelembagaan di wilayah perdesaan dan merupakan organisasi non formal yang bertumbuh kembang di masyarakat tani yang ada di perdesaan. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang anggotanya mengembangkan usaha agribisnis dan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, khususnya pada lampiran 1. tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

Gapoktan sebagai lembaga yang berorientasi pada usaha agribisnis mempunyai fungsi-fungsi berikut: 1) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga); 2) Penyediaan saprotan (pupuk, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkannya kepada para petani melalui kelompoknya; 3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada petani yang memerlukan; 4) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan



Distribusi pupuk oleh Gapoktan dalam mendukung ketahanan pangan
Sumber: http://polres_gresik.net/foto_berita/small_42

dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah; dan 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

Guna mendukung program ketahanan pangan yang ada di wilayah perdesaan, Gapoktan dituntut mampu memberikan pelayanan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani pengelola agribisnis pendukung program ketahanan pangan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Gapoktan dalam melayani kelompok tani anggotanya antara lain sebagai berikut :

1. Usaha agribisnis merupakan satu kesatuan unit produksi

Pengelolaan usaha agribisnis merupakan satu unit usahatani dalam satu sistem produksi yang saling terkait, karena itu Gapoktan sebagai lembaga yang



Proses membuat tepung ubi kayu
 Sumber: http://1.bp.blogspot.com/_V14q5s4Z

bertumbuh kembang dimasyarakat tani diharapkan mampu memberikan naungan dan mengamankan usaha agribisnis yang dikelola oleh kelompok tani. Gapoktan sebagai organisasi non formal yang beranggotakan kelompok tani pengelola usaha agribisnis harus mampu berperan dalam menaungi unit produksi pendukung ketahanan pangan dengan melakukan fungsi Gapoktan, diantaranya:

a) Mampu melakukan pengambilan keputusan guna pengembangan produksi agribisnis pendukung ketahanan pangan yang menguntungkan bagi anggotanya, dengan didukung informasi teknologi, permodalan, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi dan lainnya yang tersedia; b) Memberikan fasilitas

penerapan teknologi yang dibutuhkan kelompok tani sesuai dengan kesepakatan rencana definitif yang disusun secara bersama oleh semua kelompok tani anggota Gapoktan; c) Mampu melakukan jalinan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dengan unit produksi; d) Mempunyai kemampuan dalam penyusunan rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan kegiatannya yang mempertimbangkan efisiensi; e) Mampu menaati dan melaksanakan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dan anggota kelompoknya; f) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan evaluasi kebutuhan Gapoktan untuk perencanaan kegiatan berikutnya; g) Mampu melakukan perumusan kesepakatan dalam pemecahan permasalahan dan kegiatan yang akan dilakukan bersama; h) Mampu dalam merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala dilingkungan anggota Gapoktan, antar Gapoktan dan dengan pihak-pihak instansi terkait.

2. Menyediakan kebutuhan saprotan

Sarana produksi pertanian merupakan kebutuhan pokok yang harus mampu disediakan oleh Gapoktan dalam melayani kebutuhan anggotanya yang mengelola agribisnis komoditi pendukung ketahanan pangan. Perlu adanya kepedulian Gapoktan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok tani dengan memerankan fungsi unit usaha sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Melakukan pengumpulan data kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan kelompok tani/Gapoktan sesuai keperluan petani dan

diperlukan Gapoktan untuk penyusunan perencanaan usaha agribisnis yang dikelola kelompok; b) Mampu melakukan rintisan jalinan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak-pihak penyedia sarana-prasarana produksi pertanian; c) Mampu melakukan pengumpulan data kegiatan dari masing-masing kelompok untuk kepentingan berhubungan dengan pihak-pihak penyedia sarana-prasarana dan dinas terkait; d) Mampu melakukan rintisan jalinan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak-pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan

3. Menyediakan modal usaha

Permodalan merupakan kunci yang akan ikut berperan dalam pengelolaan usaha agribisnis. Gapoktan sebagai lembaga di perdesaan menjadi harapan dan andalan bagi kelompok pengelola usaha agribisnis komoditi pendukung ketahanan pangan. Tuntutan yang harus mampu diwujudkan oleh Gapoktan adalah kemampuan memerankan fungsi unit usaha keuangan mikro yang meliputi : a) Memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi dalam mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan prakarsa kelompok anggota Gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang ada; b) Mampu memberikan dorongan peningkatan kemampuan kelompok anggota Gapoktan untuk mengelola keuangan mikro secara komersial; c) Mampu mendorong kelompok anggota Gapoktan untuk mengembangkan



Penyediaan modal usaha

kemampuan menggali sumber-sumber usaha yang dapat digunakan dalam peningkatan permodalan; d) Mampu mendorong kelompok anggota Gapoktan untuk membuka peluang rintisan kegiatan simpan-pinjam yang akan dapat dikembangkan sebagai lembaga modal usaha yang dikelola oleh kelompok.

4. Melakukan proses pengolahan produk

Diperlukan penanganan pengolahan produk agar dapat memberikan nilai tambah yang akan meningkatkan pendapatan kelompok anggota Gapoktan dalam mengelola hasil produksi pertanian komoditi pendukung ketahanan pangan. Berkaitan dengan itu Gapoktan dituntut mampu untuk memerankan fungsi unit usaha pengolahan hasil produksi pertanian yang meliputi : a) Melakukan pendataan kebutuhan peralatan pengolahan hasil pada kelompok yang beranggotakan petani pengolah hasil produksi pertanian; b) Mampu melakukan rintisan jalinan



Pendampingan oleh penyuluh dalam mengelola BLM-PUAP

kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pihak penyedia peralatan pertanian; c) Mampu melakukan rintisan jalinan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pengusaha pengolahan hasil hasil produksi pertanian; d) Memberikan motivasi kepada kelompok tani/Gapoktan yang beranggotakan petani pengolah hasil pertanian untuk mengembangkan kemampuan dalam pengolah hasil produksi pertanian; dan e) Mampu melakukan pengorganisasian kelompok tani yang beranggotakan petani petani pengolah hasil pertanian untuk bergabung kedalam unit unit usaha pengolahan hasil yang dikelola Gapoktan.

5. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani

Kesulitan pemasaran yang selama ini menjadi kendala bagi petani harus menjadi kepedulian bagi Gapoktan dalam membantu petani, untuk itu Gapoktan harus mau dan mampu melakukan rintisan pembuka jalur dengan pihak pihak terkait yang memberikan peluang bagi petani untuk memasarkan hasil

pertaniannya. Karena itu ada beberapa tuntutan yang harus mampu diwujudkan Gapoktan dalam melayani petani melalui fungsi dan peran unit usaha pemasaran hasil produksi, diantaranya:

- Melakukan identifikasi dan analisa potensi wilayah pada sumber sumber daya yang dimiliki kelompok tani dalam mengembangkan hasil produksi pertanian yang ada dilingkungan kelompok tani yang lebih menguntungkan bagi anggotanya,
- Mencarikan peluang pasar bagi kelompok tani untuk memasarkan hasil produksi pertaniannya,
- Melakukan rintisan jalinan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pihak pemasok kebutuhan pasar, dan
- Memberikan motivasi kepada kelompok tani anggota Gapoktan untuk mau dan mampu mengembangkan usaha komoditi pangannya sebagai produsen yang memenuhi kebutuhan pasar.

Dengan kemampuan Gapoktan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok tani anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses produksi pertanian, dapat dipastikan akan membantu petani pengelola komoditi pangan yang mendukung program ketahanan pangan dan bergabung dalam kelompok tani. Dan pada akhirnya petani mampu berpartisipasi menghasilkan produksi pertanian yang berkaitan dengan bahan baku pangan guna mendukung program ketahanan pangan yang sedang dan akan terus digulirkan kementerian pertanian.

(Ibrahim Saragih)



PERAN PENYULUH DALAM Mendukung PROGRAM PUAP

Bagi penyuluh pertanian profesional, melakukan kegiatan penyuluhan adalah panggilan jiwa.

Pemerintah banyak menggulirkan program untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. Program yang digulirkan Kementerian Pertanian diantaranya Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI/

P3TIP), *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang semuanya merupakan program pemberdayaan masyarakat.

Program PUAP merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang sudah masuk pada tahun ke tiga. Selain merupakan strategi untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan.

Program PUAP memberikan fasilitasi modal usaha agribisnis pada masyarakat di perdesaan yang disalurkan melalui Gapoktan dengan pendampingan oleh penyuluh pertanian PNS, Penyuluh THL dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Penyuluh pertanian PNS dan Penyuluh THL melakukan pendampingan teknologi agribisnis sedangkan PMT melakukan pendampingan di bidang manajemen keuangan.

Penyuluh Pertanian sebagai pendamping gabungan kelompok tani (Gapoktan)/kelompok tani (Poktan), memiliki peran sebagai fasilitator agar Gapoktan/Poktan mau dan mampu mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan agribisnisnya. Pendampingan dilakukan dengan (1) membantu menganalisis situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan/perencanaan ke depan; (2) membantu mereka menemukan masalah; (3) membantu mereka memperoleh pengetahuan/

informasi guna memecahkan masalah dan (4) membantu mereka dalam menganalisa dan mengambil keputusan.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh Penyuluh Pertanian melakukan pendampingan meliputi : (1) menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai potensi wilayah; (2) Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha agribisnis Gapoktan/Poktan; (3) memotivasi peranserta anggota Gapoktan/Poktan dalam pengembangan kegiatan usaha agribisnis (4) memfasilitasi Gapoktan/Poktan mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan dan sarana produksi; (5) mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan/Poktan dalam membangun kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis; (6) membantu pemecahan masalah Gapoktan/Poktan dalam mengembangkan usaha agribisnis; (7) Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Gapoktan/Poktan sebagai unit usaha otonom; (8) Memfasilitasi Gapoktan/Poktan dalam penyusunan laporan potensi desa, laporan data dasar serta laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pendampingan

Penyuluh Pertanian melakukan pendampingan Gapoktan meliputi kegiatan identifikasi Potensi Desa/Kelurahan yang berguna untuk penyusunan RUB dan RUK, dan aktif melakukan bimbingan dan membantu



Pemanfaatan Dana PUAP untuk kegiatan On-farm

Gapoktan dalam penetapan dan pengesahan RUB/RUK melalui rapat anggota yang telah disusun dan disepakati oleh Gapoktan/Poktan. Selain itu penyuluh juga senantiasa memotivasi pengurus Gapoktan dalam menumbuh kembangkan unit usaha otonom, seperti unit usaha simpan pinjam, saprotan, budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran. Disamping menjadi pendamping, penyuluh pertanian juga dituntut untuk melakukan kunjungan dan pertemuan, utamanya dalam menyampaikan informasi dan teknologi baru bagi petani guna membantu petani dalam memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis.

Dalam melakukan pendampingan pada Gapoktan penyuluh pertanian dituntut bekerjasama dengan Gapoktan/Poktan, Kepala Desa/Lurah dan Penyelia Mitra Tani (PMT) guna pengembangan usaha / kewirausahaan kelompok dan memperkuat kelembagaan dan fasilitasi kemitraan.

Pelaksanaan PUAP di Kabupaten Magelang – Jawa Tengah.

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah penerima program PUAP. Pada tahun 2008 penerima program PUAP adalah 43 Gapoktan, tahun 2009 ada 76 Gapoktan, dan untuk tahun 2010 diusulkan 121 Gapoktan untuk mendapatkan bantuan



Agribisnis Kambing

program PUAP.

Dengan bertambahnya jumlah gapoktan/poktan penerima PUAP peran penyuluh pertanian sebagai pendamping sangat dibutuhkan, agar petani tidak mengalami kesulitan dalam mengelola usahatani, mampu akses kepada sumber permodalan seperti Bank dan pemasaran hasil produksinya. Kedepan, Gapoktan diharapkan mampu berfungsi sebagai kelembagaan ekonomi mikro. Berikut adalah kegiatan Gapoktan penerima PUAP di Jawa Tengah.

1. KEGIATAN GAPOKTAN MITRA TANI

Sekretariat Gapoktan Mitra Tani berkedudukan di Dusun Krajan Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Gapoktan ini berdiri tanggal 14 Mei 2007 yang dikuatkan dengan Berita

Acara No. 520/137/V/07 beranggotakan 331 orang berasal dari 5 kelompok tani yang ada di desa Kaliangkrik. Komoditas unggulan yang diusahakan Gapoktan Mitra Tani adalah padi, jagung, ubikayu, domba/sapi dan tembakau.

Gapoktan Mitratani didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Gapoktan melalui 4 fungsinya yaitu sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan usaha pemasaran. Jenis usaha dan kegiatan yang dilakukan adalah budidaya (*on-farm*) dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta usaha non budidaya (*off-farm*) seperti industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan) dan usaha lain yang berbasis pertanian. Sumber modal kelembagaan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib,

simpanan manasuka, penyisihan dari hasil usaha dan pinjaman dari luar. Gapoktan Mitra Tani telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009.

Dana BLM PUAP tahun 2008 yang diterima Gapoktan Mitra Tani senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Dana tersebut dimanfaatkan untuk modal usaha produktif sesuai usulan RUB/RUK/RUA. Transaksi keuangan dilaksanakan secara transparan, bukti transaksi dibukukan serta disimpan oleh Bendahara Gapoktan. Besarnya pinjaman maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jasa pinjaman 1 % perbulan lama pinjaman 10 bulan.

Anggota Gapoktan Mitra Tani yang saat ini mendapatkan bantuan modal usaha produktif baru 97 orang yang terdiri dari 68 orang usaha dibidang peternakan dan 29 orang berusaha dibidang bakulan.

Pencairan dana bantuan PUAP tanggal 13 Pebruari 2009 senilai Rp. 100.000.000,- , sampai bulan Pebruari 2010, dari jasa usaha agribisnis bidang peternakan telah menghasilkan keuntungan Rp 8.160.000,- dan Rp 2.900.000,- dari usaha bakulan. Sementara ini dana simpanan wajib simpanan pokok dan dana lainnya telah terkumpul sejumlah Rp 1.320.000,-, sehingga tersedia tambahan modal senilai Rp12.380.000,- Upaya untuk memajukan Gapoktan



Kegiatan pendampingan PUAP



Pemberdayaan Gapoktan
Sumber: http://b.blogspot.com/_Weso3EoFY

Mitra Tani disepakati oleh anggota melalui simpanan wajib dan simpanan pokok sebagai pemupukan modal, yang diharapkan Gapoktan nantinya dapat tumbuh dan berkembang menjadi LKM Agribisnis. Pada awalnya simpanan wajib ditetapkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) perbulan dan simpanan pokok Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan, disamping itu juga ada simpanan manasuka. Namun hasil Rapat Anggota tahun 2010, disepakati adanya kenaikan simpanan pokok dari Rp. 5.000,- menjadi Rp.25.000,-

Pembagian dan penggunaan keuntungan Gapoktan diatur dalam AD/ART dengan rincian sebagaimana berikut:

- a. 30% untuk jasa anggota
- b. 25% untuk cadangan
- c. 25% untuk jasa simpanan anggota
- d. 10% untuk dana pengurus dan pengawasan
- e. 5% untuk dana karyawan
- f. 2% untuk dana pendidikan
- g. 1% untuk dana sosial

h. 2% untuk dana pembangunan.

Sedangkan untuk penggunaan dana sosial, pendidikan, pembangunan diatur dalam anggaran rumah tangga.

2. GAPOKTAN TUNAS JAYA

Gapoktan Tunas Jaya beralamat di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, merupakan Gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2009 yang pemanfaatan dananya untuk usaha produksi ternak kambing sebesar 40 %, usaha bakulan hasil bumi, home industri (pengolahan) dan usaha lain masing-masing 20 %.

Penjelasan Ketua Gapoktan Tunas Jaya Bapak Drs. Wawan Widiyanto, bantuan BLM-PUAP yang diterima Gapoktan pada tahun 2009, sebesar 40 % dari total dana digunakan untuk usaha ternak kambing milik anggota. Usaha ini merupakan bagian dari kelanjutan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) yang telah mendapatkan pelatihan Agribisnis Ternak Kambing.

Untuk meminjam dana bantuan BLM - PUAP Gapoktan Tunas Jaya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota Koperasi
- 2) Mengajukan RUA kepada Poktan
- 3) Membayar administrasi sebesar Rp. 15.000,-
- 4) Surat Rekomendasi Ketua Poktan dengan melampirkan foto copy KTP, foto copy KK, dan foto copy

KTA Poktan

- 5) Membayar simpanan pokok Rp. 20.000,-

Selain memenuhi persyaratan tersebut, peminjam dana PUAP mempunyai kewajiban mematuhi peraturan peminjaman yaitu membayar jasa sebesar 1 % perbulan dan adanya jaminan sanggup disiplin dalam pengembalian. Apabila tidak disiplin, akan diberikan sanksi berupa sanksi sosial dengan sistem tanggung renteng.

Hasil Pendampingan Penyuluh Dalam Mengelola BLM – PUAP

Dari kedua gapoktan penerima BLM-PUAP di kabupaten Magelang nampaknya keberhasilan tidak semata mata dari keberhasilan gapoktan dalam mengelola usahanya, namun yang lebih penting adalah adanya peran pendampingan penyuluh pertanian yang melakukan bimbingan kepada petani dengan sepenuh hati.

Pendampingan penyuluh pertanian pada Gapoktan dirasakan hasilnya oleh petani antara lain :

- 1) Petani mudah memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahatani secara berkelompok/gapoktan,
- 2) Modal usaha yang dikelola secara berkelompok dirasakan manfaatnya dapat meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus memperkuat roda perekonomian masyarakat desa berputar dengan baik.
- 3) Sarana untuk meningkatkan pengetahuan melalui proses

pembelajaran yang diadakan setiap bulan pada saat rapat bulanan anggota.

- 4) Dengan berkelompok, membangun rasa kebersamaan.
- 5) Dengan pendampingan dapat dimanfaatkan sebagai ajang bertukar pikiran dan berinteraksi secara langsung dengan anggota gapoktan/poktan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- 6) Adanya pengertian bahwa PUAP tidak semata-mata mengelola usahatani dengan menggunakan BLM tetapi yang paling utama adalah penyerapan teknologi dan informasi pertanian serta pembelajaran mengenai manfaat dan pengelolaan keuangan bagi para anggota kelompok tani.
- 7) Adanya peningkatan ekonomi, yang dirasakan petani melalui penambahan modal usaha produktif yang bermanfaat memacu usaha agribisnis anggota kelompok.
- 8) Adanya rasa kebersamaan dan adanya tanggung renteng anggota kelompok dalam prosedur peminjaman modal usaha apabila terjadi ketidak disiplin dalam pengembalian.

Kesuksesan program PUAP untuk meningkatkan pendapatan petani bagi penyuluh pertanian yang bekerja secara profesional merupakan panggilan jiwa yang dilakukan melalui pendampingan sekaligus sarana bagi penyuluh dalam menjalin hubungan emosional dengan Gapoktan/poktan. *(Siti Nurjanah)*



Program Desa Mapan



Mentan Panen Padi di Karawang untuk mencapai ketahanan pangan
Sumber: [http:// www.deptan.go.id/r](http://www.deptan.go.id/r)

PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PROGRAM AKSI DESA MAPAN

Untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Desa Mapan) Menuju Gerakan Kemandirian Pangan. Dalam Proksi Desa Mapan ini penyuluh pertanian menjadi salah satu titik sentral dalam memfasilitasi dan mendampingi kelompok sasaran.

Dalam upaya mencapai tujuan pertama *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015, Pemerintah sudah dan terus melanjutkan program pembangunan yang tertuang di dalam *triple track strategy*, dimana *track* ketiga adalah revitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi



Memfaatkan ubi sebagai sumber karbohidrat
 Sumber: <http://masyarakatmandiri.org/images>

pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Landasan perwujudan ketahanan pangan didasarkan pada pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyatakan bahwa, pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah, sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan ke keadaan normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak atau bencana. Untuk mewujudkan kemandirian pangan dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan melalui *twin track strategy*/strategi jalur

ganda, yaitu : 1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan 2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Desa Mapan), yang diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, agar

masyarakat dapat mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan menuju Gerakan Kemandirian

Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran Proksi Desa Mapan

Proksi Desa Mapan dilaksanakan dalam waktu empat (4) tahun, dan ruang lingkungnya meliputi: **tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.** Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor untuk pengembangan sarana prasarana pedesaan. Untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahun kelima dikembangkan gerakan kemandirian pangan yang melibatkan semua unsur masyarakat dan pemerintah daerah, dimana desa yang telah mandiri akan membina desa-desa di sekitarnya

Tujuan Proksi Desa Mapan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Suatu desa dikatakan mandiri pangan bila desa tersebut telah memenuhi 5 indikator keberhasilan sebagai berikut: 1) Berkembangnya

usaha produktif berbasis sumber daya lokal; 2) Berkembangnya lembaga layanan permodalan; 3) Meningkatnya ketersediaan pangan; 4) Meningkatnya daya beli dan akses pangan rumah tangga; dan 5) Meningkatnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.

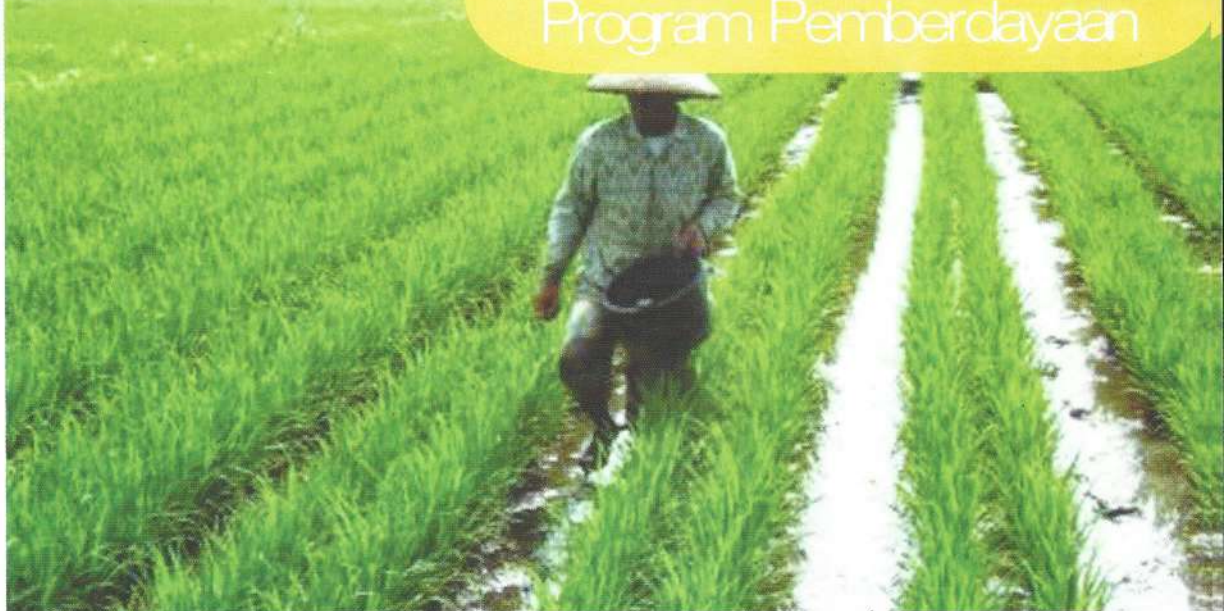
Adapun yang menjadi sasaran Proksi Desa Mapan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan melalui survei data dasar rumah tangga (DDRT). Pelaksanaan survei DDRT menggunakan 13 indikator kemiskinan yang meliputi: (1) tingkat pendidikan, (2) jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, (3) konsumsi pangan, (4) konsumsi non pangan, (5) modal (lahan, tabungan, hewan ternak), (6) sarana transportasi, (7) perabotan rumah tangga, (8) luas tempat tinggal, (9) kondisi tempat tinggal, (10) sumber air minum, (11) sumber penerangan, (12) asupan gizi, dan (13) porsi pangan antar anggota rumahtangga.

Peran Penyuluh Pertanian dalam Proksi Desa Mapan

Dalam Proksi Desa Mapan tahun 2010, pendampingan akan dilakukan oleh penyuluh pertanian, dengan harapan penyuluh pertanian dapat memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyuluh pertanian dapat berperan mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, hingga tahap kemandirian.

• Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilaksanakan



dalam kurun waktu satu tahun. Kegiatannya dimulai dari mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan; penetapan desa pelaksana dan penyusunan data base RTM sasaran dan potensi desa. Lebih rinci tugas penyuluh pertanian dalam pendampingan Proksi Desa Mapan khususnya pada tahap persiapan adalah: (a) menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas, kelompok wanita yang berasal dari anggota dasa wisma, lumbung pangan, (b) mengembangkan dinamika kelompok afinitas, (c) membina kelompok-kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif, (d) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok-kelompok afinitas. Sedangkan yang dimaksud

kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kesesuaian antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan faktor sosial budaya setempat.

- **Tahap Penumbuhan**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pada tahap penumbuhan meliputi: a) pemberdayaan masyarakat, b) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan c) pengembangan sarana dan prasarana.

Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian, melaksanakan pelatihan-pelatihan, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

Pada tahap penumbuhan, penyuluh pertanian melakukan pendampingan dengan tujuan: 1) mengembangkan dinamika kelompok afinitas, (2)

menumbuhkembangkan usaha produktif kelompok afinitas, meliputi usaha *on farm*, *off farm*, maupun *non farm*, (3) menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan Percepatan Penganekaragaman Ketahanan Pangan (P2KP) untuk kelompok wanita, usaha tepung-tepungan dan anak SD/MI serta kelompok lumbung pangan masyarakat bersama Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten yang mengacu pada Pedum P2KP dan Pedum Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.

Sebagai pendamping pada Proksi Desa Mapan, penyuluh pertanian juga perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Materi pelatihannya meliputi: (1) pengelolaan Lembaga Keuangan Desa (LKD); (2) penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK); dan (3) pelatihan penunjang lainnya untuk tingkat provinsi, dan pelatihan teknis di tingkat kabupaten/kota.

Disamping itu, dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah rawan pangan, penyuluh pertanian melakukan pendampingan yang materinya tentang: akses informasi, sarana prasarana, teknologi, permodalan, pasar dan lain-lain. Sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait yang dapat memberikan peluang dan

kesempatan berusaha kepada masyarakat.

- **Tahap Pengembangan**

Tahap pengembangan ini merupakan tahapan ketiga pelaksanaan Proksi Desa Mapan. Pada tahap ini penyuluh pertanian diharapkan dapat memfasilitasi kelompok sasaran dalam: (1) penguatan dan pengembangan dinamika dan usaha produktif kelompok afinitas; dan (2) pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usaha tani, dan lain-lain. Disamping itu, pada tahap ini juga diharapkan sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

- **Tahap Kemandirian**

Pada tahapan ini pelaksanaan kegiatan Proksi Desa Mapan sudah berada pada tahun ke empat. Kemandirian kelompok sasaran ditunjukkan dengan adanya : (1) perubahan pola pikir, aktivitas dan perbaikan usaha kelompok-kelompok afinitas yang anggotanya Rumah Tangga Miskin, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan; (2) terdapat perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; (3) berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (4) berfungsinya



lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi dan pemasaran pertanian.

Selain itu tingkat kemandirian pangan juga ditunjukkan oleh: (1) bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai dengan ketersediaan dan kecukupan pangan; (2) kemudahan akses distribusi pangan wilayah; (3) kestabilan harga pangan; (4) serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Selain kemandirian pangan tingkat desa juga diperlukan dukungan program lintas sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat maupun fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta desa sekitarnya.

Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan)

Pada tahun kelima, desa-desa yang telah memasuki tahap kemandirian sudah tidak lagi dibiayai penuh dari anggaran APBN, namun tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan kewenangan pembinaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya desa yang telah mandiri mengembangkan Gema Pangan akan membina tiga desa di sekitarnya (desa replikasi).

Gema Pangan dimaksud adalah upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakatnya agar mampu memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/



Kegiatan Gapoktan dalam mendukung ketahanan pangan

teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat.

Gema Pangan dapat digerakkan melalui lima sub gerakan, yaitu: 1) Penguatan Sumber Daya Sosial; 2) Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam; 3) Menabung Mandiri; 4) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Penyebarluasan Manfaat. Kelima sub gerakan ini dapat dilaksanakan secara parsial sesuai dengan kebutuhan pada fase pertama yaitu gerakan penguatan kelembagaan masyarakat, merupakan fase yang sangat fundamental yang harus dilalui pada tahap awal pengembangan kemandirian pangan.

Gema Pangan ini bertujuan untuk memobilisasi dan membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola aset secara cerdas guna meningkatkan ketahanan pangan

dan gizi dan sekaligus mengurangi kerawanan pangan dan gizi masyarakat sesuai dengan kelembagaan dan budaya lokal.

Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah menetapkan Gerakan Kemandirian Pangan pada 122 Desa Inti dari 366 Desa Plasma, sedangkan sisanya sebanyak 128 Desa masih dalam proses kemandirian pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tahun yang bersamaan, juga dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian terhadap desa yang masih pada tahap kemandirian sebanyak 354 Desa lama dari 180 kabupaten/kota, tahapan pengembangan sebanyak 221 Desa lama dari 201 kabupaten/kota, tahap penumbuhan pada 349 Desa lama dari 275 kabupaten/kota dan pada tahap persiapan yang terdiri dari Desa baru berjumlah 354 unit dan Desa replikasi 366 unit.

Komponen pelaksanaan Gema Pangan meliputi tiga kegiatan pokok. **Pertama**, fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat modal sosial melalui pendampingan oleh tenaga penyuluh pertanian selaku pendamping. Sebagai tenaga pendamping penyuluh pertanian juga ditugaskan untuk memperkuat Tim Pangan Desa (TPD) yaitu lembaga yang oleh masyarakat digunakan sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di perdesaan, agar mampu membangun partisipasi dan memobilisasi

seluruh aset yang ada di desa dalam penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan, baik melalui pengembangan jaringan antar kelompok masyarakat maupun melalui pengembangan usaha produktif kelompok-kelompok afinitas. Kedua, melakukan pendampingan pada masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk membangun usaha produktif. Pada fase ini, fasilitasi pada masyarakat dan pemerintah desa dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi usaha kelompok-kelompok afinitas agar semakin dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Ketiga, pendampingan pada masyarakat untuk mengembangkan surplus yang telah dimiliki oleh masyarakat dan desa untuk menumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) yaitu lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan. Disamping untuk akumulasi surplus, LKD juga dikembangkan untuk membangun partisipasi kelompok masyarakat lainnya yang secara struktural telah memiliki surplus keuangan untuk lebih mengembangkan usaha produktif masyarakat setempat.

Gema Pangan merupakan kelanjutan pelaksanaan Proksi Desa Mapan yang telah dimulai pada tahun 2006. Pada tahap ini, kelompok-kelompok mandiri pangan telah memasuki fase kelima gerakan kemandirian pangan, yaitu sub gerakan penebaran manfaat, dengan menggunakan pendekatan Sekolah Lapangan Kemandirian Pangan (SL-



DMP), yaitu kelompok-kelompok baru dapat belajar/magang di kelompok-kelompok inti (yang telah mandiri), dan selanjutnya kelompok-kelompok mandiri (kelompok inti) berpartisipasi mendampingi kelompok-kelompok baru dengan kesepakatan usaha bisnis yang telah dimulai dalam kelompok inti.

Dengan demikian, maka: 1) kemandirian kelompok inti dapat berkembang secara berkelanjutan; dan 2) kelompok inti mampu mengembangkan kemampuannya kepada kelompok masyarakat lain, baik di dalam desanya maupun di luar desa (desa tetangganya). Keadaan ini dapat tercapai bila peran penyuluh pertanian dalam memfasilitasi dan membimbing kelompok sasaran Proksi Desa Mapan berjalan dengan optimal. Untuk itu, penyuluh pertanian perlu ditingkatkan kembali kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan secara terstruktur dengan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan.

(I Wayan Ediana)



Padi Organik

MANDIRI DENGAN PADI ORGANIK

Memasuki abad 21 banyak keluhan masyarakat tentang berbagai penyakit antara lain stroke, penyempitan pembuluh darah dan pengapuran yang disebabkan oleh pola makan yang kurang sesuai dengan kebutuhan tubuh, bahan makanan yang diolah dengan tambahan bahan kimia, berkembangnya budaya petani yang menggunakan pestisida kimia dengan dosis dan frekuensi yang berlebih sehingga menghasilkan makanan yang dapat meracuni tubuh

konsumen. Untuk itu diperlukan inovasi teknologi budidaya pertanian yang dapat menghasilkan produk pangan yang aman untuk kesehatan dan aman terhadap lingkungan, serta berdampak pada keberlanjutan usaha pertanian. Salah satu inovasi teknologi yang dapat menjawab keperluan tersebut adalah bertani dengan sistem pertanian organik. Pertanian organik dapat dimaknai sebagai suatu sistem produksi pertanian yang menghindari atau mengesampingkan penggunaan

senyawa sintetik baik untuk pupuk, zat tumbuh, maupun pestisida. Sedangkan yang dimaksud sistem pertanian organik adalah sistem produksi holistik dan terpadu, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami serta mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan.

Di masa lalu petani sudah menerapkan sistem pertanian organik dengan cara melakukan daur ulang limbah organik sisa hasil panen yang digunakan sebagai pupuk. Sejak berkembangnya Revolusi Hijau pada tahun 1970, yang mengutamakan penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk meningkatkan produksi pertanian, namun dalam jangka panjang telah menyebabkan kerusakan pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang dapat mengakibatkan meluasnya lahan kritis dan marginal. Disamping itu dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia menimbulkan residu pada produk pertanian yang berbahaya bagi kesehatan.

Pertanian organik semakin mendapat perhatian dari sebagian masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang, khususnya mereka yang sangat memperhatikan kualitas kesehatan, baik kesehatan manusia maupun lingkungan. Produk pertanian organik diyakini dapat menjamin kesehatan manusia maupun lingkungan, karena dihasilkan melalui proses produksi yang berwawasan lingkungan.

Prinsip Pertanian Organik

Pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Berdasarkan sistem dan siklus ekologi kehidupan; 2) Bekerja meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan; 3) Melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 4) Membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama; 5) Memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan; 6) Keadilan, memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

Persyaratan Teknologi Pertanian Organik

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pertanian organik yaitu sumberdaya lahan, benih, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu (OPT) secara terpadu, dan pola tanam.

1) Sumberdaya lahan

Untuk pertanian organik, lahan yang digunakan harus bebas dari bahan kimia sintetis (pupuk dan pestisida). Bila lahan tersebut pernah digunakan untuk pertanian non organik (konvensional), harus dikonversi ke lahan organik secara bertahap selama 1-2 tahun untuk tanaman musiman dan 3 tahun untuk tanaman



Beras Organik Produk Petani

keras. Lokasi untuk pertanian organik harus dipilih yang strategis, yaitu mudah dijangkau, keamanan terjamin, tersedia sumber air.

2) Benih

Benih untuk budidaya pertanian organik adalah benih terpilih hasil dari produk pertanian organik, tidak boleh berasal dari produk rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism/GMO*). Apabila tidak tersedia benih dari pertanaman organik, benih konvensional dapat digunakan dengan batasan tertentu, misalnya sebelum ditanam benih tidak diperlakukan dengan senyawa kimia. Tersedianya varietas unggul tahan OPT tertentu, yang dihasilkan melalui pemuliaan konvensional akan mendukung pertanian organik secara signifikan. Artinya dengan menggunakan varietas tahan, akan mengurangi risiko serangan OPT sehingga penggunaan pestisida kimia dapat dihindari.

3) Pemupukan

Salah satu aplikasi dari prinsip pertanian berwawasan lingkungan adalah mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lahan, termasuk biodiversitas, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, melalui penggunaan pupuk alami hasil dekomposisi mikroba. Sumber-sumber bahan organik yang tersedia di lokasi perlu dioptimalkan penggunaannya. Beberapa jenis sumber bahan organik yang umum dimanfaatkan sebagai pupuk adalah : (a) Limbah dan residu tanaman, seperti jerami dan sekam padi, gulma, batang dan tongkol jagung, semua bagian vegetatif tanaman, batang pisang, sabut kelapa, (b) Limbah dan residu ternak, seperti kotoran padat, limbah ternak cair, limbah pakan ternak, tepung tulang, cairan proses biogas; (c) Pupuk hijau, seperti terano, mikroriza, turi, lamtoro, centrosoma, dll; (d) Tanaman air, seperti azola, ganggang hijau, rumput laut, enceng gondok, gulma air; (e) Penambat nitrogen, seperti mikroorganisme, mikroriza, rhizobium, biogas; (f) Limbah industri seperti serbuk gergaji, blotong, kertas, ampas tebu, ampas kelapa sawit, limbah pengalengan makanan, limbah pemotongan hewan; (f) Limbah rumah tangga, seperti sampah dapur dan pemukiman.

4) Pengendalian OPT secara terpadu

Dalam pertanian organik, pengendalian OPT dilakukan secara terpadu diantaranya dengan menanam varietas tahan, pemanfaatan musuh alami, agen hayati, serta perbaikan pola tanam.

5) Pola Tanam

Setiap sistem pertanaman mempunyai kelebihan tersendiri, namun apapun sistem pertanaman yang akan diadopsi harus bersifat sinergis, baik terhadap tanaman utama maupun tanaman lainnya. Secara umum penerapan pola tanam diharapkan akan meningkatkan produksi tanaman utama, menambah kesuburan tanah, mengurangi resiko kegagalan akibat OPT, dan meningkatkan hasil usahatani.

Pengalaman lapangan dalam berusaha tani padi organik

Produk pertanian organik dapat menjamin kesehatan manusia maupun lingkungan, karena dihasilkan melalui proses produksi yang berwawasan lingkungan. Namun apakah dengan bertani secara organik pendapatan petani dapat meningkat.

Pengalaman Bapak Marsilan yang tiga tahun lebih sebagai petani padi organik dari Desa Tong Blau Korong Kasai, Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariman – Sumatera Barat telah membuktikan bahwa beras organik yang dihasilkan harganya sekitar 40% di atas harga beras biasa karena telah mendapat sertifikasi sebagai pangan organik dari instansi yang berwenang. Dengan bertani padi organik beliau bahkan dapat ber-swadaya dalam pengadaan input produksi seperti pupuk, pestisida dan benih, karena dengan teknologi pertanian organik, beliau berhasil memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitarnya untuk menghasilkan pupuk organik, pestisida organik dan benih padi organik.



Pembuatan pupuk organik/kompos
Sumber: kompakkodep.blogspot.com/2008/10/

Pengadaan benih padi organik

Benih padi organik yang digunakan berasal dari benih sendiri dengan varietas padi unggul lokal “anak daro” dengan umur tanam 120 s/d 125 hari, dan produktivitasnya mencapai 7 ton GKP/ha atau 4,1 ton beras organik/ha. Pada musim tanam berikutnya benih diambil dari hasil panen padi sebelumnya dengan cara tiga hari sebelum panen dilakukan pemilihan rumpun padi yang buahnya seragam dan lebat, kemudian dipanen dan dirontokan, dikeringkan, disimpan dalam suhu kamar selama 15-17 hari. Sebelum ditanam benih dicelupkan kedalam larutan air garam dengan konsentrasi optimum (konsentrasi garam dalam air dikatakan optimum bila dicelupkan telur ayam/ bebek dan telurnya mengapung). Benih yang mengapung dalam larutan air garam tersebut dibuang dan benih yang tenggelam dapat langsung ditanam

atau dikeringkan kembali untuk ditanam kemudian hari.

Pembuatan pupuk organik

Pembuatan pupuk organik diawali dengan pembuatan dekomposer (mikroorganisme pengurai) dengan cara pembiakan MOL (mikro organisme lokal). Dekomposer dicampur dengan bahan organik yang ada disekitarnya seperti limbah pertanian, limbah ternak dan pupuk hijau terutama yang banyak mengandung protein seperti daun lamtoro dan daun turi, kemudian disebarkan dilahan sawah bertepatan dengan pengolahan tanah tahap kedua, sehingga dekomposer dan bahan organik tersebut dapat merata bercampur dengan tanah sawah,

Tanah sawah yang bercampur dengan dekomposer dan bahan organik tersebut didiamkan selama 21 hari dan siap untuk ditanami bibit padi.

Cara membuat dekomposer dari MOL (mikro organisme lokal)

Untuk membuat dekomposer digunakan alat yang berupa bambu satu ruas dan dibelah dua, sendok/alat pengaduk, toples/ember dan timbangan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah beras, gula merah dan air. Adapun langkah pembuatannya sebagai berikut : 1) Beras dijadikan nasi kemudian didinginkan dan dimasukkan dalam bejana bambu, diletakan di bawah pohon yang rindang ditutupi dedaunan kering agar bila hujan tidak terkena air hujan, dan biarkan selama tiga hari, 2) Setelah tiga hari bejana bambu diangkat, hasilnya adalah MOL generasi satu, 3) MOL generasi satu dicampur dengan gula merah yang

telah diiris dengan perbandingan 1: 1 dan disimpan dalam toples/ember dan ditutup, dibiarkan selama 3 hari akan menjadi MOL generasi dua, 4) MOL generasi dua dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 : 5, dan siap dipakai sebagai dekomposer (penghancur/pengurai bahan organik) atau disimpan untuk pemakaian mendatang.

Aplikasi Dekomposer

Dekomposer dilarutkan kedalam air dengan perbandingan 1:10 dan disiramkan pada bahan organik yang akan dijadikan kompos. Untuk penyemprotan dapat langsung ke tanah atau ketumbuhan sebagai perangsang tumbuh dengan perbandingan 1 : 20 (satu liter untuk satu tangki air)

Pengolahan lahan dan pemupukan

Pengolahan tahap pertama; lahan diberi air, tutup pintu-pintu pelepasan air yang ada, kemudian lahan dibajak dan biarkan selama 10 – 15 hari. Pada pengolahan tanah tahap pertama ini usahakan air tidak melimpah untuk menghindari terbuangnya larutan humus tanah.

Pengolahan tahap kedua; tebar bahan organik yang telah dicampur dengan dekomposer bersamaan dengan pengolahan tanah. Ratakan tanah kemudian buat aliran drainasie atau parit kecil di sekeliling petakan sawah untuk mempermudah pengairan dan pengeringan berikutnya. Biarkan lahan yang bercampur dengan pupuk organik tersebut selama 21 hari, dan siap ditanami bibit. Keringkan lahan 1 – 2 hari sebelum tanam.

Pemupukan dilakukan hanya sekali yaitu

bersamaan dengan pengolahan lahan tahap kedua, tidak ada pemupukan susulan, kecuali pada sebagian lahan dimana terdapat sekelompok rumpun padi yang pertumbuhannya kurang baik, maka dipupuk dengan penyemprotan dekomposer.

Penanaman

Bibit ditanam pada umur 8 – 12 hari, ditanam pada kedalaman 1 – 1,5 cm dan perlubangnya ditanam 1 - 2 rumpun bibit jarak tanam 20 – 30 cm, sistem tanam jajar legowo.

Pengendalian gulma, hama dan penyakit

Penyiangan gulma pertama dilakukan pada umur padi 12 – 15 hari, lahan dibersihkan dengan menggunakan alat landak. Penyiangan gulma kedua pada umur padi 30 – 35 hari atau 20 hari setelah penyiangan pertama.

Hama yang dominan yang menyerang padi adalah mati penggerek batang/pucuk, kepinding tanah, walang sangit. Penyakit yang banyak dijumpai adalah penyakit blas/patah kuduk. Penggerek batang dikendalikan dengan membuang telur kupu-kupu penggerek yang berada dipersemaian. Untuk kepinding tanah, walang sangit dan penyakit lainnya dikendalikan dengan penyemprotan pestisida organik yang dibuat dari daun-daun berbau menyengat seperti daun pinang, sereh, sirih,dll, Daun-daun ini ditumbuk halus dan dicampur air, kemudian disemprotkan ditempat yang terserang hama/penyakit.

Panen dan pasca panen

Penentuan waktu panen ditandai dengan bulir padi berwarna kuning merata, ambil

satu tangkai padi kemudian diremas, jika rontok diatas 90 % adalah waktu yang tepat untuk panen. Panen dilakukan dengan menggunkan sabit. Perontokan dengan cara digebot dan pengeringan dengan sinar matahari s/d kadar air 13 – 15 %. Penggilingan dengan mesin penggiling milik kelompok tani yang merupakan bantuan dari dinas pertanian. Setiap anggota kelompok yang akan menggiling padinya dikenakan biaya operasional dan pemeliharaan mesin dan sumbangan untuk kas kelompok. Pengemasan dengan menggunakan kantong pelastik bening ukuran untuk 5 kg atau besarnya tergantung permintaan. Pada kemasan sudah dicantumkan logo bahan pangan organik, ini menunjukkan bahwa beras yang dihasilkan sudah disertifikasi sebagai bahan pangan organik dari instansi berwenang. Beras yang sudah dikemas disimpan diruangan yang sejuk dan kering.

Pemasaran

Beras organik yang telah dikemas tersebut dipasarkan kepada pelanggan yaitu pemborong yang secara berkala membeli beras dalam jumlah tertentu. Disamping itu beras juga dijual melalui koperasi dan langsung ke konsumen. Beras organik yang telah bersertifikat ini dapat dijual dengan kisaran harga Rp 9000 s/d Rp 10.000/kg (harga borongan Rp 9000/kg dan harga eceran Rp 10.000/kg), sementara beras biasa harga eceran hanya sekitar Rp 6.000 atau ada peningkatan nilai jual sekitar 40 %.

Pembelajaran

Pengalaman Marsilan bertani padi organik

dapat dijadikan contoh pembelajaran dalam hal : Sistem pertanian organik yang dilaksanakannya telah memenuhi persyaratan teknologi pertanian organik sehingga beras yang dihasilkan mendapat sertifikasi sebagai pangan organik dari instansi yang berwenang, keswadayaan dalam pengadaan benih padi organik, keswadayaan dalam pengadaan pupuk organik, keswadayaan dalam membuat dekomposer, dan keswadayaan dalam pengadaan pestisida organik.

Dengan bertani padi organik ini, produktivitas dapat mencapai 7 ton GKP/ha atau 4,1 ton beras organik/ha, hal ini merupakan capaian produksi yang dapat dikategorikan cukup tinggi, Disamping

itu nilai jual beras organik yang dihasilkan lebih tinggi sekitar 40% dari beras biasa/non organik, keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan. Secara rinci perhitungan sederhana budidaya padi organik untuk satu hektar sawah dapat dilihat pada box.

Bertani padi organik dapat mempercepat tercapainya program ketahanan pangan yaitu melalui ketersediaan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu dengan bertani padi organik berarti turut serta berupaya menghasilkan produk pangan yang aman untuk kesehatan dan aman terhadap lingkungan, serta berdampak pada keberlanjutan usaha pertanian. (Marwati)

Tabel Perhitungan sederhana budidaya padi organik untuk satu hektar sawah.

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|-------------|
| Pengeluaran | 24.610.000 |
| Pengolahan tanah dua tahap (sewa mesin) | 1.400.000 |
| Benih 10 kg @ Rp 7000 | 70.000 |
| Pemupukan 5 HOK @ Rp 50.000 | 250.000 |
| Pengendalian hama dan penyakit 1 HOK @ Rp 50.000 | 50.000 |
| Pengairan 3 HOK @ Rp 50.000 | 150.000 |
| Cabut benih dan tanam @ Rp 16 HOK @ Rp 40.000 | 640.000 |
| Pengendalian gulma 4 HOK @ Rp 50.000 | 200.000 |
| Pengamatan mingguan 16 HOK @ Rp100.000 | 1.600.000 |
| Perencanaan dalam usahatani 1 HOK | 200.000 |
| Pemupukan 1 HOK bila diperlukan | 50.000 |
| Ongkos panen dan perontokan Rp.30.000 /karung diperkirakan 120 karung | 3.600.000 |
| Kemasan yang berlogo bahan pangan organik 8200 lembar @ Rp 2000 | 16.400.000 |
| Pendapatan : Penjualan 4100 kg beras organik @ Rp 9000 | 36.900.000 |
| Laba | 12.290.000 |

Kakao siap panen

Sumber: www.ternak.kakasa.co.id/2009/05/...img.html

PELUANG BERSWADAYA MELALUI KAKAO

Limbah kakao dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan pupuk organik yang dapat memberikan nilai tambah dalam budidaya kakao. Hal ini sudah dilakukan Mansur Ulum petani muda dari kelompok tani Suko Makmur, kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah.

Bermula pada tahun 2000 dengan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.25.000.000, untuk membeli lahan 1,50 ha yang dimanfaatkan untuk kebun kakao, seluas 1,25 ha ditanami 1500 pohon kakao dan sisanya untuk pembibitan kakao.

Usaha kakao

Mansur menekuni usaha kakao

karena memang senang di dunia pertanian, sehingga setelah lulus SLTA, dia memilih sebagai pekebun. Setelah 7 tahun mengelola kebun, sudah bisa menghasilkan keuntungan bersih Rp. 15.255.250,- Selanjutnya tahun 2008, memberikan keuntungan Rp. 21.848.750,-, dan tahun 2009 menghasilkan keuntungan Rp.28.342.500,- itu belum termasuk hasil dari pengolahan pupuk organik maupun pakan ternak yang terbuat dari kulit buah kakao. Secara rinci perhitungan sederhana yang dilakukan oleh M Mansur Ulum dalam membudidayakan kakao dapat dilihat pada box.

Sedangkan usaha persemaian bibit kakao sudah ditekuni sejak tahun 2003



Bibit Kakao Umur 3 - 5 bulan

Sumber : www.itrademarket.com/MTM_cocoa/5..ulan.htm

sampai sekarang. Dari lahan seluas 0,25 ha yang ditanami bibit kakao sebanyak 20.000 batang, ternyata mampu menghasilkan Rp.25 450.000,-. Secara rinci perhitungan sederhana yang dilakukan oleh M Mansur Ulum dalam usaha persemaian bibit kakao dapat dilihat pada box.

Pengolahan limbah kakao

Untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola usaha tani berbagai kegiatan pelatihan telah diikutinya antara lain ; 1) Pelatihan kewirausahaan; 2) Pelatihan pengelolaan lahan dan air; 3) SLPHT; 4).SLPHT kakao;5).Pelatihan Agribisnis; 6).Pelatihan Teknis Pengelolaan Air; 6).Pelatihan sambung samping tanaman kakao; 7).Pelatihan Teknologi Spesifik lokasi; 8).Pelatihan pembuatan pakan ternak; 9).Pelatihan pembuatan jamur tiram.

Dari beberapa pelatihan yang diikuti, M Mansur Ulum mengetahui limbah kakao memiliki kandungan zat yang sangat berguna untuk menyuburkan tanaman. Dengan pengetahuan yang

didapat muncullah hasratnya untuk memanfaatkan limbah kakao sebagai pupuk organik yang dapat menggantikan pupuk kimia yang dirasakan langka dan mahal. Selain itu pupuk organik limbah kakao merupakan pupuk yang ramah lingkungan dan dapat mendukung usahatani yang berkelanjutan. Keunggulan dari pemanfaatan pupuk organik dari limbah kakao adalah adanya unsur nutrisi khususnya Potassium Clorida (KCl), Nitrogen (N), dan unsur mikro lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dengan menggunakan pupuk organik dari limbah kulit kakao, tanaman kakao Pak Mansur menjadi lebih subur dan produktivitasnya tinggi.

Pembuatan pupuk organik dari kulit kakao telah dilakukan mulai tahun 2006 sampai sekarang. Bahan yang ia gunakan antara lain: kulit buah kakao, pupuk kandang, gula pasir, dedak halus dan daun-daunan. Pupuk yang dihasilkan tidak dijual tetapi dipakai sendiri, dengan demikian dapat menekan biaya pengeluaran untuk pembelian pupuk senilai Rp. 1.339.000,- dengan rincian perhitungan sederhana yang dilakukan



Pengolahan limbah kulit kakao

(sumber: citizenimages.kompas.com/citizen...ik-19294)

Rincian Penghitungan Sederhana Usaha Pembibitan Kakao (20.000 batang)

| Uraian | Jumlah dalam rupiah |
|--|---------------------|
| Pengeluaran | 14.550.000 |
| 1. Biaya persiapan | 1.300.000 |
| a. Semai lahan | 200.000 |
| b. Pembersihan lahan | 100.000 |
| c. Bambu bahan para-para | 500.000 |
| d. Pemotongan bambu | 50.000 |
| e. Membuat lubang tiang | 50.000 |
| f. Membeli dahan kelapa | 250.000 |
| g. Ongkos angkutan dahan kelapa | 150.000 |
| 2. Biaya operasional | 10.550.000 |
| a. Pelaksanaan pengadukan lahan semai | 1.000.000 |
| b. Pengisian polibag | 1.000.000 |
| c. Tenaga kerja penataan polibag | 1.000.000 |
| d. Perawatan | 5.250.000 |
| e. Tenaga kerja naik-turunkan saat penjualan | 1.000.000 |
| 3. Angka Kegagalan 1% \times 20.000 = 2000 \times 2000 | 4.000.000 |
| Penerimaan dari penjualan hasil | 40.000.000 |
| Laba | 25.450.000 |

Rincian Perhitungan Sederhana Pembuatan Pupuk Organik dari Limbah Kulit Kakao

| Uraian | Jumlah dalam rupiah |
|--|---------------------|
| Pengeluaran | 1.066.000 |
| 1. Peralatan | |
| a. Satu cngkul Rp.20000 | 20.000 |
| b. Plastik bungkus 18kg @Rp.20000 | 160.000 |
| c. Staples 5 bungkus @Rp1000 | 5.000 |
| d. solar 5 liter @Rp5000 | 25.000 |
| 2. Bahan | |
| a. 8 ton kulit kakao | 200.000 |
| b. Pupuk kandang 8Kg@Rp200 | 160.000 |
| c. Gula pasir 2 Kg @Rp7000 | 14.000 |
| d. Dedak halus 8 kg@Rp1500 | 12.000 |
| 3. Tenaga kerja | |
| a. Penggilingan 8ton @Rp25 | 200.000 |
| b. Penjemuran 3hrx2hr@Rp25000 | 150.000 |
| c. Pengepakan | 48.000 |
| d. Perlebelan | 48.000 |
| e. Penumpukan | 24.000 |
| Penerimaan dari penjualan hasil (pupuk organik) | 2.405.000 |
| Laba | 1.339.000 |

Perhitungan Sederhana Pembuatan Pakan Ternak

| Uraian | Jumlah dalam rupiah |
|--|---------------------|
| Pengeluaran | 2.297.500 |
| 1. Bahan-bahan | |
| a. Onggok 400kg@Rp500 | 200.000 |
| b. Rumput gajah 400kg@ Rp200 | 80.000 |
| c. Limbah ikan asin 200kg @ Rp2000 | 400.000 |
| d. Kulit buah kakao 8000 kg@Rp25 | 200.000 |
| e. Bekatul 200kg@Rp1500 | 300.000 |
| 2. Peralatan | |
| a. Cangkul @Rp20000 | 20.000 |
| b. Ayakan@Rp2500 | 2.500 |
| c. Beli Solar 5 liter@Rp5000 | 25.000 |
| d. Mineral 100bungkus@Rp4000 | 400.000 |
| 3. Proses | |
| a. Tenaga Kerja 4hrx2orang@Rp25000 | 100.000 |
| b. Ongkos giling4ton@Rp25000 | 100.000 |
| c. Penjemuran 3hrx2 orang@Rp.25.000 | 250.000 |
| 4. Pengemasan | |
| a. Pengemasan dalam karung untuk 108 karung @Rp2000 | 216.000 |
| b. Biaya pengangkutan @Rp1000 | 108.000 |
| 5. Pengumpulan 108 karung@Rp250 | 45.000 |
| c. Penerimaan dari penjualan 108 karung pakan | 4.400.000 |
| d. Saldo | 2.102.500 |



Umbi Garut

SENTUHAN TEKNOLOGI TANAMAN GARUT DAPAT MENAMBAH PENDAPATAN PETANI

Tanaman Garut (*Marantha arundinacea* L) termasuk familia Marantaceae yang kita kenal selama ini rupanya memiliki khasiat bagi manusia antara lain melancarkan buang air besar, aman dikonsumsi bagi penderita kencing manis dan asam urat serta mempunyai nilai tambah pendapatan keluarga dari hasil olahannya berupa emping garut yang sudah dinikmati oleh petani Gunung Kidul.

Beberapa tahun silam sebutan Gunung Kidul yang terbayang adalah daerah tandus, panas, kekeringan yang hidup dalam balutan kemiskinan. Namun saat ini semuanya sudah berubah masyarakatnya mampu berperan aktif merespon pembangunan pertanian. Walhasil Gunungkidul kini mampu bangkit dengan potensi pertanian yang menghasilkan kacang tanah, jagung, padi

tadah hujan maupun padi sawah dengan air irigasi yang berasal dari penampungan air embung yang ada di beberapa titik lokasi sebagai sumber mata air. Sarana jalan untuk pengangkut hasil pertanian dan transportasi sudah menembus sampai ke pedalaman hingga kelokasi usahatani berupa jalan betonisasi.

Semangat masyarakat Gunung Kidul untuk lebih memajukan potensi wilayahnya terus berkembang, sejak tahun 2006 mendapat bantuan bimbingan Penyuluh Pertanian BPTP Yogyakarta yang sampai sekarang terus melakukan penanaman garut. Alasan memilih budidaya tanaman garut karena dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dan mudah untuk diusahakan. Melihat alasan masyarakat inilah yang membuat bapak Kanijo sebagai Kepala Desa Semin pada tahun 2007 mengintruksikan program "Garutisasi" kepada masyarakatnya dengan melakukan penanaman tanaman garut di kebun maupun dipekarangan rumah. Rata-rata setiap kepala keluarga di desa Semin menanam tanaman garut seluas 20 -50 meter persegi yang ditanam dibawah tanaman jati, tanaman mete atau tanaman lainnya. Garutisasi ini juga dilakukan oleh kepala desa dengan menanam tanaman garut yang tampak tumbuh subur dipekarangan rumahnya.

Dusia ke 60 tahun Kepala Desa Semin masih bersemangat bercerita tentang garutisasi didesanya, semula tanaman garut merupakan tanaman yang tidak dilirik dan dibiarkan tumbuh disembarang tempat. Pada saat diperlukan saja baru

dicari seperti dibuat lem untuk layang layang, atau untuk pakan ternak apabila rumput sulit didapat. Namun semuanya jadi berubah setelah adanya sedikit sentuhan teknologi dari BPTP Yogyakarta. Ungkapan cerita yang disampaikan Kepala Desa Semin ini juga didukung oleh Ir. Murwati MS penyuluh pertanian BPTP Yogyakarta sebagai pendamping teknologi. Teknologi tanaman garut yang disampaikan kepada masyarakat desa Semin tidak terlalu sulit yaitu penggunaan bibit garut varietas unggul Sembowo yang berasal dari daerah Bantul, teknologi pemupukan dan pemanenan serta teknologi pengolahan garut yang dilengkapi dengan pembekalan berupa pelatihan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Materi teknologi yang disampaikan dalam pelatihan meliputi teknik menanam garut yang benar, memupuk tanaman garut dengan pupuk kandang/kotoran sapi, teknik memanen umbi garut tanpa merusak tanaman garut, teknologi pengolahan garut menjadi emping dan pati garut yang dilengkapi dengan materi analisa usaha



Pak Kasmu dan Tanaman Garutnya



Bu Suratin sedang membuat emping garut

dan pemasarannya.

Kelompoktani Ngudi Rukun menjadi perintis penanaman garut setelah mendapatkan sentuhan teknologi dari BPTP Yogyakarta, Pak Kasmu sebagai ketua kelompok Ngudi Rukun bersama 31 anggota lainnya melakukan penanaman awal tanaman garut dengan luas penanaman rata-rata 200 meter persegi perkepala keluarga. Kemudian dari tahun ketahun mengalami perkembangan menjadi 117 kepala keluarga dengan cakupan luasan mencapai 300 meter persegi yang tersebar di beberapa lokasi. Dalam mengusahakan tanaman garut Pak Kasmu dibantu oleh anaknya Supriyadi, terutama pada saat musim panen yaitu

pada akhir bulan Juli sampai akhir bulan September, artinya tiga bulan musim panen diperlukan tenaga kerja tambahan. Panen tanaman garut dilakukan sekali setahun, dengan pemberian pupuk kandang sapi yang diberikan sekali. Setelah panen selesai, sebanyak 150 kilogram untuk luasan 300 meter persegi. Dengan luasan tersebut Pak Kasmu dapat panen umbi garut sebanyak 150 kilogram. Umbi garut yang sudah dipanen selanjutnya diserahkan kepada istri Pak Kasmu dan menantunya Ibu Suratin untuk diolah menjadi emping garut. Bu Suratin dan istri Pak Kasmu juga bergabung sebagai anggota kelompok wanita tani yang bergerak di bidang pengolahan emping garut dan pati garut.

Tanaman Garut

Budidaya tanaman garut tidak sulit, dengan sekali tanam dapat dipanen berulang-ulang setiap tahun dan dapat menambah pendapatan keluarga. Untuk mengenal lebih jauh tanaman garut, dapat disimak diskripsi dan syarat pertumbuhan garut sebagai berikut

Tanaman garut merupakan tanaman tahunan, bentuk herba, tegak, berumpun. Tinggi tanaman mencapai 1,0 – 1,5 meter, dengan batang berdaun dan mempunyai percabangan menggarpu. Tanaman garut dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dan ketinggian tempat serta dibawah naungan. Tanaman garut ditanam pada ketinggian 60 – 900 meter dari permukaan laut, tumbuh normal di daerah tropis dengan curah hujan sekitar 1.500 – 2.000 mm/th. Selain itu tanaman garut

lebih suka tumbuh pada tanah yang relatif lembab dan terlindung. Apabila tanaman garut sudah tumbuh dengan subur, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan berlangsung dengan cepat. Akar garut atau dikenal dengan umbi garut berwarna putih, panjang mencapai 10 – 30 cm, diameter 2 – 5 cm dan dibungkus oleh daun-daun sisik yang berwarna kecoklatan.

Manfaat dan Teknologi Pengolahan Garut

Nilai tambah tanaman garut dihasilkan dengan mengolah umbi garut menjadi emping garut dan pati garut. Hasil pengkajian BPTP Yogyakarta yang dilakukan oleh Djaafar dan Rahayu tahun 2002, diperoleh informasi bahwa emping garut mengandung air (11,6 %), serat kasar (1,91%), protein (13,72 %), lemak (0,88 %) dan tidak mengandung kolesterol. Umbi garut segar mempunyai kandungan pati 20 -35 %. Selain banyak mengandung pati/karbohidrat, garut juga memiliki manfaat untuk kesehatan terutama bagi penderita kencing manis yakni penyakit yang disebabkan tingginya kadar gula darah. Umbi garut memiliki indeks glisemik rendah (14) jika dibandingkan dengan indeks glisemik pada umbi lain yang tinggi seperti gembili (90), kimpul (95), ganyong (105) dan ubi jalar (179), (Marsono,2000). Indeks glisemik merupakan ukuran yang menyatakan kandungan gula darah setelah seseorang mengonsumsi makanan. Semakin tinggi indeks glisemik berarti semakin tidak baik.

Teknologi pembuatan emping garut tergantung pada emping yang akan diha-

silkan. Olahan emping menghasilkan dua rasa yaitu emping garut tanpa rasa (tawar) dan emping garut rasa bawang atau rasa ebi. Cara pengolahan emping garut sebagai berikut :

- A. Emping garut tanpa rasa atau tawar.
 1. Dilakukan dengan pengupasan dan pencucian umbi garut sampai bersih.
 2. Umbi garut yang dijadikan emping adalah bagian tengahnya. Potong umbi bagian pangkal dan ujung kurang lebih sepelempat bagian (hasil potongan pangkal dan ujung dapat dimanfaatkan menjadi pati garut). Selanjutnya bagian tengah dipotong melintang setebal kurang lebih 1 ruas garut.
 3. Perebusan, dilakukan sampai lunak selama 30 menit atau tergantung dari banyaknya bahan yang direbus.
 4. Garut yang telah direbus selanjutnya dipipihkan. Caranya, letakkan potongan umbi garut satu persatu diatas plastik, kemudian umbi garut ditutup dengan plastik agar tidak lengket jika dipukul (dipipihkan). Selanjutnya dipukul dengan alat pemukul yang terbuat dari besi atau kayu .
 5. Penjemuran menggunakan alas lembaran plastik. Setelah agak kering, emping terlepas dari plastik kemudian dipindahkan ke nyiru atau para-para untuk

Tabel 1. Analisa Sederhana Pembuatan Emping Garut Tawar, 2009

Dalam 100 kg umbi garut dapat dikerjakan dalam 1 hari oleh 10 orang

Rendemen pati 5% = 5 kg

Rendemen emping 20% = 20 kg

| No. | Uraian | Satuan | Harga Per Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-----------|-----------------------|-------------|
| 1 | Selama panen (Juni s/d Oktober 2009) dikerjakan 10 orang yang tergabung dalam kelompok usahatani Manfaati | | | |
| A. | Modal Bahan umbi | 100 kg | 1100 | 110.000 |
| | Jumlah | | | 110.000 |
| B | Biaya | | | |
| 1. | Sarana produksi | | | |
| | • Kompor gas | 1 bh | 200.000 | 200.000 |
| | • Tabung gas | 1bh | 150.000 | 150.000 |
| | • langsen | 1 bh | 75.000 | 75.000 |
| | • Para-para | 5bh | 20.000 | 100.000 |
| | • Pemukul | 2bh | 30.000 | 60.000 |
| | • Plastik | 5m | 6.000 | 30.000 |
| | Jumlah | | | 615.000 |
| | Umur ekonomis 1000x produksi | | | |
| | Biaya tiap hari produksi (jumlah 1) | | | 615 |
| 2. | Bahan pendukung | | | |
| | • Isi gas 3 kg Rp. 15.000,- (3 x produksi) | 1 paket | 5.000 | 5.000 |
| | • Plastic pengemas emping | 36 lembar | 150 | 5.400 |
| | Jumlah (2) | | | 10.400 |
| 3. | Tenaga kerja (0.5 hari) 10 orang | | 10.000 | 100.000 |
| | Jumlah (3) | | | 100.000 |
| | Jumlah B (1-3) | | | 111.015 |
| | Total biaya (A+B) | | | 221.015 |
| C. | Pendapatan | 20 kg | 22.000 | 440.000 |
| | Pati garut | 5kg | 15.000 | 75.000 |
| | Jumlah (c) | | | 515.000 |
| D | Keuntungan | | | 293.985 |
| | R/C | | | 2.33 |
| | B/C | | | 1.33 |

tani, emping garut hasil olahan ibu Suratin banyak diminati tidak hanya laku di pasar sekitar desa dan pasar di tingkat kecamatan, tetapi juga konsumen yang ada diluar propinsi Yogyakarta. Dijelaskan lebih lanjut oleh kepala desa Semin dan ketua kelompok tani Ngudi Rukun, bahwa umumnya emping garut digunakan untuk melengkapi sajian menu hajatan atau pesta.

Untuk mengawetkan emping garut dan menjaga kualitas dalam pemasaran emping garut, BPTP Yogyakarta menganjurkan pada petani untuk mengemas emping garut dalam kemasan/bungkus plastik ukuran 0,25 kg, 0,5 kg dan 1 kg dengan ketebalan plastik 0,8 mm, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam transportasi dan pendistribusiannya. Untuk menarik minat konsumen pada kantong plastik sebaiknya diberikan label.

Pemasaran emping garut di kelompok tani Ngudi Rukun dilakukan secara berantai dimulai dari anggota kelompok tani yang membuat emping garut kemudian menjual mentah pada kelompok tani dengan harga Rp 15.000 – Rp 20.000 per kilogram. Kelompok tani melakukan grading/ pengelompokan berdasarkan ukuran dan dilanjutkan dengan pengemasan dan pelabelan selanjutnya emping garut siap untuk dipasarkan ke pasar lokal maupun ke pemesan dengan nilai jual untuk emping garut mentah Rp 20.000 – Rp 25.000 per kilogram dan emping garut yang sudah digoreng dijual dengan harga Rp 25.000 – Rp 30.000 per kilogram.

Melihat nilai tambah yang dinikmati petani dalam menanam tanaman garut menjadikan pak Kasmu bersemangat dan optimis untuk memperluas areal tanaman garutnya, begitu juga dengan pak Kanijo selaku kepala desa Semin juga meyakini dimasa depan desanya akan menjadi daerah penghasil produksi emping garut yang terbaik dan terbesar di Gunungkidul.

Dengan bimbingan teknologi yang intens oleh para peneliti BPTP Yogyakarta serta para penyuluh pertanian, tidak mustahil impian pak Kasmu dan kepala desa Semin yang ingin menjadikan desanya sebagai penghasil emping dan pati garut yang terbaik dan terbesar di Gunung Kidul menjadi kenyataan. Hal ini akan terjadi bila petani dan masyarakat umumnya dapat menerima olahan umbi garut yang berupa emping dan pati garut sebagai salah satu sumber karbohidrat non beras, sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Untuk itu, sangatlah tidak mudah merubah pola pikir masyarakat khususnya petani diperdesaan yang semula tidak tahu manfaat garut - menjadi tahu bahwa garut yang semula merupakan tanaman umbi yang tidak berharga, dengan sentuhan teknologi lokal melalui penyuluhan, mampu merubah garut sebagai tanaman yang berharga dan bermanfaat.

BPTP Yogyakarta telah melakukan perhitungan ekonomis analisa usaha pembuatan emping Garut dan Pati Garut di tahun 2009 sebagai berikut :

(Sad)


Tabel 2. Analisa Sederhana Pembuatan Emping Garut Rasa Bawang, 2009

Dalam 100 kg umbi garut dapat dikerjakan dalam 1 hari oleh 10 orang

Rendemen pati 5% = 5 kg

Rendemen emping 20% = 20 kg

| No. | Uraian | Satuan | Harga Per Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---|-----------|-----------------------|-------------|
| 1 | Selama panen (Juni s/d Oktober 2009) dikerjakam 10 orang yang tergabung dalam kelompok usahatani Manfaati | | | |
| A. | Modal | 100 kg | 1100 | 110.000 |
| | Bahan umbi | | | |
| | Jumlah | | | 110.000 |
| B | Biaya | | | |
| 1. | Sarana produksi | | | |
| | Kompore gas | 1 bh | 200.000 | 200.000 |
| | Tabung gas | 1bh | 150.000 | 150.000 |
| | langseng | 1 bh | 75.000 | 75.000 |
| | Para-para | 5bh | 20.000 | 100.000 |
| | Pemukul | 2bh | 30.000 | 60.000 |
| | Plastik | 5m | 6.000 | 30.000 |
| | Jumlah | | | 615.000 |
| | Umur ekonomis 1000x produksi | | | |
| | Biaya tiap hari produksi (jumlah 1) | | | 615 |
| 2. | Bahan pendukung | | | |
| | • Isi gas 3 kg Rp. 15.000,- (3 x produksi) | 1 paket | 5.000 | 5.000 |
| | • Plastik pengemas emping | 36 lembar | 150 | 5.400 |
| | • bumbu | 1 paket | 10.000 | 10.000 |
| | Jumlah (2) | | | 20.400 |
| 3. | Tenaga kerja (0.5 hari) 10 orang | | 10.000 | 100.000 |
| | Jumlah (3) | | | 100.000 |
| | Jumlah B (1-3) | | | 121.015 |
| | Total biaya (A+B) | | | 231.015 |
| C. | Pendapatan | 20 kg | 22.000 | 440.000 |
| | Pati garut | 5kg | 15.000 | 75.000 |
| | Jumlah (c) | | | 515.000 |
| D | Keuntungan | | | 283.985 |
| | R/C | | | 2.22 |
| | B/C | | | 1.22 |



Sumber: http://matanews.com/wp_content/uploads/tanam

PEMANFAATAN LIMBAH TEBU UNTUK PAKAN TERNAK

Limbah tanaman tebu berpotensi sebagai pakan ternak alternatif yang berkualitas.

Potensi Limbah Tebu

Limbah tanaman tebu dan industri olahannya terdiri dari pucuk tebu, ampas tebu, blotong, dan tetes. Dari hasil sampingan tersebut ada yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai

pakan ternak seperti pucuk tebu dan tetes, dan ada yang harus melalui proses pengolahan untuk memperbaiki kualitasnya seperti ampas tebu, dan bahkan ada yang dimanfaatkan setelah diolah menjadi bahan lain seperti ragi pakan ternak dan lysine dari tetes. Disamping itu ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk limbah dari proses pengolahan hasil samping

seperti empulur, ampas tebu (bagasse pith) yang merupakan hasil samping dari pengolahan ampas tebu menjadi pulp.

Jenis Limbah Tebu untuk Pakan Ternak, Usahatani tebu dan industrinya akan memperoleh hasil samping yang sangat bermanfaat untuk pakan ternak, diantaranya adalah pucuk tebu segar, wafer pucuk tebu, pellet pucuk tebu, daun kletekan, sogolan, ampas tebu, empulur ampas tebu, tetes, blotong dan lain-lain

1. Tetes, Tetes adalah limbah permurnian gula yang merupakan sisa nira yang telah mengalami proses kristalisasi. Tetes ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai komponen bahan baku industri fermentasi maupun sebagai komponen pakan ternak. Cara penggunaan tetes sebagai pakan ternak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain. (1) terpisah dengan bahan pakan lainnya, (2) disemprotkan pada pakan hijauan atau biji-bijian, (3) dicampur dalam pakan campuran yang siap digunakan, dan (4) sebagai pengawet dalam pembuatan silase sebanyak 1-4 % dari berat hijauan. Salah satu keterbatasan penggunaan tetes secara langsung untuk pakan ternak ruminansia adalah adanya Kalium dalam tetes yang pada kadar tertentu memiliki *laxative effect* dan pada kadar tinggi dapat mengganggu pencernaan, Kadar tetes dalam formula ransum dapat mencapai 40-60 %. Salah satu formula yang sering digunakan pada penggemukan sapi potong terdiri

dari tetes 40 %, jagung dan yellow meal 35%. Empulur ampas 12 %, ampas minyak kacang 8 %, urea 2 % mineral, vitamin dan mikroelemen 3 %.

2. Empulur Ampas Tebu, ampas tebu yang diolah menjadi pulp untuk pembuatan kertas akan memperoleh hasil samping, yaitu empulur ampas tebu. Empulur ampas tebu ini berasal dari ampas tebu yang sudah diambil seratnya untuk keperluan bahan serat pabrik kertas, Empulur ampas tebu ini mengandung bahan berserat tinggi, sehingga lebih sesuai sebagai sumber serat bagi ternak daripada sebagai kosentrat. Empulur ampas tebu ini dapat dimanfaatkan sebagai penyerap tetes dalam pakan ternak. Empulur ini tidak mungkin digunakan sebagai pakan ternak secara tunggal karena palatabilitasnya rendah. Amoniasi empulur ampas tebu dengan urea merupakan upaya delignisasi karena lignin dalam empulur ini cukup tinggi sehingga membatasi palatabilitasnya sebagai pakan. Amoniasi empulur ampas tebu juga dapat meningkatkan kandungan protein non nitrogen. Amoniasi dilakukan selama 3 minggu, dengan kadar urea 6% dari batang kering. Empulur ampas tebu amoniasi ini dapat digunakan sebagai pengganti sebagian hijauan tetapi dalam pemberiannya kepada ternak harus dicampurkan ke dalam pakan kosentrat. Untuk sapi potong, empulur ampas tebu dapat menggantikan setengah bagian hijauan, sedang untuk sapi perah



Pucuk Tebu

Sumber: [http://2.bp.blogspot.com/..](http://2.bp.blogspot.com/)

dapat menggantikan 15 % dari hijauan.

3. **Wafer pucuk tebu**, adalah pucuk tebu yang diawetkan dengan proses pengeringan secara cepat sehingga kadar airnya tinggal 9 – 12 % kemudian ditekan dengan tekanan tinggi sehingga berbentuk balok empat persegi panjang. Wafer ini dapat dikonsumsi sebanyak 2 % dari berat badan sapi potong atau sapi perah, sedangkan pada ternak domba dan kambing dapat diberikan masing-masing 2,4 % dan 2,9 % dari berat badan. Namun demikian sampai saat ini wafer ini baru diproduksi untuk tujuan ekspor karena harganya belum terjangkau oleh peternak di Indonesia.
4. **Pucuk Tebu Segar**, Pada umumnya hanya sebagian pucuk tebu saja yang diambil oleh peternak, bahkan di daerah perkebunan, pucuk tebu seringkali dibuang begitu saja sehingga petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyingkirkannya dari areal pertanaman. Sementara pucuk batang tebu dapat digunakan sebagai pengganti rumput gajah sebagai hijauan pakan ternak tanpa menimbulkan pengaruh negative terhadap ;pertambahan bobot badan ternak. Pucuk tebu juga dapat digunakan untuk pakan penggemukan sapi, baik sebagai satu-satunya sumber hijauan makanan ternak maupun sebagai hijauan campuran dengan rumput gajah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pucuk tebu segar dapat menggantikan sebagian atau seluruh rumput yang diberikan kepada pedet lepas sapih, sapi yang digemukkan atau sapi perah yang sedang berproduksi, tanpa memberikan pengaruh negative terhadap kondisi tubuh maupun produksi ternak. Namun demikian, pucuk tebu ini kandungan gizinya kurang memadai untuk pakan ternak, sehingga harus ditambah dengan pakan suplemen. Pucuk tebu yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah ujung atas batang tebu berikut 5 – 7 helai daun yang dipotong dari tebu yang dipanen untuk tebu bibit atau bibit giling. Bila dilihat dari kandungan nutrisinya, protein kasar pucuk tebu lebih tinggi bila dibandingkan kandungan protein kasar jerami padi maupun jerami jagung, akan tetapi kandungan serat kasarnya adalah yang tertinggi.
5. **Pellet Pucuk Tebu**, Pucuk tebu yang sudah tidak terpakai bagi pabrik gula, masih dapat dimanfaatkan bagi peternak karena dapat digunakan untuk membuat pellet. Pada penggemukan sapi, pemberian pellet dapat mempercepat kenaikan

berat badan. Sedangkan pada sapi perah laktasi, pemberian pellet dapat menurunkan kadar lemak susu. Pellet pucuk tebu ini dapat dibuat dengan cara memotong-motong pucuk tebu, kemudian dikeringkan. Potongan kering kemudian digiling menggunakan mesin pellet. Untuk menghasilkan 1 (satu) ton pellet dengan kadar air sekitar 9-11 % diperlukan 4 ton pucuk tebu segar.

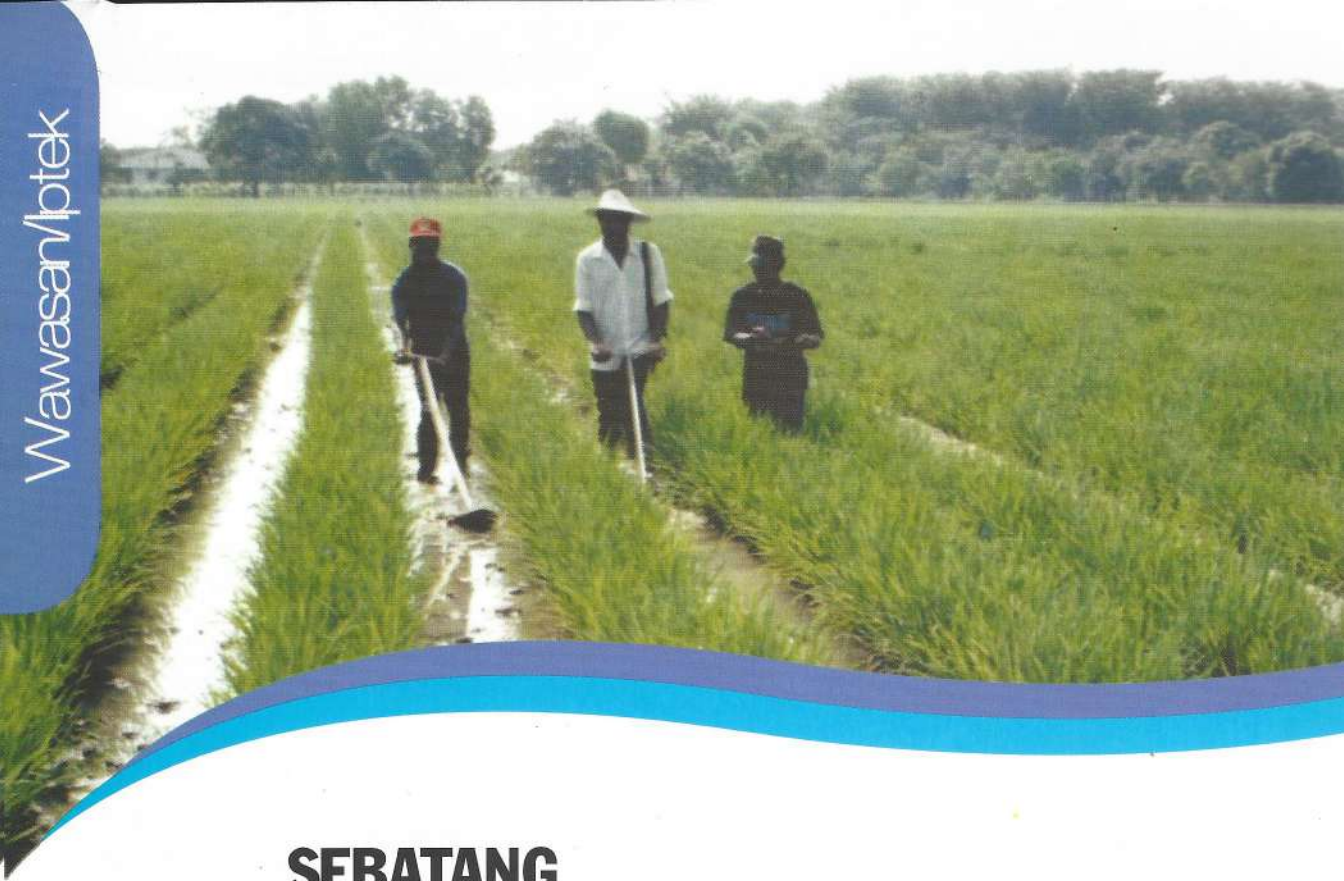
6. **Daun kletekan dan sogolan**, *Daun kletekan* adalah daun tebu yang diperoleh dengan cara melepaskan 3 – 4 daun tebu pada saat tebu berumur 4 bulan, 6 bulan dan 8 bulan, yang masing – masing disebut kletekan 1, 2 dan 3. Daun kletekan ini pada umumnya hanya dibuang begitu saja, atau dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Bagi peternak, ternyata daun kletekan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia, yang potensial untuk dayagunakan, baik secara langsung maupun diolah dahulu...*Sogolan*, adalah tunas-tunas tebu yang diafkir. Produksi sogolan ini cukup tinggi dan banyak diperoleh pada areal tanam yang mendapatkan irigasi yang baik dan pada tanaman tebu yang roboh hingga memungkinkan tumbuhnya tunas-tunas baru. Sogolan ini juga merupakan sumber pakan ternak yang potensial untuk didayagunakan, baik secara langsung maupun diolah dahulu.
7. **Ampas Tebu**, Ampas tebu umumnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Namun demikian, tidak semua ampas tebu

dimanfaatkan untuk pembuatan kertas, sehingga sisa ampas tebu masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Ampas tebu ini dapat untuk menggantikan sebagian hijauan pakan ternak karena mikro organism dalam pencernaan ternak ruminansia mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan serat kasar sebagai sumber energi. Bila ditinjau dari kandungan gizinya, ampas tebu tidak memenuhi persyaratan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok apalagi produksi, sehingga harus ditambah dengan pakan suplemen.

8. **Blotong**, adalah kotoran yang dapat dipisahkan dengan proses penapisan dalam proses klarifikasi nira. Blotong ini mengandung bahan organik, mineral serta protein kasar dan gula yang masih terserap dalam kotoran tersebut. Selain dapat digunakan sebagai pupuk organik, blotong juga dapat digunakan untuk pakan ternak.

Uraian diatas menawarkan kepada peternak atau pengusaha ternak agar dapat memillih alternative limbah tebu yang dapat diberikan kepada ternak ruminasia besar pada saat mengalami kesulitan dalam mendapatkan hijauan ternak segar terutama dimusim kemarau selain itu dapat menekan biaya pakan yang cukup tinggi.

(Sri Widjiastuti)



SEBATANG MENGHASILKAN BERAS

Budidaya tanaman terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan teknologi yang ditemukan oleh para ahli dibidangnya. Bertanam padi tidak harus dilakukan dengan penanaman serumpun benih padi, karena sekarang ini teknologi yang berkembang pada penanaman benih padi dapat dilakukan dengan metoda penanaman sebatang benih padi yang dikenal dengan nama *System Of Rice Intensification* (SRI). Informasi yang menarik pada penanaman benih padi dengan metode SRI adalah keunggulan hasil produksi panen yang dapat meningkat sampai 50%.

Tidak berbeda dengan negara negara berkembang lainnya, Indonesia juga menghadapi krisis ekonomi dan berlanjut pada krisis pangan, yang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, karena itu penanaman padi dengan metoda SRI akan sangat membantu dalam menghadapi krisis pangan. Penanaman padi dengan metoda SRI merupakan budidaya padi yang berprinsip pada pengelolaan tanah, tanaman dan air dengan menggunakan kearifan lokal melalui pemberdayaan kelompok.

Selain Indonesia juga sudah banyak negara negara di Asia Selatan dan

Asia Tenggara yang melakukan pengembangan uji coba budidaya SRI. Di Indonesia SRI sudah diuji cobakan di beberapa kabupaten di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi serta Papua.

SRI ditemukan pertamakalinya oleh Henri de Laulanie pada tahun 1983, seorang pendeta dari Madagaskar yang memiliki kepedulian kepada petani di Madagaskar dengan produktivitas pertaniannya yang tidak bisa berkembang. Berangkat dari keterbatasan petani dengan lahan, biaya dan waktu itulah yang mendorong Laulanie memberikan bantuan sarana kepada petani untuk penanaman padi dan telah berhasil menghantarkan keberhasilan petani meningkatkan produktivitasnya.

Komponen komponen penting yang dilakukan pada SRI antara lain 1) Transplantasi bibit muda, 2) Bibit ditanam satu batang, 3) Jarak tanam lebar, 4) Kondisi tanah lembab atau irigasi berselang dan 5) Melakukan pendangiran atau penyiangan.

Dilingkungan petani, penanaman padi metoda SRI lebih dikenal dengan nama "padi tanam sebatang". Salah satunya adalah kelompok tani Cangkiang Baduri Kurao Pagang dikecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat, yang menjelaskan keuntungan dalam budidaya padi sebatang yaitu 1) budidaya padi SRI telah mampu meningkatkan hasil produksi dibandingkan padi yang ditanam secara konvensional, 2) meningkatkan pendapatan, dan 3) Terjadi efisiensi produksi dan efisiensi usaha tani.

Kegiatan utama yang perlu dilakukan dalam budidaya padi dengan metoda SRI ada 3 (tiga) yaitu pengelolaan bibit padi secara seksama dan penyiapan lahan tanam serta pemupukan.

Penyiangan dengan cara mekanis

1. Penanganan bibit padi secara seksama

Pengelolaan bibit merupakan kegiatan awal penanaman padi sebatang. Adanya perbedaan dalam penanganan bibit pada penanaman padi sebatang dengan penanaman padi konvensional yang umumnya dilakukan dengan menggunakan bibit yang tua yaitu berumur lebih dari 15 hari setelah penyemaian dengan cara penanaman 5-10 batang bahkan lebih pada setiap lubang titik tanam, penanaman padi dilakukan dengan cara akarnya dibenamkan dengan menggunakan jarak tanam yang rapat sedangkan pada penanaman padi sebatang dilakukan pada penanaman bibit padi berusia muda yaitu umur 10 hari setelah penyemaian, penanaman pada satu titik tanam dilakukan penanaman satu batang, penanaman tanaman dilakukan secara dangkal yaitu akar tidak dibenamkan dan ditanam secara horizontal dengan menggunakan jarak tanamnya cukup lebar. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal juga dilakukan dengan menggunakan bibit unggul.

Adanya perbedaan pada penanganan bibit dijelaskan dengan alasan berikut;

- a. **Penanaman padi sebatang**, hal ini disebabkan tanaman padi membutuhkan tempat tumbuh yang cukup agar padi dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Bila penanaman bibit padi dalam jumlah banyak akan menimbulkan persaingan untuk mendapatkan nutrisi, cahaya matahari, udara dan kebutuhan tanaman lainnya dalam satu area tanam
- b. **Penanaman bibit padi dangkal**, bertujuan untuk memacu proses pertumbuhan akar muda. Penanaman akar yang terbenam dapat menimbulkan kekurangan oksigen dan gangguan siklus nitrogen. Kekurangan oksigen menyebabkan keracunan akar, dan gangguan siklus nitrogen dapat menyebabkan pelepasan energi, produksi asam yang tinggi akibat penanaman yang akarnya terbenam akan memangkas potensi akar sampai $\frac{1}{4}$ bagian saja.
- c. **Penanaman bibit dengan jarak yang cukup lebar**, hal ini menjamin selama proses padi siap panen seluruh nutrisi, udara, cahaya matahari dan bahan lainnya tetap tersedia dalam jumlah yang cukup
- d. **Penanaman bibit padi usia muda**, pada penanaman padi konvensional bibit padi umumnya ditanam pada umur 15 hari setelah penyemaian yang dapat menimbulkan potensi

anakan tersisa $\frac{1}{3}$ dari jumlah potensi anakan. Namun dengan penanaman metode SRI dapat menambah anakan mencapai 64%.

2. Penyiapan lahan tanam



Penyiapan lahan tanam

Perlu dilakukan pengolahan tanah dengan cara dibajak sebanyak 2 kali kemudian digaru yang akan mendapatkan pelumpuran yang sempurna

Ada perbedaan dalam penggunaan air dan pupuk, pada penanaman metoda SRI digunakan air sedikit sehingga keadaan tanah cukup terlihat basah Sedangkan untuk penanaman padi konvensional penggunaan air sampai dalam keadaan tanah tergenang air. Padi membutuhkan air tetapi tidak terlalu banyak, pada tanah yang tergenang air akan menimbulkan kerusakan pada struktur padi sebab padi bukanlah jenis tanaman air. Hal lain yang ditimbulkan oleh proses penggenangan air akan menimbulkan hama.

Sebagai pembanding pada tanaman padi liar yang hidup di tanah kering ternyata musuh alami hama padi dapat hidup dan menjaga kestabilan dengan memakan hama tersebut. Namun ketika padi hidup di tanah yang tergenang air, musuh alami hama padi tidak dapat hidup sedangkan hama padinya dapat hidup hal inilah yang memacu adanya hama padi baru yang berasal dari lingkungan air.

3. Pemupukan

Agar efektif dan efisien penggunaan pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Kebutuhan N tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan warna daun padi menggunakan Bagan Warna Daun (BWD)

Pemupukan pada penanaman padi secara SRI, dilakukan sebanyak 4 kali. Tahap pertama yaitu sehari sebelum tanam diberi pupuk organik (kalau memungkinkan sebanyak 10 ton kompos/ha/musim), namun kalau susah didapat pupuknya bisa dilakukan sekitar 2 ton/ha. Selanjutnya untuk tahap ke dua dengan menggunakan penggunaan pupuk sintetis atau an organik pada umur seminggu setelah tanam. Untuk tahap ke tiga umur sekitar 4 minggu dan tahap ke 4 umur sekitar 7 minggu.

Sistem SRI ternyata tidak sulit untuk dilaksanakan, selama memperhatikan komponen-komponen teknologi SRI sesuai rekomendasi, sehingga tanam sebatang benar-benar memberikan keuntungan.

Dengan melihat keuntungan tanam padi sebatang dan mudahnya pelaksanaannya diharapkan dapat diikuti oleh petani lain di Wilayah yang belum melakukannya. Keberhasilan sistem tanam padi sebatang merupakan bentuk dukungan masyarakat dalam program ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selamat mencoba!

Penerapan SRI oleh Kelompok Tani Cangkiang Baduri, Kurao Padang, kecamatan Nanggalo, kota Padang sbb:

Persemaian

- Persemaian dibuat dengan ukuran 250 m², taburkan sekam diatas persemaian yang bertujuan untuk memudahkan pencabutan benih,
- Kebutuhan benih untuk 1 ha sebanyak 7 kg.
- Cara menyebarkan benih agak jarang yaitu +/- 70 gram per m²
- Umur benih 8 -12 hari

Untuk metode padi tanam sebatang lahan perlu dibajak sebanyak dua kali. Dianjurkan menggunakan traktor dan digaru satu kali sehingga didapat pelumpuran yang sempurna. Di pinggiran pematang dibuat saluran drainase berukuran lebar 30 cm dalam 30 cm sebagai saluran pengeringan. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai pengendalian hama keong mas.

Penanaman

Sebelum tanam, air yang ada di lahan tidak boleh tergenang (macak-macak). Padi ditanam sebatang (tunggal) pada garis yang sejajar dengan jarak tanam 25 X 25 cm.

Pemupukan

| No | Waktu Pemberian | Jenis Pupuk | Dosis |
|----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Sehari sebelum tanam | Organik (pupuk kandang/ kompos) | 2ton/ha |
| 2 | Seminggu setelah tanam | Urea 1/3 dosis KCL ½ dosis | 35-50 kg 37,5-50 kg |
| 3 | Susulan I (umur 4 minggu) | Urea 1/3 dosis KCL ½ dosis | 35 – 50 kg 37,5 – 50 kg |
| 4 | Susulan II (umur 7 minggu) | Urea 1/3 dosis | 50 kg |

Pengaturan air

| No | Umur tanaman | Tinggi pengairan | Keterangan |
|----|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 4 minggu | Tidak diairi | Macak-macak |
| 2 | 5 – 10 minggu | 2,5 – 5 cm | Diairi secukupnya |
| 3 | 11 -14 minggu | 5 – 7,5 cm | Diairi yang banyak |
| 4 | 15 – 18 minggu | 7,5 – 0 | Dikeringkan |

Pengendalian Hama Penyakit

Dengan cara menerapkan pengendalian hama terpadu(PHT) serta menggunakan pestisida sesuai anjuran.

Panen

Padi dipanen sesuai dengan kematangan fisiologis tanaman yaitu ditandai dengan bulir padi berwarna kuning dengan presentase masak telah mencapai 85%.

(Inang sariati)

Perhitungan sederhana tanam padi sebatang luas 1 ha pengalaman kelompok tani Cangkiang Baduri Kota Padang

| No | Uraian | Volume | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| 1A | Tenaga kerja | | | |
| | 1. Persemaian | 3 orang | 60.000 | 180.000 |
| | 2. Pengolahan tanah (mesin) | 4 orang | 250.000 | 1.000.000 |
| | 3. Pemupukan | 4 orang | 60.000 | 240.000 |
| | 4. Menanam | 20 orang | 37.500 | 750.000 |
| | 5. Pemeliharaan/penyiangan | 25 orang | 60.000 | 1.500.000 |
| | 6. Pengaturan air/penyisipan | 3 orang | 100.000 | 300.000 |
| | 7. Panen/pasca panen | 25 orang | 60.000 | 1.500.000 |
| | Jumlah | | | 5.470.000 |
| 1B | Sarana Produksi | | | |
| | 1. Bibit | 7 kg | 60.000 | 42.000 |
| | 2. Urea | 100 kg | 2.000 | 200.000 |
| | 3. Pupuk phonska | 300 kg | 2.500 | 750.000 |
| | 4. Pupuk kandang | 500 kg | 1.000 | 500.000 |
| | 5. Pestisida | 2 kaleng | 15.000 | 30.000 |
| | Jumlah | | | 1.522.000 |
| | Jumlah A + B | | | 6.922.000 |
| II | Output | | | |
| | Penjualan gabah | 6.080 kg | 3.000 | 18.240.000 |
| | Pendapatan bersih | | | 11.318.000 |

Sumber : Gusniar Chan Kepala BPP Nanggalo Kota Padang



H. AKOM

MOTIVATOR PENERAPAN POLA SRI DARI DESA CARIUMULYA-KARAWANG

Tidak mudah memperoleh hasil panen gabah 12 ton per hektar, bahkan mustahil hasil panen gabah tersebut dapat diperoleh, karena sudah bertahun-tahun H. Akom menekuni budidaya padi, produksinya hanya sekitar 6 ton. Namun berkat SRI maka hasil panen meningkat.

Nama lengkapnya H. Akom Kartim, petani yang satu ini termasuk petani yang sangat kreatif. Betapa tidak petani ini telah menciptakan alat emposan tikus hasil temuannya sendiri yang diberi nama "POSRIT" yang merupakan singkatan dari Alat Emposan Tikus Elektrik yang dijual seharga Rp. 300.000.- perbuahnya. Dilahirkan di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang merupakan lumbung padi nasional, tepatnya pada

tanggal 10 mei 1964. Namun, warga di daerah tempat tinggalnya di Kampung Kedunggalih, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Jawa Barat memanggilnya dengan nama H.Akom.

Menurut ceritera Bapak 2 orang anak ini, keberhasilan dalam menanam padi dengan pola SRI (*System of Rice Intensification*) berawal dari pinjam "Buku SRI" kepada seorang POPT

(Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) tahun 2006. Niat awal pinjam buku, sebenarnya hanya ingin memupus rasa penasaran soal hasil panen padi yang tinggi apabila menerapkan pola SRI.

Didalam Buku SRI tertulis bahwa usaha budidaya padi dengan pola SRI di Thailand dapat menghasilkan 14 ton/ha, di Taiwan 18 ton/ha dan beberapa negara Asia lain diperoleh hasil 12 ton/ha. Awal baca, dalam hati saya tidak mungkin, saya penasaran dan mencobanya, ternyata bisa meskipun hasilnya belum optimal,"ujarnya. Buku SRI itu kemudian menjadi "pedoman" bagi H. Akom karena setiap masalah yang ditemukan di lapangan dapat diatasi setelah menerapkan anjuran seperti apa yang tertulis dalam Buku SRI tersebut.

Ibarat obat yang mujarab, buku itu lantas menjadi rebutan petani yang ingin ikut membacanya karena ingin mencoba menanam padinya dengan pola SRI. Oleh karena itu,



Bercocok tanam padi SRI bersama anggota kelompok

beberapa petani meminjamnya secara bergantian.

Lebih lanjut, H.Akom mengatakan awal uji coba melaksanakan metoda tanam padi dengan pola SRI dilakukan bersama Kelompoktani Dewi Sri dimana alumnus SMA ini menjadi ketuanya. Dari lahan uji coba seluas 1.000 meter persegi pada tahun 2005 diperoleh hasil 1,2 ton. Itu berarti 12 ton/ha, jauh di atas pencapaian sebelumnya yang berkisar 5 ton-6 ton/ha yang selama itu dilakukannya dengan metoda Non SRI.

Pola SRI Hasilnya Lebih Banyak

Menurut Pak Akom, menanam padi dengan metoda SRI hasilnya jauh lebih banyak dibanding dengan metoda Non SRI. Hal ini dibuktikan pada musim tanam 2008, padi yang saya tanam dengan metoda SRI semi organik produksinya bisa mencapai 9 ton/ha, sedangkan yang ditanam dengan metoda Non SRI produksinya hanya 4 ton/ha.

Selain produksinya lebih tinggi, menanam padi dengan metoda SRI mampu menekan serangan penggerek batang pada level serangan ringan selama 5 musim tanam padi berturut-turut. Dibanding dengan desa-desa tetangganya yang menanam padi dengan Non SRI, serangan penggerek batang pada tingkat serangan berat, bahkan ada yang puso, alias tidak dapat panen.

Lebih lanjut, H. Akom mengatakan hasil yang tak terduga sewaktu melakukan

uji coba dengan luas lahan 1.000 meter persegi tahun 2005 dengan hasil 12 ton/ha itu, maka pada musim tanam kedua, dia menetapkan hati untuk menanam seluruh sawahnya seluas 0,5 ha di Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan asumsi hasil 12 ton/ha seperti hasil uji coba, H. Akom memperkirakan hasil panen padinya yang diusahakan di lahan sawahnya seluas 0,5 bisa mencapai 6 ton. Namun kenyataannya lain. Hasil panen ke dua dengan pola SRI hanya 3,75 ton atau 62,5 % dari perkiraannya. Rupanya tidak gampang berharap pada lahan yang telah lama "sakit" akibat penggunaan pupuk kimia bertahun-tahun. Tanah butuh perlakuan khusus agar pulih lagi," kata H. Akom menyimpulkan hasil panen padi musim tanam kedua tersebut.

Berdasarkan pengalaman, menanam padi dengan pola SRI produksinya lebih banyak, maka pada musim tanam berikutnya, Kelompok tani Dewi Sri menambah luas tanam padinya yang sampai sekarang luasnya lebih kurang 20 ha. Kata H. Akom, Kelompok tani Dewi Sri merupakan salah satu dari 5 kelompok tani yang ada di Desa Cariumulya yang tergabung dalam "Gabungan Kelompok tani Dewi Sri". Empat kelompok tani lainnya adalah Kelompok tani Tani Mukti I, Tani Mukti II, Mekarjaya I dan Mekarjaya II.

Membentuk Kelompok tani Dewi SRI

Awal pembentukannya, dimulai

karena di Desa Cariumulya merupakan desa kronis endemis serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman, terutama hama penggerek batang, wereng coklat dan tikus. Dengan keadaan desa seperti ini, mulai tahun 2006, Desa Cariumulya dipilih oleh Pemerintah sebagai rintisan Desa PHT (Pengendalian Hama Terpadu).

Dengan adanya kegiatan rintisan Desa PHT tersebut, petani-petani yang ada di Desa Cariumulya mempunyai kesadaran dan keyakinan masalah OPT yang menimpa desanya tidak dapat dipecahkan tanpa adanya kebersamaan dan kekompakan dari semua petani. Berdasarkan musyawarah dan mufakat diantara petani yang ada di Desa Cariumulya membentuk kelompok tani pada tanggal 4 April 2006 dengan nama "Kelompok tani Dewi Sri" dengan Ketua H. Akom Kartim. Sejak itulah, Kelompok tani Dewi Sri muncul diantara kelompok tani yang ada di Desa Cariumulya..

Menciptakan POSRIT

H. Akom termasuk orang yang kreatif karena tidak pernah berhenti mengeksplorasi ide. Dari hasil otak-atik idenya, dia menciptakan POSRIT yang merupakan singkatan dari "Emposan Beurit" yang digunakan sebagai alat emposan tikus.



Membasmi tikus dengan POSRIT

Alat pengembus asap belerang yang oleh warga setempat disebut "emposan" sebagai alat untuk mengusir tikus dari lubang-lubangnya. Cara kerjanya, menurut H. Akom pertama-tama masukkan jerami kering yang sudah ditabur belerang ke dalam selosong emposan. Selanjutnya, botol diisi minyak tanah, lalu nyalakan api pada sumbu starter (posisi emposan dimiringkan). Tutup lubang pembakaran sambil posisi emposan ditegakkan. selanjutnya, hidupkan kipas (blower) dengan menekan stop kontak ke baterai. Setelah keluar asap, masukkan asap tersebut ke lubang tikus.

Emposan tikus ciptaan H. Akom tidak saja laku dijual di Kecamatan Telagasari, tetapi juga laku di jual di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Karawang, yaitu di Kecamatan Majalaya, Cilamaya, Rengasdengklok, Rawamerta, Tirtamulya, Lemahabang dan Kecamatan Cilebar, bahkan sudah dijual sampai ke kabupaten lain, yaitu ke Kabupaten Subang. Malah kini emposan tikus ciptaannya sudah banyak yang memesannya,.

Sukses Menerapkan SRI

Dengan hasil panen padi yang diperoleh H. Akom, pengikutnya sedikit demi sedikit bertambah yang dibuktikan petani yang menerapkan pola SRI bertambah. Dengan bertambahnya petani yang menanam pola SRI maka sawah yang digarap pun meluas dimana pada tahun 2009 luasnya mencapai 20 ha. Semula hanya H. Akom seorang diri yang menanam padi dengan pola SRI, kini sudah ada 36 petani yang menanamnya dengan pola SRI di Kampung Kedunggalih.

Lebih lanjut H. Akom mengatakan, pola budidaya SRI dilengkapi dengan sistem organik. Maksudnya, dalam budidaya padinya, dia tidak frontal dengan serta merta meninggalkan pupuk kimia, khawatir hasil panennya anjlok. Caranya, H. Akom mengurangi dosis pupuk Urea dan NPK yang dicampur dengan kompos untuk memupuk tanaman padinya. Dengan cara ini, maka petani di desa Cariumulya kini umumnya menggunakan 1,5 kuintal campuran pupuk Urea dan NPK per hektar. Dosis yang diberikan ini lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 3 kuintal-4,5 kuintal per hektar, serta



Pembuatan pupuk organik

pupuk kandang dan kompos dari sisa tumbuhan.

Tidak hanya pada tanaman padi, H. Akom juga mengaplikasikan sistem organik pada komoditas lain yang dia tanam seperti jambu biji merah, pisang, kacang panjang dan labu. Komoditas non padi ini menjadi sumber penghasilan tambahan di luar padi yang rutin dia tanam dua kali setahun.

Kini, kata H. Akom, tanaman jambu biji merah yang ditanam oleh anggota Kelompoktani Dewi Sri lebih kurang 11 ha dengan jumlah pohon lebih kurang 13.750 pohon. Setiap pohon rata-rata menghasilkan 1 kg yang dipanen 3 harisekali, jadi dalam 1 bulan bisa dipanen 10 kali. Dengan demikian dalam 1 bulan dari 13.750 pohon

dapat diperoleh jambul lebih kurang 17.500 kg. Setiap 1 kg dijual Rp 1.500,- sehingga dalam 1 bulan, Kelompoktani Dewi Sri dapat mengantongi uang lebih kurang $17.500 \times \text{Rp } 1.500,- = \text{Rp } 206.250.00$,

Bertemu Dengan Presiden

Dengan aktifitas yang dilakukan H. Akom mampu menarik perhatian, baik petani maupun petugas dari luar wilayahnya. Bukan cuma itu, berkat keberhasilan usahatani yang dilakukannya, H. Akom dipilih sebagai Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat, bahkan beliau juga sebagai salah satu Petani Berprestasi Tingkat Nasional. Bersama dengan Petani Berprestasi lain yang berasal dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, H. Akom berkesempatan bersalaman dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menerima penghargaan di Istana Presiden Jakarta pada bulan Agustus 2009 yang lalu. Kesempatan bersalaman dengan Bapak Presiden Republik Indonesia merupakan kesempatan yang sangat langka, terutama bagi petani pada umumnya. *(Muchdat Widodo)*



Tantangan, Strategi, Target dan Sasaran Pertanian 2010-2-14

CAPAIAN 2005-2009

1. PDB:
rata-rata tumbuh
3,57% per tahun
2. Neraca perdagangan:
surplus US\$ 6,4 M-17,94 M
3. Tenaga kerja pertanian:
40-43 juta jiwa
4. NTP:
93,5-101,2
5. Produksi padi:
54,15-63,84 juta ton
6. Produksi jagung:
12,52-17,65 juta ton
7. Produksi kedelai:
808-966 ribu ton ton
8. Produksi gula:
2,2-2,6 juta ton
9. Produksi daging sapi:
359-405 ribu ton

Tantangan pertanian 2010-2014

1. Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan, air, perbenihan, dan perbibitan
4. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah
5. Pencapaian MDG's
6. Penciptaan pricing policies
7. Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global
8. Perbaikan citra petani dan pertanian kembali diminati
9. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan
10. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif
11. Pemenuhan kebutuhan pangan disamping pengembangan komoditas horti, peternakan dan peningkatan ekspor perkebunan

STRATEGI

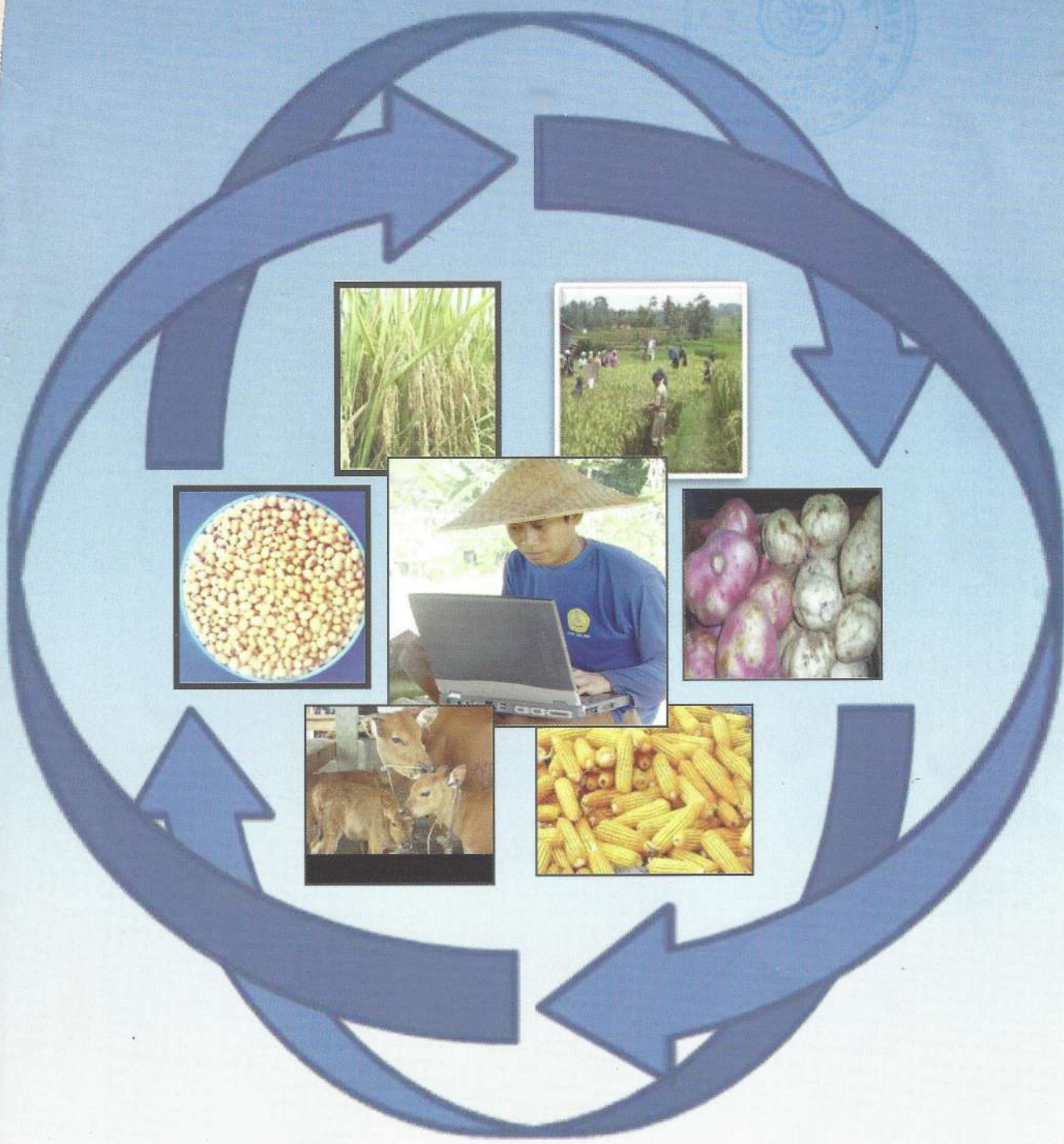
1. Revitalisasi Lahan
2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia
5. Revitalisasi Pembiayaan Petani
6. Revitalisasi Kelembagaan Petani
7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Target (Empat Sukses)

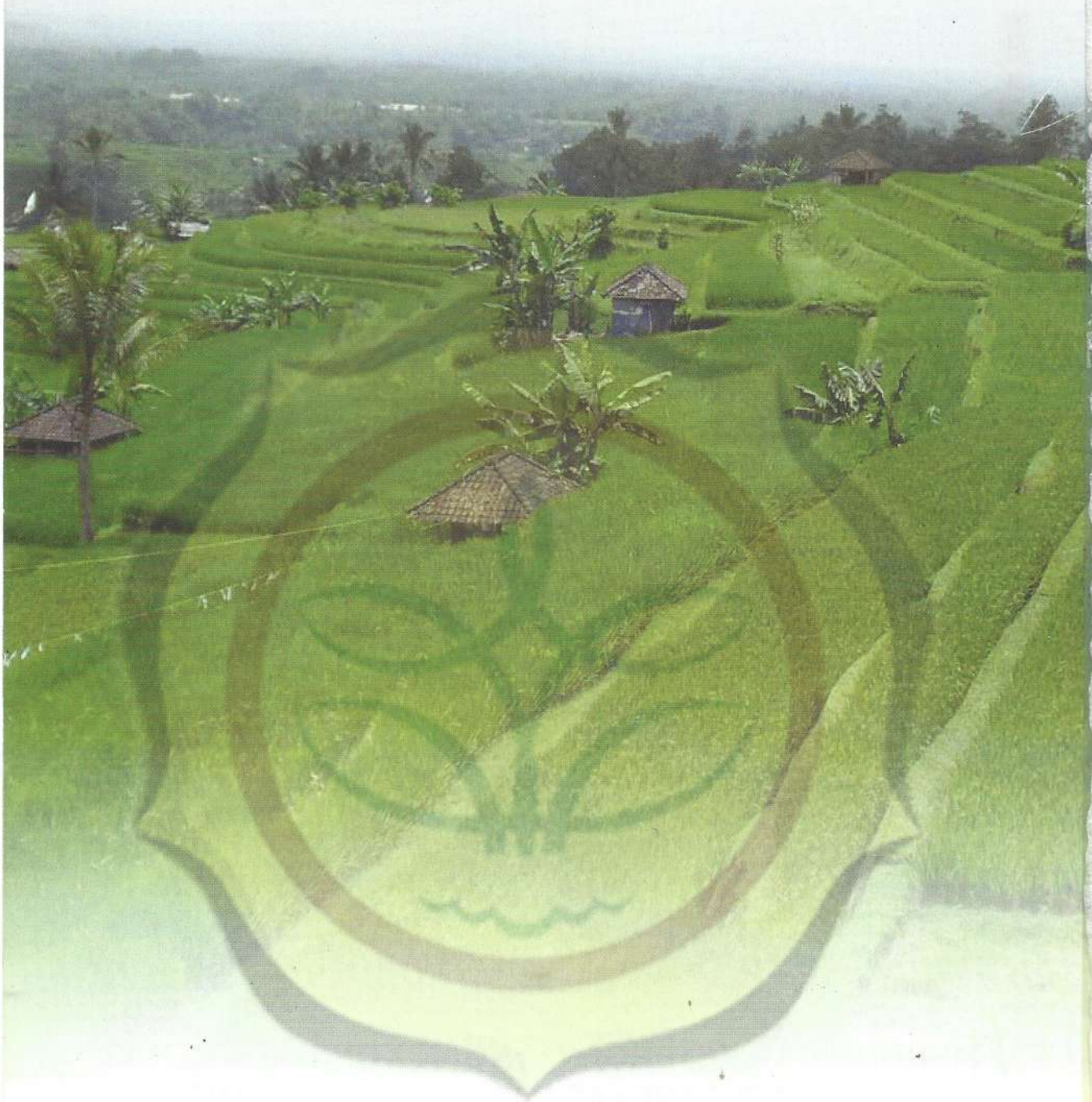
1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani

SASARAN 2010-2014

1. PDB pertanian sempit: tumbuh 3,62 - 3,75% per tahun
2. Neraca perdagangan: surplus US\$ 24,3 M - 54,5 M
3. Tenaga kerja pertanian: 43,71 - 45,36 juta jiwa
4. NTP: 115-120
5. Produksi padi: 66,68 - 75,70 juta ton
6. Produksi jagung: 19,8 - 29 juta ton
7. Produksi kedelai: 1,3 - 2,7 juta ton
8. Produksi gula: 2,9 - 5,7 juta ton
9. Produksi daging sapi: 412 - 546 ribu ton



**MENGURANGI KETERGANTUNGAN KONSUMSI BERAS
DENGAN PENGANEKARAGAMAN BAHAN PANGAN**



EKSTENSIA

Majalah Ekstensia menerima naskah ilmiah populer, tulisan penyuluh PNS yang bersifat aktual, singkat, padat, mudah dibaca dan dimengerti, dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat/diterbitkan atau tidak sedang dalam penyuntingan dimajalah/publikasi lain. Isi naskah berkaitan dengan penyuluhan pertanian dan disesuaikan dengan rubrik yang ada. Naskah diketik rapi pada kertas ukuran A4 spasi 1,5, huruf arial ukuran 12, maksimum 12 halaman termasuk gambar dan tabel, ditanda tangani oleh penulis, ditulis alamat yang mudah dihubungi, alamat email, dan nomor telepon/HP. Dikirim ke Sekretariat Dewan Redaksi, dengan alamat : Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Kampus Kementerian Pertanian, Ged. D, Lt.V, Jl.Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan. Telp. 021-7804386, Fax . 021-7804386 atau melalui email:

ekstensia@yahoo.com

Rubrik yang ditulis :

OPINI : Merupakan tulisan potret dari kondisi aktual di lapangan yang mengemukakan masalah, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian disertai dengan pemikiran tentang pemecahan masalah (maksimal 350 kata)

GEMA :Tulisan, dengan gambar/foto berisi segala sesuatu berkaitan dengan pengembangan profesi dan organisasi profesi penyuluhan pertanian.

WAHANA : Tulisan dan gambar/foto berupa feature/cerita kisah dan profil dari suatu kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan pelaku utama yang bertujuan untuk membangun motivasi dan partisipasi dalam pembangunan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PROGRAM PEMBERDAYAAN : Adalah tulisan/ informasi dengan gambar/foto yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian di bidang agribisnis melalui kegiatan program pemberdayaan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian.

SWADAYA :Tulisan dengan gambar/data kegiatan swadaya pelaku utama dan pelaku usaha, bertujuan untuk memotivasi/menggugah keswadayaan pelaku utama dan pelaku usaha yang lain.

WAWASAN/IPTEK : Tulisan atau informasi dengan gambar/foto, berisi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna atau pengalaman lapangan di bidang pertanian atau tulisan bersumber dari seorang ahli/peneliti/penyuluh/praktisi yang bertujuan menambah wawasan.

SOSOK : Tulisan dan gambar/foto berupa feature tentang sosok penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha mengenai keberhasilan (*sukses story*) dalam bidang pembangunan pertanian sebagai teladan bagi orang lain.



Diterbitkan Oleh:
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Badan Pengembangan SDM Pertanian
Kementerian Pertanian
Tahun 2010



ISSN 0853-5922

Perpustakaan Badan Penyuluhan
Pengembangan Sumber Daya Ma
Pertanian

Ekstensia / BPPSDMP



M0422026